



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**
Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
Laman : <https://lampung.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.9.PR.04.04 – 355 24 Januari 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kantor Wilayah Lampung Tahun 2022

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di -
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung 2022.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

LKIP 2022

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI** REFORMASI
HUKUM



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022.



Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Kepala Kantor Wilayah,

Sorta Delima Lumban Tobing
N.P. 19680205 199003 2 001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berisikan tentang Capaian Kinerja dan Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Lampung sepanjang tahun 2022 dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan di Tahun 2022.

Tahun 2022, merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran telah tercapai dengan baik sesuai indikator yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dan Target Kinerja (Tarja) Tahun 2022 yang tercermin dari hasil realisasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.
2. Target Kinerja (Tarja) Tahun 2022 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 masih menghadapi beberapa tantangan namun dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tahun 2022 mencapai 98,79% atau sebesar Rp. 242.409.773.794,- dari total anggaran sebesar Rp. 245.370.923.000,- . Namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan baik dan efisien.

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

1. Latar Belakang

a. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Dalam kegiatan konsolidasi dan koordinasi internal dilaksanakan dengan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung baik dengan pejabat struktural dan pegawai di Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis maupun melalui monitoring, peninjauan dan pengarahan pada jajaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Kegiatan koordinasi dan kolaborasi eksternal dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh stakeholder di Propinsi Lampung. Khusus dengan aparat penegak hukum di Propinsi Lampung koordinasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Dilkumjakpol sebagai sarana proses penegakkan hukum dalam Integrated Criminal Justice System di wilayah Provinsi Lampung.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidahkaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Salah satu perwujudan Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good Governance. United Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik goodgovernance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan good governance dalam acuan umum penerapan good governance pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk itulah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai tujuan sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022.

b. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas adalah menjadikan *Peningkatan Produktivitas Sebagai Prioritas*. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Lampung, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

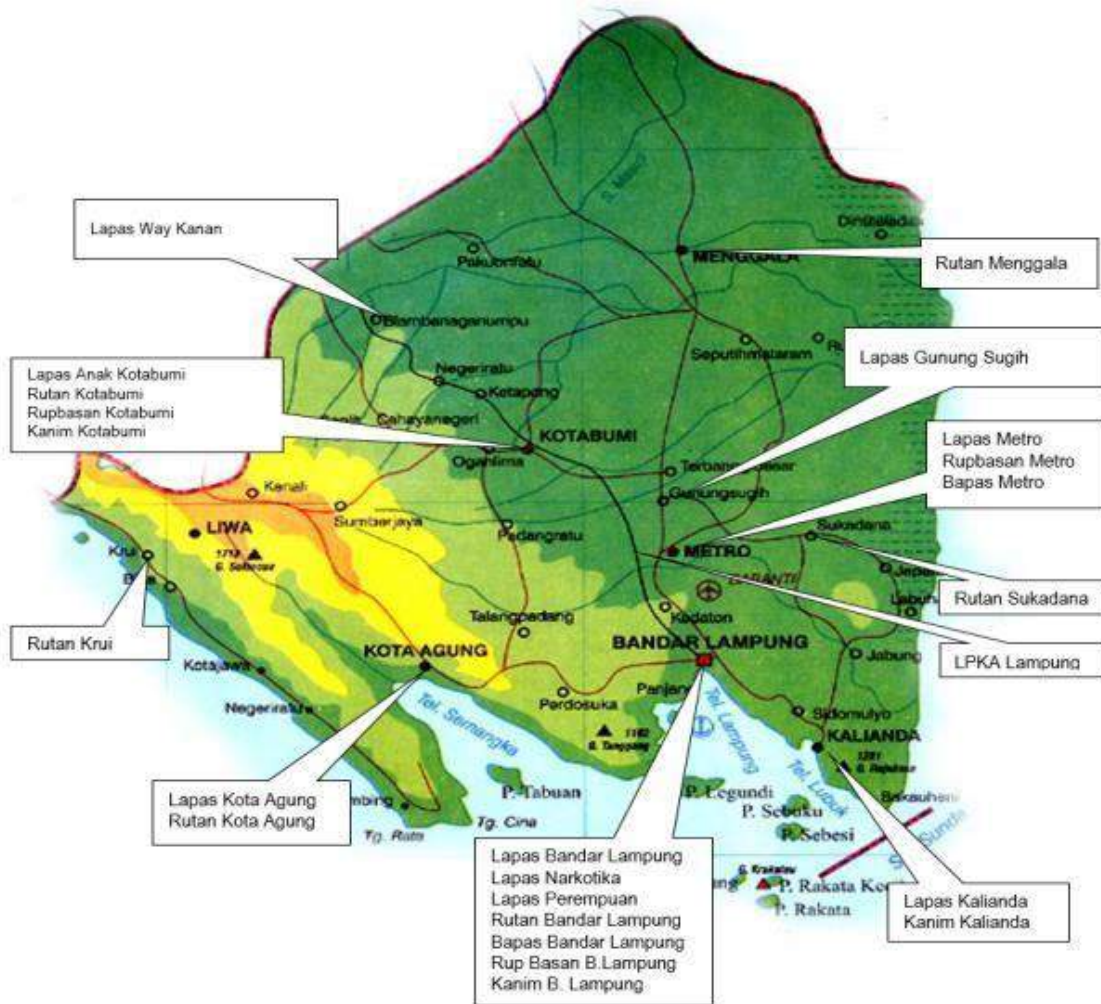
Fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

d. Organisasi

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dahulu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung, berdiri pada tahun 1982 berdasarkan KEPMENKEH RI Nomor M-868.KP.04.10 Tanggal 07 April 1982. Pada saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bengkulu masih bergabung dengan Propinsi Lampung, namun pada Tahun 1985 Propinsi Bengkulu tidak bergabung lagi dengan Propinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni:

1. Departemen Kehakiman (1945 – 1999);
2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999 – 2001);
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001 – 2004);
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2009);
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 sampai dengan sekarang).



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki **26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis** terdiri 10 (sepuluh) Lembaga Pemasyarakatan, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (dua) Balai Pemasyarakatan, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi sebagai berikut:

i. Lembaga Pemasyarakatan:

1. LAPAS Klas I A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. LAPAS Klas II A Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
3. LAPAS Klas II A Metro (Kota Metro).
4. LAPAS Anak Klas II A Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
5. LAPAS Klas II B Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).
6. LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
7. LAPAS Wanita Klas IIA Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
8. Lapas Kelas IIB Way Kanan (Kabupaten Way Kanan).
9. Lapas Kelas III Gunung Sugih (Kabupeten Lampung Tengah).
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB (Kabupaten Pesawaran).

ii. Rumah Tahanan Negara

1. RUTAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUTAN Sukadana (Kabupaten Lampung Timur).
3. RUTAN Menggala (Kabupaten Tulang Bawang).
4. RUTAN Krui (Kabupaten Pesisir Barat).
5. RUTAN Kotabumi (Lampung Utara).
6. RUTAN Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

iii. Balai Pemasyarakatan

1. BAPAS Klas II Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).

2. BAPAS Klas II Metro (Kota Bandar Metro).
3. BAPAS Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
4. BAPAS Klas II Pringsewu (Kabupaten Pringsewu).

iv. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

1. RUPBASAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUPBASAN Klas II Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. RUPBASAN Klas II Metro (Kota Metro).

v. Kantor IMIGRASI

1. Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. Kantor Imigrasi Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. Kantor Imigrasi Klas III Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung terdiri atas:

a. Divisi Administrasi:

1) Tugas :

- i. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

2) Fungsi :

- i. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.
- ii. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan.
- iii. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- iv. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- v. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- vi. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- vii. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Divisi Pemasyarakatan:

1) Tugas :

- i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.

2) Fungsi :

- i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- ii. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

- iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan.
- iv. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

c. Divisi Keimigrasian:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
 - ii. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
 - iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
 - iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
 - ii. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

- iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Keempat Divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a) Bagian Umum
 - i) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - ii) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- b) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - i) Subbagian Program dan Pelaporan
 - ii) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

2) Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - i) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - ii) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - i) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - ii) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

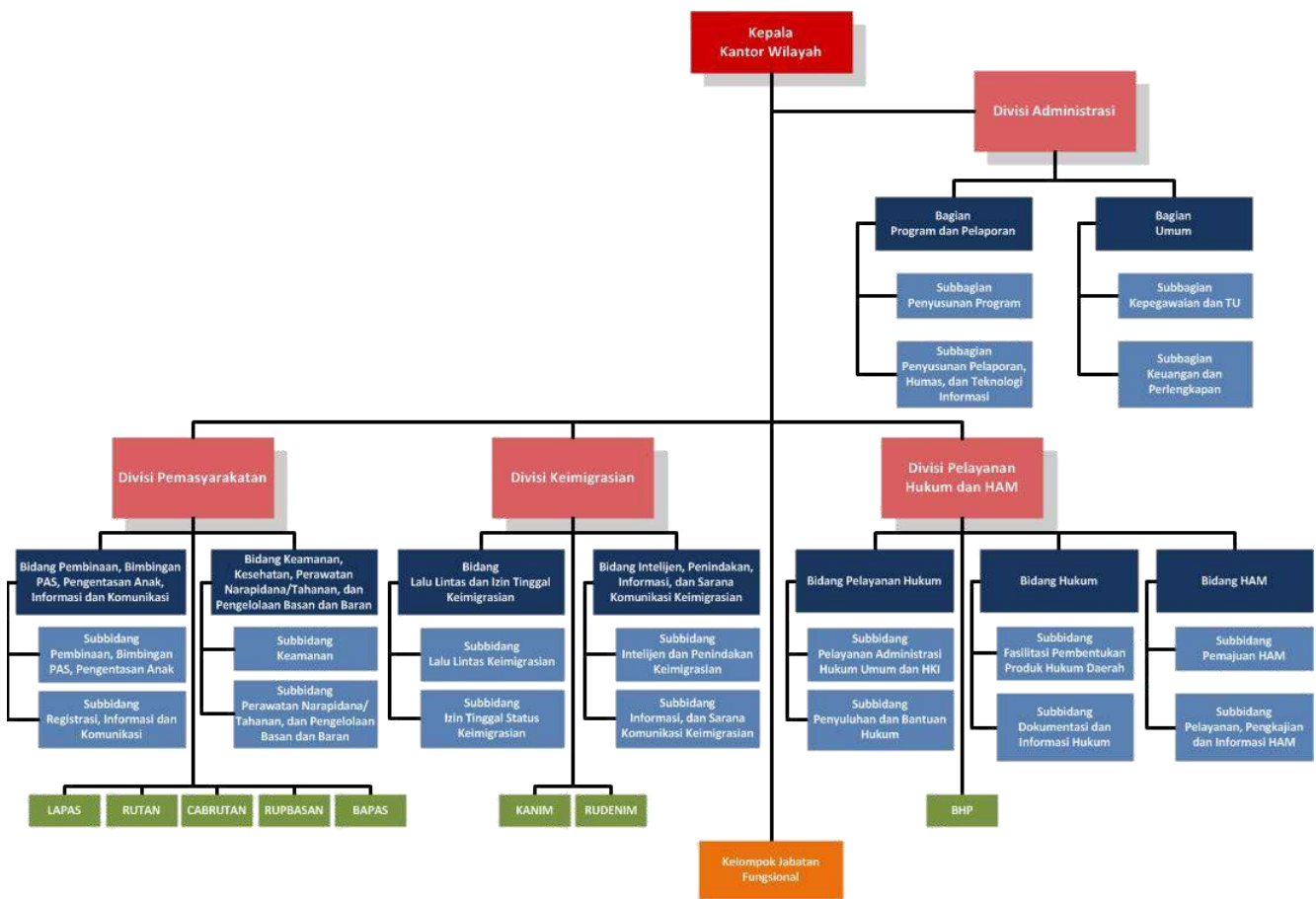
3) Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
 - i) Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - ii) Subbidang Informasi Keimigrasian
- b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - i) Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - ii) Subbidang Penindakan Keimigrasian

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pelayanan Hukum
 - i) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - ii) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- b) Bidang Hukum
 - i) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - ii) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- c) Bidang Hak Asasi Manusia
 - i) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - ii) Subbidang Pengkasian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Lampung

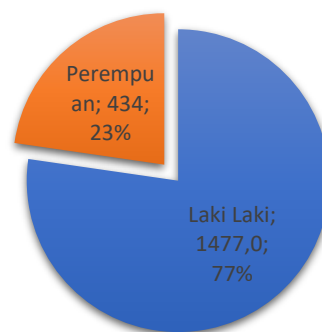
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang menjunjung tinggi profesionalisme dan berkompentensi tinggi. Dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, yang *belum terdapat Satuan Kerja Pemasarakatan maupun Imigrasi* adalah **Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat** (4 Kabupaten).

Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung *per-tanggal 02 bulan Januari tahun 2023* menunjukkan terdapat **1.911 Pegawai** yang tersebar di **27 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah**. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki **193 pegawai** yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

INFOGRAFIS PEGAWAI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Gender

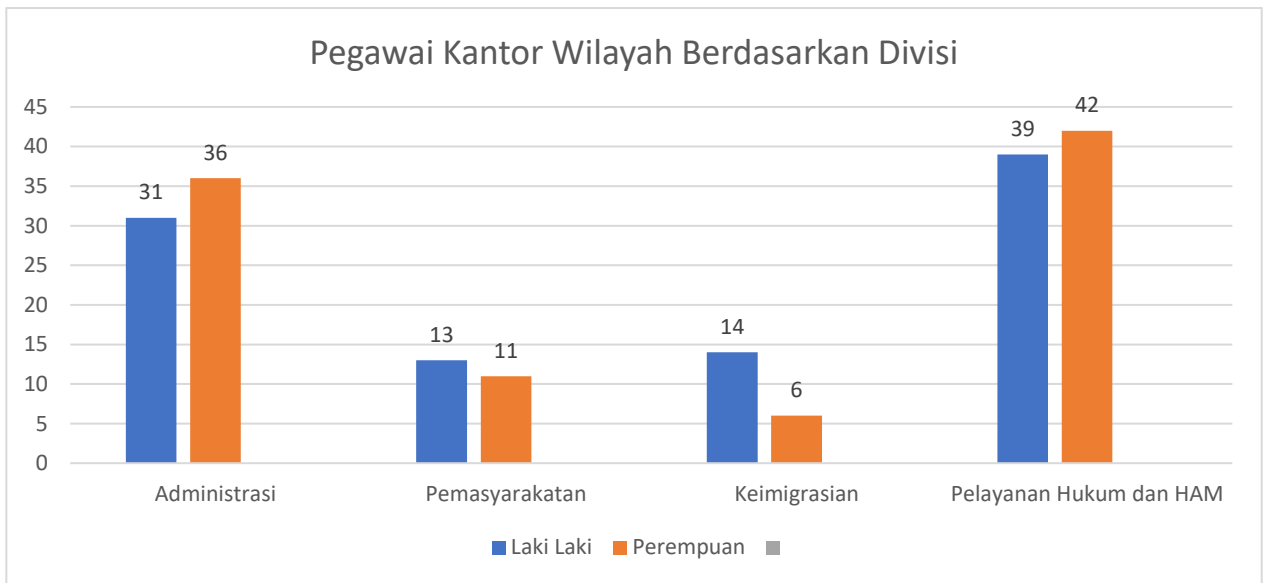
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.477	434	1.911



■ Laki Laki ■ Perempuan

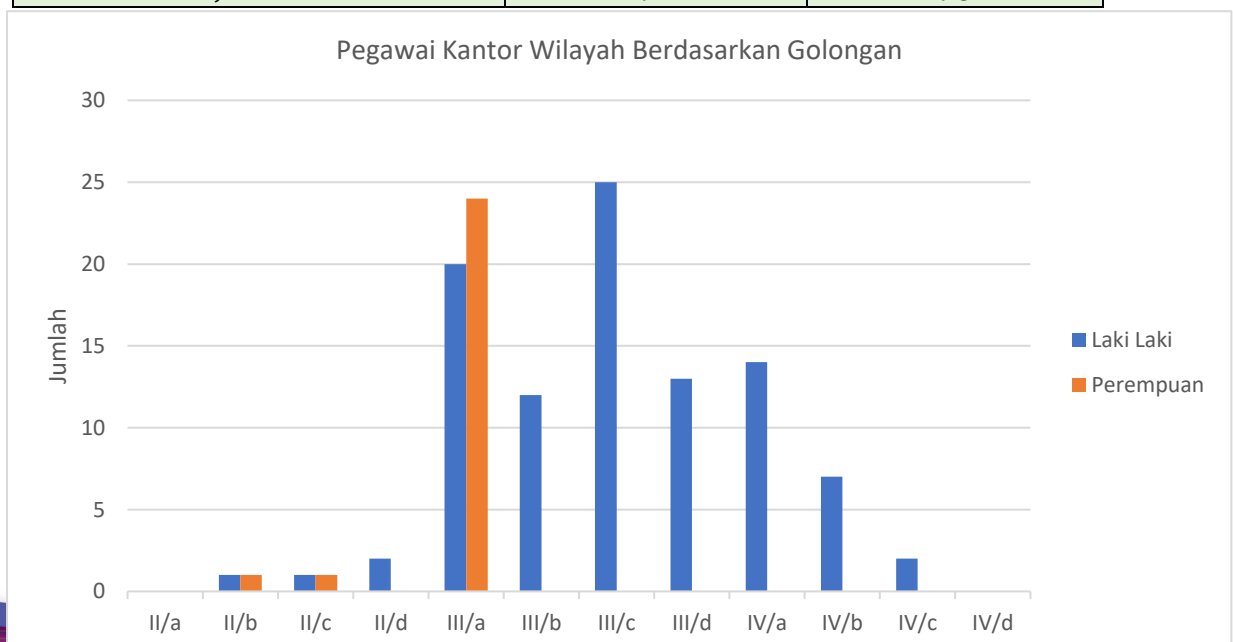
Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi

DIVISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Administrasi	31	36
Pemasyarakatan	13	11
Keimigrasian	14	6
Pelayanan Hukum dan HAM	39	42
Jumlah	97	96



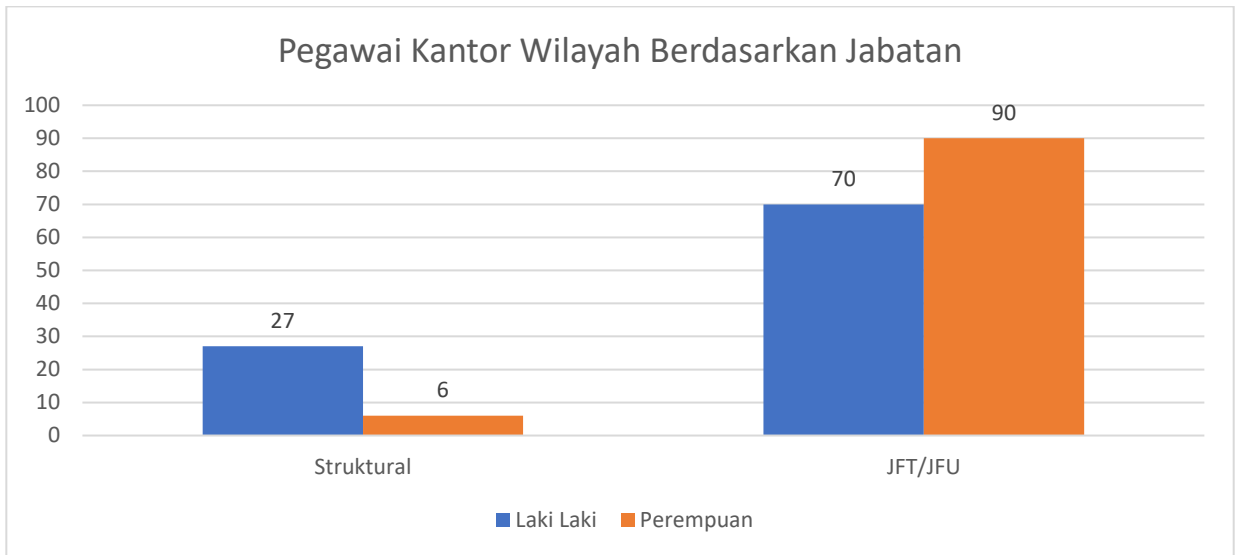
Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

Golongan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
II/a	0	0
II/b	1	1
II/c	1	1
II/d	2	0
III/a	20	24
III/b	12	14
III/c	25	36
III/d	13	9
IV/a	14	7
IV/b	7	2
IV/c	2	2
IV/d	0	0
Jumlah	97	96



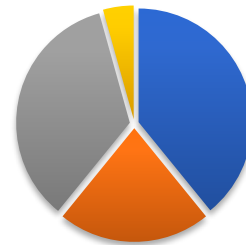
Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Struktural	33	27	6
JFT/JFU	160	70	90
Jumlah	193	97	96



Kantor Wilayah Lampung memiliki PPNPM yang bertugas pada Kantor Wilayah yaitu :

No	Tugas	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pramusaji	6	3
2	Driver	5	0
3	Security	8	0
4	Teknisi	1	0
Jumlah		20	3



■ Pramusaji ■ Driver ■ Security ■ Teknisi

Berikut data jumlah pegawai Jajaran Kantor Wilayah Lampung :

NO.	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	97	96	193
2.	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	147	37	184
3.	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	138	19	157
4.	LAPAS KELAS IIA METRO	85	20	105
5.	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	79	4	83
6.	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	56	5	61
7.	LAPAS KELAS IIB KOTAAGUNG	50	10	60
8.	RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	114	17	131
9.	RUTAN KELAS IIB MANGGALA	59	6	65
10.	RUTAN KELAS IIB KRUI	47	8	55
11.	RUTAN KELAS IIB SUKADANA	56	4	60
12.	BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	36	31	67
13.	BAPAS KELAS II METRO	35	17	52
14.	RUPBASAN KELAS II METRO	18	4	22
15.	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	22	10	32

NO.	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
16.	RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	14	1	15
17.	KANIM KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	38	28	66
18.	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	26	73	99
19.	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	51	6	57
20.	LAPAS KELAS IIB WAYKANAN	51	2	53
21.	KANIM KELAS III NON TPI KALIANDA	16	3	19
22.	KANIM KELAS III NON TPI KOTABUMI	23	5	28
23.	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	49	7	56
24.	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	70	8	78
25.	BAPAS KELAS II PRINGSEWU	18	5	23
26.	BAPAS KELAS II KOTABUMI	16	3	19
27.	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	66	5	71
	JUMLAH	1477	434	1911

Jabatan Fungsional Tertentu

Kantor Wilayah Lampung beserta Jajaran memiliki pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bertugas pada Kantor Wilayah dan Jajaran Kantor Wilayah Lampung sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	10
2	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	14
3	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	2
4	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	27
5	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	8
6	ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA	1
7	DOKTER PERTAMA	4
8	DOKTER MUDA	4
9	DOKTER MADYA	3
10	DOKTER GIGI MADYA	1
11	PERAWAT PERTAMA	6
12	PERAWAT MUDA	3
13	PUSTAKAWAN PERTAMA	1
14	PUSTAKAWAN MUDA	1
15	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	2
16	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	5
17	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	10
18	PENYULUH HUKUM PERTAMA	1

19	PENYULUH HUKUM MUDA	11
20	PENYULUH HUKUM MADYA	4
21	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	7
22	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	64
23	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA	28
24	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA	5
25	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	1
26	ANALIS HUKUM PERTAMA	6
27	ANALIS HUKUM MUDA	4
28	ANALIS ANGGARAN PERTAMA	1
29	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	10
30	PERAWAT PELAKSANA	7
31	PERAWAT PENYELIA	1
32	PERAWAT MAHIR	4
33	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	7
34	BIDAN PELAKSANA	1
35	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA / TERAMPIL	1
36	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN LANJUTAN / MAHIR	6
TOTAL		271

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi Target Kinerja dan Capaian Kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

4. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain melaksanakan pembinaan Pemasarakatan dan Keimigrasian diwilayah, juga berperan penting dalam perjalanan dan perkembangan produk hukum di daerah. Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek. Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, maka kegiatan inventarisasi produk hukum daerah menjadi penting sebagai dasar mengembangkan pengelolaan dan pelayanan *database* produk hukum daerah. Dengan tertatanya *database* diharapkan dapat meningkatkan peran Kantor Wilayah dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kendala saat ini adalah bagaimana pengelolaan dan pelayanan *database* peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor penghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan *database* peraturan perundang-undangan di daerah belum maksimal.

5. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung selama satu tahun periode tahun 2022, terdapat beberapa Isu Strategis / Permasalahan Organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	Solusi dan Tindak Lanjut
DIVISI ADMINISTRASI		
1	Koordinasi Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja & Anggaran serta Supervisi Pagu Indikatif terhalang karena pandemic Covid-19	Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting

2	Adanya penyebaran penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid - 19) mengakibatkan beberapa kegiatan yang ada di Divisi terkendala, sehingga penyerapan Anggaran pada semester I Tahun 2021 kurang maksimal	Pada Semester II, kegiatan yang belum dilaksanakan pada semester I akan segera dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Realokasi anggaran untuk kegiatan prioritas utama, misalnya refocussing anggaran untuk kegiatan penanggulangan dan pencegahan Covid-19
3	Pergantian operator baru pada Satker yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat	Menyampaikan kepada satker agar pengkaderan seluruh bidang pelaporan, administrasi Keuangan dan BMN tidak secara serta merta namun secara bertahap.
4	Jaringan data internet kantor wilayah yang kurang memadai, sehingga sangat menghambat kegiatan yang dilaksanakan secara virtual	Menambah jalur internet khusus kegiatan virtual dengan kecepatan bandwith yang memadai
5	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan : Overstaying tahanan pada rutan dan lapas - Basan Baran : basan baran pada Rupbasan se-Lampung terjadi kerusakan akibat faktor waktu dan lokasi penyimpanan dan telah terselesaikan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Rutan dan Rupbasan - Overstaying tahanan pada lapas dan rutan dan telah dilakukan MOU untuk penyelesaian terkait overstaying pada lapas dan rutan - Pada Semester II telah terselesaikan dengan baik terkait Overload Basan Baran dengan dilakukannya MOU dalam penyelesaian masalah overload basan baran tersebut - Seluruh Lapas dan Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait - Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban - Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan /anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security - Seluruh UPT telah melaksanakan validitas dan akurasi data keamanan pada fitur keamanan Aplikasi SDP - Lapas dan Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) : <ul style="list-style-type: none"> - 1. Kedisiplinan Petugas - 2. Pelaksanaan Tugas - Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U). - 3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan

		<ul style="list-style-type: none">- 4. Pelaksanaan Penjagaan.- 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling.- 6. Pelaksanaan Pengawasan.- 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/tahanan/ Anak Dalam Kamar Hunian.- 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya- 9. Layanan Registrasi dan Integrasi.- 10. Tertib Administasi dan keuangan
6	<p>Pengusulan Remisi Normal maupun Remisi Susulan secara online melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sudah berjalan dengan lancar, namun masih adanya kendala beberapa usulan yang disampaikan ada beberapa kekurangan kelengkapan berkas yang belum diupload atau yang tidak sesuai seperti petikan putusan pengadilan, surat keterangan <i>justice collaborator</i> (bagi pidana khusus), surat perintah penangkapan, sehingga harus memperbaiki dulu baru dapat diusulkan kembali.</p> <p>Terdapat juga keterlambatan eksekusi dan BA17 sehingga narapidana harus diusulkan remisi susulan setelah eksekusi dan BA17 terbit.</p> <p>Sama halnya dengan pengusulan Remisi, pengusulan asimilasi dan integrasi secara online melalui SDP pun sudah berjalan dengan lancar, namun masih ditemukan usulan yang belum lengkap dokumennya, dikarenakan memang belum lengkap dan ada juga terkendala dalam proses pengiriman data dan dokumen (konsolidasi)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Agar pengusulan remisi tidak terdapat kendala lagi, agar operator dan supervisor di Lapas, Rutan dan LPKA memperhatikan kelengkapan data, akurasi dan validasi pada saat upload dokumen sesuai dengan syarat-syarat dalam pengusulan remisi online sesuai dengan ketentuan- Agar operator dan supervisor di Lapas/Rutan/LPKA selalu mengecek dan mengontrol narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapat remisi tepat waktu, sehingga tidak ada lagi narapidana yang terlambat dalam memperoleh remisi. <p>Untuk kelancaran pengusulan asimilasi dan integrasi agar seluruh operator dan supervisor di UPT Pemasarakatan untuk memperhatikan kelengkapan data, akurasi dan validasi pada saat upload dokumen sesuai dengan syarat-syarat dalam pengusulan dan memastikan bahwa koneksi internet baik sehingga proses konsolidasi berjalan lancar.</p>
7	<p>Tidak adanya JFT yang menangani pengawasan notaris/ bidang Kenotariatan, padahal beban kerja pembinaan dan pengawasan notaris di Lampung sangat tinggi</p>	<p>Perlu adanya JFT di Bidang Kenotariatan/ Pengawasan Notaris yang ditempatkan di Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kanwil Kemenkumham</p>
8	<p>Belum adanya keseragaman pada setiap pemerintahan daerah terkait kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah</p>

9	Adanya Pandemi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang	Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / kota untuk melaksanakan kegiatan melalui media <i>Online / Zoom Meeting</i>
---	--	---

6. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung , latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung .

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



BAB II
**PERENCANAAN KINERJA
DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH LAMPUNG 2020-2024





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 - 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan
2. visi, misi, dan tujuan ;
3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH



DANAN PURNOMO

NIP. 19610513 198203 1 001



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama)
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
- e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan
- Di bidang pemasarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan,

perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*)
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*)
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan

keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan **untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima**, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan **untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan **untuk terlindunginya hak asasi manusia**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan **untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan, yang bertujuan **untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan **untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang**

kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

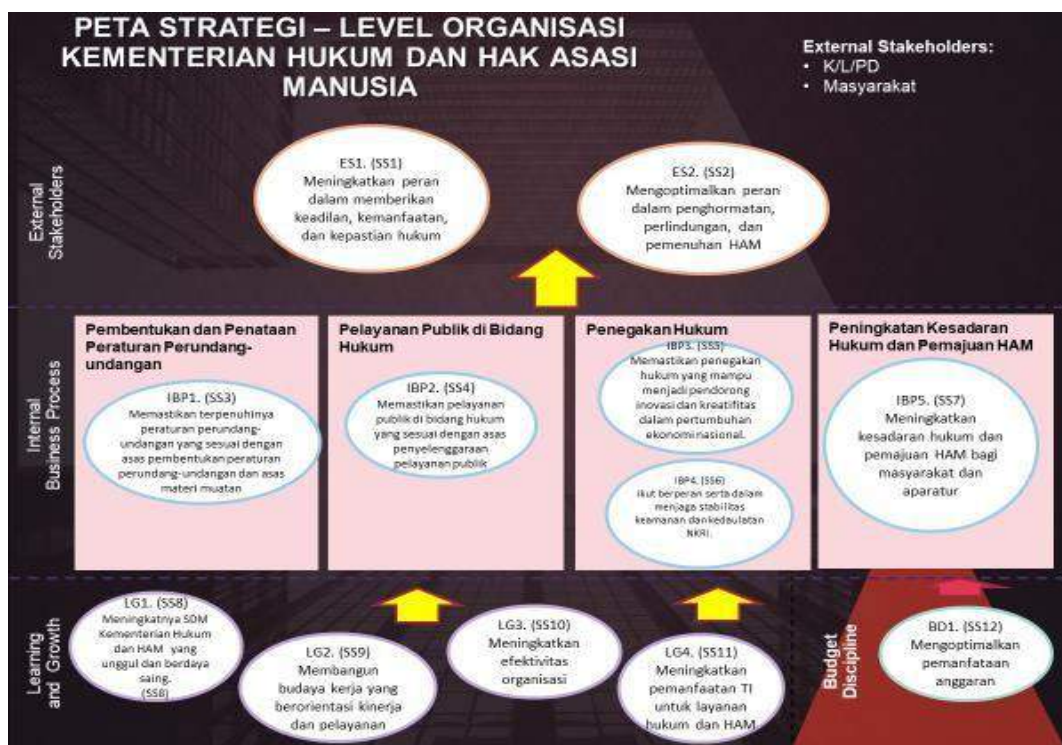
SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

SS 9 – Meningkatkan efektivitas organisasi

SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hokum dan HAM

Ss 11 – Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .



Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
				aparatur (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program pembentukan Peraturan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham • Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan • Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan • Persentase pemutakhiran data dan informasi

						<p>perancang peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhiya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat • Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anggota JDII yang berpartisipasi aktif • Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung • Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah • Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan,	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

, dan pemenuhan HAM					oleh masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM 	<ul style="list-style-type: none"> jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggara	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Meningkatnya efektivitas pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Persentase penyelesaian

aan pelayanan publik			berkepastian hukum		tugas MPW dan MPD	laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaraktan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatn	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengembangan Layanan Pemasarakatan mendukung SPPT-TI (Output PN) • Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SDP Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI • Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI • Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI • Indeks Efektivitas Kebijakan Pemasarakatan • Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pemasarakatan
					<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead) • Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kendaraan Bermotor • Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran • Jumlah Gedung/Bangunan • Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggarannya Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen

					Layanan Manajemen Satker	rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumaha tanggaan • Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan • Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemsarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemsarakatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kerjasama pemsarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain • Jumlah UPT Pemsarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Pemsarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin • Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar • Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar • Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemsarakatan • Menurunnya persentase

						<p>angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none">• Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang• Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang• Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan sesuai standar• Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar• Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas• Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal• Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani• Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan

						<p>kesehatan sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					<p>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai standar (Output PN)</p>	<p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>
					<p>Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)</p>	<p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika</p>
			<p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian • Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian • Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian • Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah • Indeks Kepuasan Internal di Wilayah • Indeks Pengamanan

						Keimigrasian di Wilayah
			Terlindungin ya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	<ul style="list-style-type: none"> Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindungin ya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah
	<ol style="list-style-type: none"> Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Pemasyrakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 		Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyrakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan	Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Penyelenggaraan Pemasyrakatan di Bidang Pelayanan Tahanan Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

	<p>4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p> <p>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>		klien Masyarakat			
				Indeks Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Basan Baran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengaduan yang diselesaikan Persentase pencegahan gangguan kamtib Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Nara pidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan

						kamtib secara tuntas
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Pengelolaan Program Bantuan Hukum di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi

				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
--	--	--	--	---	---------------------------------------	------------------------------------

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran
					<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar Persentase pengadaan

						<p>saranan dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja • Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks teknologi informasi dan komunikasi; • Tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SMART • Nilai IKPA 	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SMART • Nilai IKPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM • Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART). • Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

						Anggaran Kementerian di atas 93
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan Meningkatkan efektivitas organisasi Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi Indeks efektifitas organisasi Nilai SMART Nilai IKPA
2	Ditjen PP	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
3	Ditjen AHU	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasarakatan Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase menurunnya residivis; Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
5	Ditjen Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual Peningkatan permohonan kekayaan intelektual Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks maturitas SPIP Opini Audit External atas Laporan Keuangan Indeks Persepsi integritas
9	BPHN	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas peraturan perundang-undangan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan

10	Balitbang Hukum dan HAM	1. Meningkatkan efektivitas organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks efektifitas organisasi2. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia3. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya



B. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	85,0 90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 % 93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.175.145.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.175.145.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75,0


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80% 80% 80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	65% 98% 80% 80% 15% 28% 67% 30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	70% 60%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50% 60% 30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak di wilayah sesuai standar	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 949.080.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 949.080.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan


Reynhard Silitonga, S.H., M.Si.
NRP. 67090332

Jakarta, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	70,0% 40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	20% 50% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi


Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 222.573.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 222.573.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Pit. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.097.428.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.097.428.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.698.780.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 15.698.780.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum
NIP. 197105011993031001


Iwan Santoso, S.H., M.Si
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.416.092.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.416.092.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 142.187.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142.187.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.806.690.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.806.690.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	75 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.229.572.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.229.572.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terseleenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 218.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 218.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk *Laporan Kinerja*. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Tgl Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai

target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

Berikut Kami Sampaikan Capaian Kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :

a. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0	<i>Belum ada penilaian dari Menpan-RB</i>
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0	76,71

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %	76,71 (BB)
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	WTP

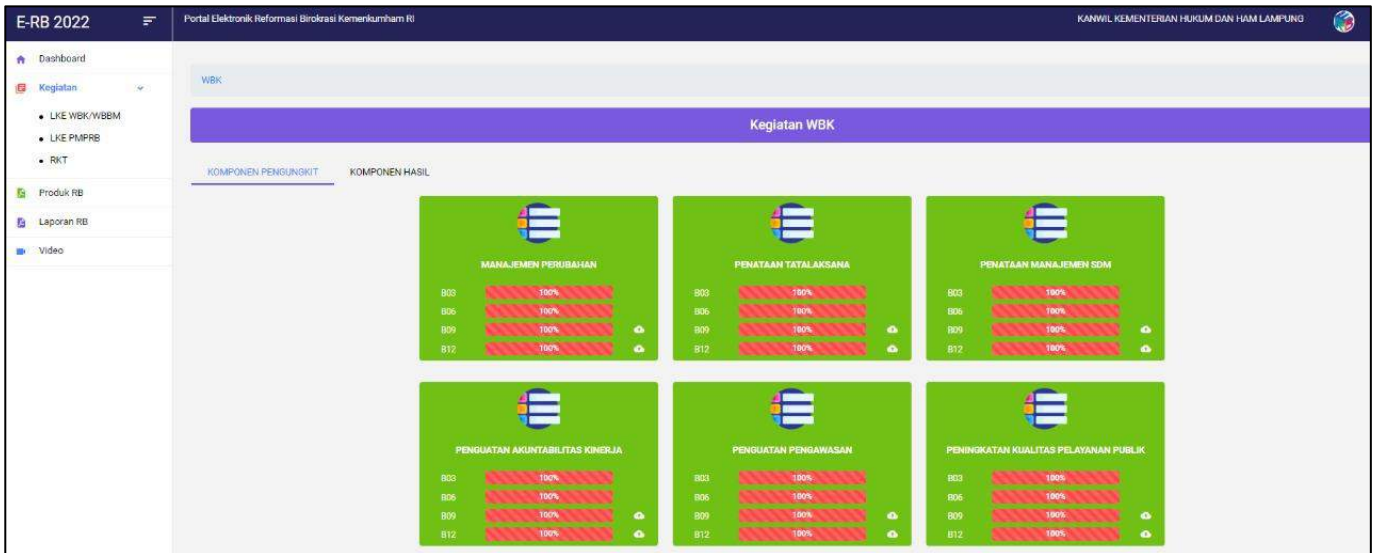
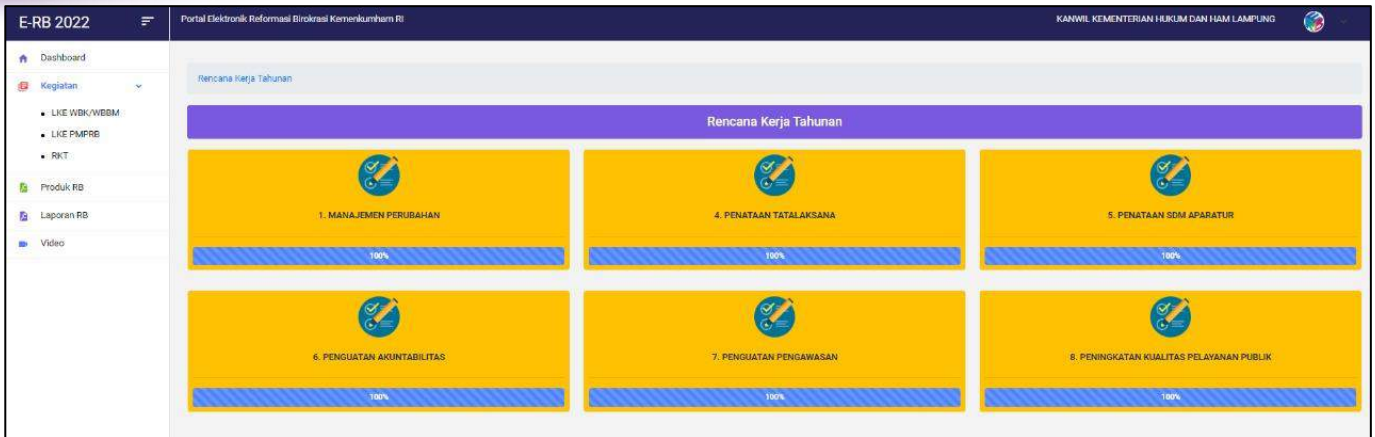
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,94

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.504.377.000,-	Rp. 23.302.556.164,- (99,14%)
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 23.504.377.000,-	Rp. 23.302.556.164,- (99,14%)



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE ESELON	KODE SAKTER	SAKTER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA					
				PAGU	REALISASI	SISA	%	(c) = (b): (a)	PAGU	REALISASI	SISA	%	(d) = (e): (d)	PAGU	REALISASI	SISA	%	(f) = (h): (g)
1		408824	DIVISI ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	99,77%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.302.556.164	23.302.556.164
			SUB TOTAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	99,77%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.302.556.164	23.302.556.164
2		408822	DIVISI PELAYANAN HUKUM															
		408822	DIVISI PELAYANAN HUKUM															
		408826	DIVISI KEMASRAKATAN															
		408827	DIVISI KEMASRAKATAN															
		408828	DIVISI KEMASRAKATAN															
		408829	DIVISI KEMASRAKATAN															
		408831	DIVISI KEMASRAKATAN															
			SUB TOTAL															
3		408823	DIVISI PEMASRAKATAN															
		406545	LEMBAGA PEMASRAKATAN B. LAMPUNG	10.357.291.000	10.354.670.579	2.620.421	99,97%	99,97%	11.600.931.000	11.532.995.691	67.935.309	99,41%	68.375.000	68.375.000		100,00%	22.026.597.000	21.956.041.270
		652962	LEMBAGA PEMASRAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8.373.081.000	8.369.375.062	3.705.938	99,96%	99,96%	9.981.821.000	9.964.487.423	17.333.577	99,83%				0,00%	18.334.902.000	18.333.862.485
		497764	LEMBAGA PEMASRAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.676.972.000	5.663.935.366	13.036.634	99,77%	99,77%	3.669.028.000	3.662.687.547	27.340.453	99,26%				0,00%	9.367.000.000	9.326.622.913
		406282	LEMBAGA PEMASRAKATAN METRO	5.792.362.000	5.780.325.308	12.036.692	99,79%	99,79%	6.699.858.000	6.646.237.336	53.620.664	99,20%				0,00%	12.497.220.000	12.426.562.644
		408536	LEMBAGA PEMASRAKATAN KALANDA	5.087.656.000	5.045.970.010	41.685.990	99,18%	99,18%	7.122.444.000	7.083.011.400	39.432.600	99,45%				99,93%	12.298.880.000	12.217.700.510
		408530	LEMBAGA PEMASRAKATAN KOTA AGUNG	3.812.281.000	3.770.455.701	41.825.299	98,90%	98,90%	4.251.295.000	4.084.613.462	166.681.538	96,08%				0,00%	8.063.576.000	7.855.069.163
		406551	LEMBAGA PEMASRAKATAN ANAK KOTABUMI	3.600.909.000	3.600.899.180	9.870	100,00%	100,00%	4.494.875.000	4.489.577.819	5.347.181	99,88%				0,00%	8.095.784.000	8.090.426.999
		497758	LEMBAGA PEMASRAKATAN WY KANAN	3.088.562.000	3.073.588.823	14.973.177	99,52%	99,52%	5.263.386.000	5.232.774.358	30.611.642	99,42%				98,80%	8.430.948.000	8.384.416.181
		683313	LEMBAGA PEMASRAKATAN GUNUNG SUGIH	3.931.825.000	3.917.836.810	13.988.190	99,64%	99,64%	6.932.230.000	6.902.759.824	29.470.176	99,77%				0,00%	10.864.055.000	10.820.596.634
		683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.688.917.000	4.670.717.435	18.199.565	99,67%	99,67%	3.522.199.000	3.517.112.809	5.086.191	99,86%				0,00%	8.211.116.000	8.187.830.244
		663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.535.054.000	7.533.417.275	1.636.725	99,98%	99,98%	10.944.902.000	10.940.819.709	4.082.291	99,96%				0,00%	18.479.956.000	18.474.236.984
		406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3.336.523.000	3.331.212.677	5.310.323	99,84%	99,84%	4.360.900.000	4.329.668.491	31.231.509	99,28%				0,00%	7.897.423.000	7.860.881.168
		406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.286.593.000	3.273.020.876	13.572.124	99,59%	99,59%	4.012.250.000	3.986.634.880	25.615.120	99,36%				0,00%	7.298.843.000	7.259.655.756
		406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.087.271.000	3.084.958.622	2.312.378	99,93%	99,93%	2.409.119.000	2.357.358.000	51.761.000	97,85%				0,00%	5.496.390.000	5.442.316.622
		497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.569.661.000	3.560.414.812	9.246.188	99,74%	99,74%	3.572.843.000	3.469.420.759	103.422.741	97,11%				0,00%	7.142.504.000	7.029.835.071
		683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.603.972.000	2.590.451.063	13.520.937	99,48%	99,48%	3.599.385.000	3.261.154.842	338.230.158	90,60%				0,00%	6.203.357.000	5.851.605.905
		109137	BALAI PEMASRAKATAN B. LAMPUNG	4.899.020.000	4.866.527.536	32.492.464	99,34%	99,34%	1.628.736.000	1.627.952.792	783.208	99,95%				0,00%	6.532.456.000	6.499.180.328
		653129	BALAI PEMASRAKATAN METRO	3.353.421.000	3.353.202.852	4.218.148	99,87%	99,87%	1.294.721.000	1.270.049.770	24.671.230	98,09%				100,00%	4.740.142.000	4.711.252.622
		632015	BALAI PEMASRAKATAN KELAS II KOTABUMI	884.419.000	855.554.405	28.864.595	96,78%	96,78%	1.441.729.000	1.236.973.352	204.755.648	85,80%				99,23%	2.390.748.000	2.156.627.757
		632017	BALAI PEMASRAKATAN KELAS I PRINGSEWU	915.524.000	910.355.816	5.168.184	99,44%	99,44%	1.095.695.000	1.081.265.832	14.429.168	98,68%				99,90%	2.161.219.000	2.141.471.648
		632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGERA LAMPUNG	2.330.203.000	2.179.504.662	150.698.338	93,53%	93,53%	625.940.000	614.800.000	11.140.000	98,22%				99,61%	3.056.143.000	2.893.909.662
		653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGERA METRO	1.420.322.000	1.392.795.780	27.526.220	98,06%	98,06%	599.747.000	478.445.000	121.302.000	79,77%				0,00%	2.020.069.000	1.871.240.780
		653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGERA KOTABUMI	952.301.000	951.064.112	1.236.888	99,87%	99,87%	643.925.000	633.720.630	10.204.370	98,42%				100,00%	1.604.226.000	1.592.784.742
			SUB TOTAL	92.588.140.000	92.130.254.762	457.885.238	99,51%	99,51%	100.565.873.000	99.170.413.541	1.395.459.459	98,61%				99,68%	193.805.468.000	191.950.070.303
4		408825	DIVISI KEIMIGRASIAN															
		408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.534.546.000	4.508.386.960	26.159.040	99,42%	99,42%	5.981.650.000	5.882.938.489	98.711.511	98,35%				0,00%	940.011.000	892.644.322
		109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALANDA	1.308.723.000	1.300.597.626	8.125.374	99,38%	99,38%	2.973.980.000	2.950.483.053	423.496.947	85,76%				99,56%	4.394.203.000	4.362.091.779
		683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.363.436.000	1.356.096.406	7.339.504	99,46%	99,46%	3.200.592.000	3.114.798.352	85.793.648	97,32%				100,00%	4.663.135.000	4.570.001.848
			SUB TOTAL	7.206.705.000	7.165.081.082	41.623.918	99,42%	99,42%	13.096.233.000	12.440.864.216	655.368.784	95,00%				99,85%	21.465.215.000	20.766.502.398
			TOTAL KESELURUHAN	112.986.778.000	112.339.031.281	647.746.719	99,43%	99,43%	125.964.407.000	123.662.318.504	2.302.088.496	98,17%				99,82%	245.370.923.000	242.409.773.794



No	Divisi	Hasil Rata – Rata Penilaian Target Kinerja Tahun 2022											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1.	Kepala Divisi Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	100%	100%	100%	98,15%	99,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%	100%	100%	100%	100%	99,54%	99,54%	100%
4.	Kepala Divisi Imigrasi	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan
Jakarta Selatan 12940, Po Box. 3489, Telp/Fax. 021-5252975
Laman: www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.PW.03.01.VI-29 01 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Informasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
di-
Bandar Lampung

Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.KP.04.01.5-45 tanggal 9 Mei 2022, tim telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 yang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, mulai tanggal 11 Mei s.d. 23 Mei 2022 dengan uraian hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor: ITJ.7.PW.03.01-54/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan dan penertiban sebagai berikut:

- A. Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mendapat capaian nilai adalah sebesar **76,71 (Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Satu)** atau kategori **BB (Sangat Baik)**, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Adapun rincian hasil penilaian, adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I.	Perencanaan Kinerja	30	22,50
II	Pengukuran Kinerja	30	23,40
III	Pelaporan Kinerja	15	10,80
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		100	76,71



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG



Hasil Survei Kualitas Pelayanan

PERIODE DESEMBER 2022

IKM
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

17.26
(3.94 / 98.62)
SANGAT BAIK

IPK
Indeks
Persepsi
Korupsi

17.25
(3.94 / 98.57)
SANGAT BAIK

[f](#) [v](#) [t](#) [i](#) kumhamlampung

IKM
Indeks Kepuasan
Masyarakat

17.26
(3.94 / 98.62)
SANGAT BAIK

Hasil Survei Kualitas Pelayanan

PERIODE DESEMBER 2022

IPK
Indeks Persepsi
Korupsi

17.25
(3.94 / 98.57)
SANGAT BAIK

b. Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	3,2	3,79
		2. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	80,83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53	86,81
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90	94,89
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	50	61,95
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68	83,33
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70	69,81
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70	70,11
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	98%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	87%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%	81%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	98,84%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98,97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	95,97%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	50,95%

				(masih rendahnya kepercayaan lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan khusus ke narapidana)
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	96,82%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	47,09%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	93,41%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	0
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	91,92%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	71%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	79,88%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	52,49% (Sering terkendala dengan pihak korban yang tidak puas jika pelaku tidak mendapatkan putusan pidana)
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	67,50%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100,00%
	Anak di wilayah sesuai standar	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100,00%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100,00%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100,00%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	96%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	91%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%

7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	96%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	91%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%

A. Laporan Anggaran Divisi Pemasyarakatan

Kegiatan	Anggaran	Anggaran Yang Tidak Dibintang	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 949,080,000,-	Rp. 776,914,000,-	Rp767.336.460
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 949,080,000,-	Rp. 776,914,000,-	Rp767.336.460
Koordinasi dilkumjakpol	Rp. 79,575,000,-	Rp. 62,200,000,-	Rp62.080.000
Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan	Rp.134,770,000,-	Rp. 73,464,000,-	Rp73.463.300
Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 50,500,000,-	Rp. 67.900.000,-	Rp67.263.436
Pameran Hasil Karya Narapidana	Rp. 72,145,000,-	Rp. 63,906,000,-	Rp63.445.000
Monitoring dan Evaluasi	Rp. 137,400,000,-	Rp. 137,400,000,-	Rp134.506.170
Sosialisai Teknis Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 198,330,000,-	Rp. 149,025,000,-	Rp144.784.800
Layanan Kerjasama, Perizinan, Pengaduan dan Informasi	Rp. 41,710,000,-	Rp. 40,675,000,-	Rp40.610.607
Pengendalian UPT Pemasyarakatan	Rp. 112,650,000,-	Rp108.744.000,-	Rp107.603.250
Pemindahan WBP	Rp. 80,000,000,-	Rp50.000.000,-	Rp49.979.897
Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	Rp. 42.000.000,-	Rp. 23,600,000,-	Rp23.600.000

Lampiran Perhitungan Indikator Perjanjian Kinerja

1. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan

VARIAB.	Numerator (Pembayar)	Denominator (Pembagi)	Data Numer. Penyakit	Data Denom. Pembagi	Nilai Indikator %
Kebiasaan Merokok	Jumlah Napi dan Tahanan yang Merokok	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	5082	7061	86,65
Kebiasaan Guci Tangan	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menerapkan Perilaku Cuci Tangan yang Bersih	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	5747	6781	84,63
Buang Air Besar di Jamban	Jumlah Napi dan Tahanan yang BAB di Jamban	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	6681	6681	100,00
Aktivitas Cukup	Jumlah Napi dan Tahanan yang Melakukan Aktivitas Fisik Cukup	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	3497	4261	82,28
Menggosok Gigi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Biasa Menggosok Gigi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	5953	6681	88,85
Pemenuhan Gizi dan Penyelenggaraan Makanan	Jumlah Napi yang Status Gizinya Terjaga	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	6128	6706	91,35
Akses Sanitasi	Jumlah UPT yang Memiliki Sanitasi Baik	Jumlah UPT yang Menjadi Responden	16	16	100,00
Akses Air Bersih	Jumlah UPT yang Memiliki Akses Air Bersih	Jumlah UPT yang Menjadi Responden	16	16	100,00
SDM	Jumlah UPT yang memiliki dokter	Jumlah UPT Lapis Ratus	4	16	25,00
Skrining	Jumlah Napi dan Tahanan yang diskrining	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	10834	10993	98,91
Legalitas Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki klinik berijin	Jumlah UPT Lapis Ratus	3	16	18,75
Perawatan Rujukan	Jumlah Napi dan Tahanan yang dirujuk ke rumah sakit	Jumlah Napi dan Tahanan yang sakit	277	6430	4,30
Sakit Gigi dan Mulut	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Masalah Dengan Gigi dan Mulut Setahun Terakhir	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	1306	7836	18,25
Cidera	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Cidera	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	116	7836	1,62
Sakit HIV/AIDS	Jumlah Napi dan Tahanan yang mengalami HIV/AIDS	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	23	7836	0,32
Sakit TB	Jumlah Napi dan Tahanan yang mengalami TB	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	42	7836	0,59
Kematian	Jumlah Napi dan Tahanan yang meninggal dunia	Jumlah Napi dan Tahanan	28	7836	0,39
Sakit Obesitas Sentral	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Obesitas Sentral	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	231	6933	3,33
Sakit Hipertensi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis Hipertensi	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	195	7836	2,72
Sakit DM	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis DM	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	49	7836	0,68
Sakit Jantung	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis Penyakit Jantung	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	22	7836	0,31
Sakit Gangguan Mental	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis Gangguan Mental	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	8	7836	0,11
Sakit COVID-19	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis Covid-19	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	21	7836	0,29
Sakit Paru-paru Kronis	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didagnosis Penyakit Paru-Paru Kronis	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan	152	7836	2,12
Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba	Jumlah Napi dan Tahanan yang Tidak relapse Setelah 6 Bulan Menjalani Program Rehab	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden	6663	6881	99,65

Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	proporsi bobot	Sub Indeks **	Total Sub Indeks **	IPKM ***
			Minimal	Maksimal			f/jml indikator			
			[a]	[b]	[c]		[d]			
1. Promotif dan Preventif										
Kebiasaan Merokok	86,05	86,05	20,00	100,00	0,83	5,00	0,12	0,10	0,4807	80,83
Kebiasaan Cuci Tangan	84,63	84,63	50,00	100,00	0,69	3,00	0,07	0,05		
Buang Air Besar di Jamban	100,00	100,00	50,00	100,00	1,00	1,00	0,02	0,02		
Aktivitas Cukup	82,28	82,28	40,00	100,00	0,70	3,00	0,07	0,05		
Menggosok Gigi	88,88	88,88	50,00	100,00	0,78	3,00	0,07	0,06		
Pemenuhan Gizi dan Penyelenggaraan Makanan	91,35	91,35	80,00	100,00	0,57	5,00	0,12	0,07		
Akses Sanitasi	100,00	100,00	50,00	100,00	1,00	5,00	0,12	0,12		
Akses Air Bersih	100,00	100,00	30,00	100,00	1,00	5,00	0,12	0,12		
SDM	25,00	25,00	80,00	100,00	(2,75)	3,00	0,07	-0,20		
Skruing	98,91	98,91	55,92	100,00	0,98	4,00	0,10	0,09		
Legalitas Fasilitas Layanan Kesehatan	18,75	18,75	18,00	100,00	0,01	5,00	0,12	0,00		
2. Kuratif										
Perawatan Rujukan	4,30	95,70	3,00	100,00	0,96	3,00	0,17	0,16	0,9573	80,83
Sakit Gigi dan Mulut	18,25	81,75	0,00	100,00	0,82	3,00	0,17	0,14		
Cidera	1,62	98,38	0,00	100,00	0,98	3,00	0,17	0,16		
Sakit HIV/AIDS	0,32	99,68	0,00	100,00	1,00	3,00	0,17	0,17		
Sakit TB	0,59	99,41	0,00	100,00	0,99	3,00	0,17	0,17		
Kematian	0,39	99,61	0,00	100,00	1,00	3,00	0,17	0,17		
3. Rehabilitatif										
Sakit Obesitas Sentral	3,33	96,67	0,00	100,00	0,97	3,00	0,12	0,12	0,9868	80,83
Sakit Hypertensi	2,72	97,28	0,00	100,00	0,97	3,00	0,12	0,12		
Sakit DM	0,68	99,32	0,00	100,00	0,99	3,00	0,12	0,12		
Sakit Jantung	0,31	99,69	0,00	100,00	1,00	3,00	0,12	0,12		
Sakit Gangguan Mental	0,11	99,89	0,00	100,00	1,00	3,00	0,12	0,12		
Sakit COVID-19	0,29	99,71	0,00	100,00	1,00	3,00	0,12	0,12		
Sakit Paru-paru Kronis	2,12	97,88	0,00	100,00	0,98	3,00	0,12	0,12		
Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba	99,46	99,46	50,00	100,00	0,99	4,00	0,16	0,16		

2. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	NUMERATOR (PEMBILANG)	DENUMERATOR (PEMBAGI)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %	METODE PENGUMPULAN DATA
Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kepribadian	% Napi Risti Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah Napi Risti Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah Nap. Risti (Dilapas Maksimum Dan Super Maksimum) Yang Mendapatkan Program Pembinaan Kepribadian	426	440	96,82	Observasi Harian dengan Pengamatan langsung, wawancara, CCTV, dan Dokumentasi Program
		% Napi Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	Jumlah Napi Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	Jumlah Napi Yang Mendapatkan Pembinaan	3652	3695	98,84	Observasi Harian dengan Pengamatan langsung, wawancara, CCTV, dan Dokumentasi Program
Pembinaan Kemandirian	Latihan Keterampilan	% Napi Yang Terampil dan Bersertifikat	Jumlah Narapidana Yang Terampil dan Bersertifikat	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Pelatihan	945	2007	47,09	Laporan Bulanan dari WA grup, email, dan sisumaker Sub Direktorat Latihan Keterampilan
	Kegiatan Kerja	% Napi Yang Bekerja dan Produktif	Jumlah Napi Yang Bekerja dan Produktif	Jumlah Nap. Asimilasi	1134	1214	93,41	Laporan Bulanan Kegiatan Kerja dan Sistem Database Pemasarakatan

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator	Bobot	Proporsi Bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	
			Minimal	Maksimal							
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			(g)
1. Pembinaan Kepribadian											
% Napi Risti Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	96,82	96,82	0,00	100,00	0,97	5,00	0,63	0,61	0,98	86,81	
% Napi Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	98,84	98,84	0,00	100,00	0,99	3,00	0,38	0,37			
2. Pembinaan Kemandirian											
% Napi Yang Terampil Dan Memperoleh Sertifikat	47,09	47,09	0,00	100,00	0,47	3,00	0,38	0,18	0,76		
% Napi Yang Bekerja dan Produktif	93,41	93,41	0,00	100,00	0,93	5,00	0,63	0,58			

3. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

VARIABEL	Numerator (Penyebut)	Denominator (Pembagi)	Data Numer Penyebut	Data Denum Pembagi	Kinerja %
% Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Narapidana	144	4707	3,06
% Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi	13	1583	0,82
% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi	1795	2027	88,55

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator	Bobot	Proporsi Bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks
			Minimal	Maksimal						
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
% Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	3,06	96,94	0,00	100,00	0,969	1,00	0,33	0,32	0,95	94,69
% Pencabutan Hak Asimilasi	0,82	99,18	0,00	100,00	0,992	1,00	0,33	0,33		
% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	88,55	88,55	0,00	100,00	0,886	1,00	0,33	0,30		

4. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat

VARIABEL	INDIKATOR	NUMERATOR (PEMBILANG)	DENUMERATOR (PEMBAGI)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %
Assesment Klarifikasi	% Klien Masyarakat yang Memiliki Rencana/kontrak Program Pembimbingan Untuk Menjalankan Kehidupan Selanjutnya	Klien Masyarakat yang memiliki case plan untuk menjalankan kehidupan selama masa bimbingan	Jumlah Klien Masyarakat	2762	3970	69,57
Manfaat Litmas	% Klien Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Litmas Sebagai Acuan Pertimbangan Bagi Hakim Sebelum Menjatuhkan Hukuman Khusus Peradilan Anak; Penempatan Tahanan, Narapidana Dan Anak; Jenis Program Pembinaan Bagi Narapidana Dan Anak; Penilaian Terkait Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak (Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi)	Jumlah Klien Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Dari Litmas	Jumlah Klien Masyarakat	3970	3970	100,00
Dewasa	% Keberhasilan Diveri Tipping	Jumlah Klien Dewasa yang Berhasil Diveri	Jumlah Klien Dewasa yang didampingi	0	915	0,00
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	% Anak yang Berhasil Mendapatkan Diveri	Jumlah Anak yang mendapatkan Diveri	Jumlah Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang memenuhi syarat Diveri	117	127	92,13
	% Anak yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Pantai Sosial Dan Pidana Bersyarat	Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Pantai Sosial Dan Pidana Bersyarat	Jumlah Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Tidak Memenuhi Syarat Diveri	81	373	21,72
Bimbingan Kepribadian (Promosi)	% Klien Masyarakat yang Diterima Masyarakat	Jumlah Klien Masyarakat yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	Jumlah Klien Masyarakat yang Memenuhi Syarat Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	3473	7460	46,58
Bimbingan Kemandirian (Promosi)	% Klien Masyarakat yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)	Jumlah Klien Masyarakat yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)	Jumlah Klien Masyarakat	2534	3808	66,54
Pengawasan	% Klien Masyarakat yang menjalankan program pembimbingan tanpa melakukan pelanggaran	Klien Masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran dalam kurun waktu tertentu	Jumlah Klien masyarakat yang mengikuti program pembimbingan dalam kurun waktu tertentu	3769	3808	98,98
Pencabutan dan Pengembalian	% Pencabutan Program Integrasi Klien	Jumlah Klien yang Dicabut Hak Integrasinya	Jumlah Klien yang melakukan pelanggaran Program Reintegrasi Sosial	33	33	100,00

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi Bobot f/Jumlah Bobot	Nilai Indeks Indikator (exg)	Nilai Dimensi	Nilai Indeks
			Minimal	Maksimal						
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]
1. Penelitian Masyarakat (Litmas)										
% Klien Masyarakat yang Memiliki Rencana/kontrak Program Pembimbingan Untuk Menjalankan Kehidupan Selanjutnya	69,57	69,57	0,00	100,00	0,70	4,00	0,50	0,35	0,85	
% Klien Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Litmas Sebagai Acuan Pertimbangan Bagi Hakim Sebelum Menjatuhkan Hukuman Khusus Peradilan Anak; Penempatan Tahanan, Narapidana Dan Anak; Jenis Program Pembinaan Bagi Narapidana Dan Anak; Penilaian Terkait Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak (Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi)	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	4,00	0,50	0,50		
2. Pendampingan										
% Keberhasilan Diveri Tipping	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	0,36	0,00	0,39	
% Anak yang Berhasil Mendapatkan Diveri	92,13	92,13	0,00	100,00	0,92	5,00	0,36	0,33		
% Anak yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Pantai Sosial Dan Pidana Bersyarat	21,72	21,72	0,00	100,00	0,22	4,00	0,29	0,06		
3. Pembimbingan (Promosi dan Release Service)										
% Klien Masyarakat yang Diterima Masyarakat	46,58	46,58	0,00	100,00	0,47	4,00	0,22	0,10	0,79	
% Klien Masyarakat yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)	66,54	66,54	0,00	100,00	0,67	5,00	0,28	0,18		
% Klien Masyarakat yang menjalankan program pembimbingan tanpa melakukan pelanggaran	98,98	98,98	0,00	100,00	0,99	5,00	0,28	0,27		
% Pencabutan Program Integrasi Klien	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	4,00	0,22	0,22		

5. Indeks Pembinaan Khusus Anak

VARIABEL	INDIKATOR	NUMERATOR (PEMBILANG)	DENUMERATOR (PEMBAGI)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %
Kerohanian dan jasmani, Kesadaran berbangsa dan bernegara, dan Kesadaran Hukum	% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	Jumlah Anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin)	Jumlah Anak Binaan	114	114	100,00
Kemampuan intelektual pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.	% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,	Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal	Jumlah Anak Binaan	0	114	0,00
Pendidikan informal	% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	Jumlah Anak binaan yang terampil	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan informal	0	0	100,00
Remisi	% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Anak	0	114	0,00
Asimilasi	% Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi	0	43	0,00
Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Anak yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi	58	58	100,00

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi Bobot f/Jumlah Indikator	Nilai Indeks Indikator (exg)	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	
			Minimal	Maksimal							
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]			[g]
1. PEMBINAAN KEPERIBADIAN											
% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	100,00	100,00	0	100	1,00	5	0,50	0,50	0,50	83,33	
% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,	0,00	0,00	0	100	0,00	5	0,50	0,00			
2. PEMBINAAN KEMANDIRIAN											
% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	100,00	100,00	0	100	1,00	5	1,00	1,00	1,00		
3. PEMENUHAN HAK BERSYARAT											
% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	0,00	100,00	0	100	1,00	5	0,33	0,33	1,00		
% Pencabutan Hak Asimilasi	0,00	100,00	0	100	1,00	5	0,33	0,33			
% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	100,00	100,00	0	100	1,00	5	0,33	0,33			

6. Indeks Pengelolaan Basan Baran

VARIABEL	INDIKATOR	Numerator (Penyebut)	Denominator (Pembagi)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %
Registrasi Basan Diluar Rupbasan	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	Jumlah Basan yang teradministrasi pada wilayah kerja	Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja	269	269	100,00
Registrasi Basan Didalam Rupbasan	% Pengeluaran Basan Baran (Overload)	Jumlah Basan yang dikeluarkan	Jumlah Basan yang berkecukupan hukum	161	221	70,93
Penilaian dan Klasifikasi	% Rekomendasi / Rencana Program Pengelolaan Basan	Jumlah Rekomendasi Program Pengelolaan Basan (Penilaian dan Klasifikasi Basan)	Jumlah Basan Terregistrasi	274	274	100,00
Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)	Jumlah Basan Baran Hilang/Rusak/ Ditukar	Jumlah basan Baran	52	274	18,98
Pemeliharaan	Rekomendasi Lelang basan Mudah Rusak dan menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi	Jumlah Basan Rekomendasi lelang	Jumlah basan baran yang berdampak mengalami Depresiasi Nilai dan Kerusakan	96	96	100,00
	%Pemusnahan Basan Berbahaya	Jumlah Pemusnahan Basan Berbahaya	Jumlah Basan Berbahaya	7	56	12,50
penyelamatan	% Penyelamatan basan baran dalam Kondisi Darurat	Jumlah Penyelamatan Basan Baran	Jumlah Basan Baran registrasi	49	274	17,88

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi Bobot f/Jumlah Indikator	Nilai Indeks Indikator (exg)	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	
			Minimal	Maksimal							
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]			[g]
1. Administrasi Basan Baran											
% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	5,00	0,38	0,38	0,89	69,81	
% Pengeluaran Basan Baran (Overload)	70,93	70,93	0,00	100,00	0,71	5,00	0,38	0,27			
% Rekomendasi / Rencana Program Pengelolaan Basan	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	3,00	0,23	0,23			
2. Pengelolaan Basan Baran											
% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)	18,98	81,02	0,00	100,00	0,81	4,00	0,24	0,19	0,51		
Rekomendasi Lelang basan Mudah Rusak dan menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	4,00	0,24	0,24			
%Pemusnahan Basan Berbahaya	12,50	12,50	0,00	100,00	0,13	4,00	0,24	0,03			
% Penyelamatan basan baran dalam Kondisi Darurat	17,88	17,88	0,00	100,00	0,18	5,00	0,29	0,05			

7. Indeks Pelayanan Tahanan

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	NUMERATOR (PENYEBUT)	DENUMERATOR (PEMBAGI)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %
Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (Overstay)	Jumlah Tahanan Overstay yang dikeluarkan karena telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya	Jumlah Tahanan Overstay (habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya)	2	15	13,33
	Assesment dan Klasifikasi	% Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang Berhasil	Jumlah Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang diselesaikan	Jumlah Rencana Program Perawatan Tahanan	822	1223	67,27
Perawatan Tahanan	Pendidikan dan Pengajaran (Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan	805	2655	29,87
		% Tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum litigasi/non litigasi (Pelayanan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Miskin)	Jumlah Tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum litigasi/non litigasi	Jumlah Tahanan	2461	2655	91,32
	Bimbingan Rohani dan Jasmani	% Tahanan yang diprogramkan mengikuti perawatan fisik dan mental	Jumlah Tahanan yang mengikuti perawatan fisik dan mental	Jumlah Tahanan	2695	2695	100,00
	Bimbingan Minat dan Bakat	% Tahanan yang diprogramkan mengikuti kegiatan keterampilan	Jumlah Tahanan yang diprogramkan mengikuti Bimbingan Keterampilan	Jumlah Tahanan	2235	2695	82,93

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyeferaan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi Bobot f/Jumlah Indikator	Nilai Indeks Indikator (exg)	Nilai Dimensi i	Nilai Indeks j
			Minimal	Maksimal						
			[a]	[b]						
1. Administrasi Tahanan										
% Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (Overstay)	13,33	13,33	0,00	100,00	0,13	1	0,17	0,02	0,58	70,11
% Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang Berhasil	67,27	67,27	0,00	100,00	0,67	5	0,83	0,56		
2. Pelayanan Tahanan										
% Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	29,87	29,87	0,00	100,00	0,30	2	0,15	0,05		
% Tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum litigasi/non litigasi (Pelayanan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Miskin)	91,32	91,32	0,00	100,00	0,91	5	0,38	0,35		
% Tahanan yang diprogramkan mengikuti perawatan fisik dan mental	100,00	100,00	0,00	100,00	1,00	3	0,23	0,23		
% Tahanan yang diprogramkan mengikuti Bimbingan Keterampilan	82,93	82,93	0,00	100,00	0,83	3	0,23	0,19		

8. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

Indikator	Numerator (Penyebut)	Denominator (Pembagi)	DATA NUMERATOR	DATA DENUMERATOR	KINERJA %
%Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)	Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Alam	Jumlah UPT Pemasarakatan	11	16	68,75
% Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan Hak WBP	Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan hak	Jumlah Pengaduan	26	26	100,00
Kebebasan Politik WBP	Jumlah Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah pemilihan yang terdapat kejadian kekerasan, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh petugas terkait kebebasan politik WBP	Jumlah Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah pemilihan	0	0	100,00
% Kebebasan Diskriminasi WBP	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas yang terdapat lindakan atau pernyataan pejabat atau petugas yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas	1	20	5,00
% Kebebasan Berkeyakinan	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas yang Petugasnya melakukan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan Kebebasan Berkeyakinan.	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas	0	20	0,00
% Kekerasan Individu yang dialami WBP	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan Individu	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA	0	16	0,00
% Kekerasan Komunal yang dialami WBP	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan Komunal	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA	0	16	0,00
% Kekerasan Negara/Petugas	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan yang dilakukan oleh Petugas/Aparat Negara	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA	0	16	0,00
% Kemampuan Deteksi Dini	Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang telah melakukan upaya perbaikan bobot nilai instrument deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamlib	Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan berpotensi terjadi gangguan keamanan berdasarkan penilaian instrument deteksi dini	15	16	93,75
% Penggagalan Upaya Tindak Kriminal WRP	Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WRP oleh Petugas	Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP	24	40	60,00
% Pelanggaran WBP yang ditindaklanjuti hingga selesai	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP yang sudah ditindaklanjuti hingga selesai	Jumlah seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh WBP	89	116	76,72
% UPT Pemasarakatan yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat (Kebakaran, Kerusuhan, Pemberontakan, dll)	Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat	Jumlah UPT Pemasarakatan	14	16	87,50
% UPT Pemasarakatan yang melakukan pemulihan setelah mengalami Kondisi Darurat hingga kondisi Kondusif	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif	Jumlah UPT Pemasarakatan yang Mengalami kondisi darurat	7	8	87,50

Dimensi/Indikator	Nilai Indikator	Penyeteraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi Bobot /Jumlah Indikator	Nilai Indeks Indikator (e x g)	Nilai Dimensi	Nilai Indeks
	[a]		[b]	Minimal [c]						
1. KEAMANAN										
%Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)	68,75	69	0	100	1	5	0,15	0,10	0,83	83
% Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan Hak WBP	100,00	100	0	100	1	4	0,12	0,12		
Kebebasan Politik WBP	100,00	0	0	100	0	4	0,12	-		
% Kebebasan Diskriminasi WBP	5,00	95	0	100	1	4	0,12	0,11		
% Kebebasan Berkeyakinan	0,00	100	0	100	1	4	0,12	0,12		
% Kekerasan Individu yang dialami WBP	0,00	100	0	100	1	4	0,12	0,12		
% Kekerasan Komunal yang dialami WBP	0,00	100	0	100	1	4	0,12	0,12		
% Kekerasan Negara/Petugas	0,00	100	0	100	1	5	0,15	0,15		
2. KETERTIBAN										
% Kemampuan Deteksi Dini	93,75	94	0	100	1	5	0,22	0,20	0,82	
% Penggagalan Upaya Tindak Kriminal WRP	60,00	60	0	100	1	4	0,17	0,10		
% Pelanggaran WBP yang ditindaklanjuti hingga selesai	76,72	77	0	100	1	4	0,17	0,13		
% UPT Pemasarakatan yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat (Kebakaran, Kerusuhan, Pemberontakan, dll)	87,50	88	0	100	1	5	0,22	0,19		
% UPT Pemasarakatan yang melakukan pemulihan setelah mengalami Kondisi Darurat hingga kondisi Kondusif	87,50	88	0	100	1	5	0,22	0,19		

c. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Program/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks (Target selama satu tahun 2022)	3,46
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks (Target selama satu tahun 2022)	4,57

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Program/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks (Target selama satu tahun 2022)	3,46
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks (Target selama satu tahun 2022)	4,57

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Program/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks (Target selama satu tahun 2022)	3,46
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 (Target selama satu tahun 2022)	4,57

Data Dukung

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

SIS. REKAP SAS LAMPUNG : REKIP

2022	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGU			SEP			OKT			NOV			DES			SUMMARY 2022		
	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	RECP	MOI	PK	JUL RECAPSOEN	AG RECAPSOEN	AVG KM						
KANWIL KEMBUKHAH LAMPUNG	74	18,87	18,89	186	18,39	18,80	118	18,13	18,19	84	17,38	17,35	82	17,20	17,18	34	17,37	17,41	66	17,37	17,35	42	17,35	17,31	41	17,28	17,28	30	17,18	17,17	114	17,08	17,03	147	17,28	17,25	1048	37,17	17,10 / 0,81
KANIM BANDAR LAMPUNG	48	18,82	17,00	38	17,41	17,42	32	17,38	17,40	37	17,40	17,39	46	17,43	17,60	34	18,88	18,84	32	17,41	17,44	51	17,27	17,28	40	17,21	17,30	34	17,07	17,11	30	17,23	17,03	42	17,08	17,10	488	33,35	17,24 / 0,84
KANIM KALIANDA	30	17,34	17,38	33	17,42	17,38	31	17,35	17,36	31	17,34	17,30	31	17,35	17,31	33	17,37	17,37	38	17,40	17,41	50	17,11	17,14	38	17,14	17,25	44	17,25	17,30	33	17,35	17,40	48	17,18	17,34	437	38,42	17,23 / 0,86
KANIM KOTABUMI	31	17,48	17,42	31	17,43	17,42	31	17,43	17,42	31	17,42	17,42	31	17,43	17,42	31	17,48	17,50	31	17,48	17,50	31	17,48	17,47	21	17,42	17,42	34	17,42	17,42	31	17,48	17,42	31	17,48	17,42	386	33,42	17,42 / 4,00

No.	Satuan Kerja	IKM
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	17,24
2.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	17,28
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	17,48
	Jumlah	52
	Rata-rata	17,3

Nilai IKM = 17,3

$(17,3 \times 100) : 20 = 86,5$

$86,5 : 25 = 3,46$

Maka nilai realisasi **3,46**

Indeks Pengamanan Keimigrasian

No.	Satuan Kerja	Target	Realisasi
1.	Divisi Keimigrasian	18	18
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	46	46
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	27	21
4.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	21	43
	Jumlah	112	128

Indeks Pengamanan Keimigrasian :

$(128 : 112) = 1,142$

$1,142 \times 100 = 114,285$

$114,285 : 25 = 4,57$

Maka nilai realisasi **4,57**

Realisasi Anggaran

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.097.428.000,-	Rp. 5.698.629.476,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.097.428.000,-	Rp. 5.698.629.476,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.698.780.000,-	Rp. 15.071.408.922,-
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 15.698.780.000,-	Rp. 15.071.408.922,-



--	--	--



d. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Hukum Umum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %	21,5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.416.092.000,-	Rp. 3.297.160.298,- (96,52%)
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.416.092.000,-	Rp. 3.297.160.298,- (96,52%)

Perhitungan realisasi PNBPN:

Realisasi PNBPN 2022 = 15.998.300.000

Realisasi PNBPN 2021 = 13.156.600.000

$$\frac{(\text{Realisasi PNBPN 2022} - \text{Realisasi PNBPN 2021}) \times 100\%}{\text{Realisasi PNBPN 2021}}$$

$$\frac{(15.998.300.000 - 13.156.600.000)}{13.156.600.000} \times 100\% = 21,5\%$$

Perhitungan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Jabatan Notaris:

Jumlah Pengaduan _____ X 100% = Jumlah terselesaikan

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Jumlah Penyelesaian Layanan AHU:

Jumlah Pendaftaran _____ X 100% = Jumlah terselesaikan

Pelantikan PPNS

$$\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Pelantikan Notaris + Notaris Pengganti

$$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32	Pusat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	75 Permohonan	108 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	40%
2. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah		2 Lokus	2 Lokus	
3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		1 Laporan	1 Laporan	

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.229.572.000,-	Rp. 1.213.135.521,- (98,66 %)
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.229.572.000,-	Rp. 1.213.135.521,- (98,66 %)

3. Penyelenggaraan Pembentukan Regulasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15	Data termuat adalah termasuk Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon I

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	Data termuat adalah termasuk Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon I
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang	Data termuat adalah termasuk Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon I

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%	Data termuat adalah termasuk Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80% Sampai saat ini terdapat 33 RAPERDA yang telah selesai difasilitasi oleh Kanwil
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	25 Orang Telah diselenggarakan pada Bulan September

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 208.000.000,-	Rp. 191.685.022,- (92,16%)
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 208.000.000,-	Rp. 191.685.022,- (92,16%)

4. Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15	Pusat
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	Pusat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100 %
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	98,99%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	96,33%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Presentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	Pusat
		2. Persentase jumlah RUU Prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%	Pusat
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	Pusat
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	98,99%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	96,33%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	Pusat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah disampaikan data Propemperda oleh Kab/kota dan telah dilaksanakan Rapat Monitoring Propemperda di 7 Kab/kota - Telah terselenggarakan rapat akhir penyusunan laporan dan rekomendasi Analisis dan Evaluasi
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	94,07%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	Pusat
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%



Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 119.711.000,-	Rp. 99.910.818,- (83,46%)
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 119.711.000,-	Rp. 99.910.818,- (83,46%)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.249.574.000,-	Rp. 1.229.647.540,- (98,41%)
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.249.574.000,-	Rp. 1.229.647.540,- (98,41%)

5. Penyelenggaraan Pemajuan HAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN DIREKTUR
JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%	Pusat
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40,0%	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%	Pusat
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	Pusat
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	Pusat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah	16 Instansi Pemerintah 12 Instansi Pemerintah 23 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 222,573,000,-	Rp. 218.302.890,- (98,08%)
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 222,573,000,-	Rp. 218.302.890, (98,08%)

6. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %	Pusat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %	Pusat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Pusat
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku "Penerapan Hak Warga Binaan, Perempuan Hamil, Menyusui serta Anak Bawaan"
Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 150.341.000,-	Rp. 146.782.195,- (97,63%)	
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		Rp. 150.341.000,-	Rp. 146.782.195,- (97,63%)	



B. Capaian Kinerja Lainnya

LAPORAN REALISASI MONEV BAPPENAS
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
TAHUN 2022

No	Kode	Nomenklatur	Status Kelengkapan											
			Data Bulanan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	408822	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	408823	Ditjen Pemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	408824	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	408825	Ditjen Imigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	408826	Ditjen Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	408827	Ditjen PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	408828	Ditjen HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	408829	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	408831	Balitbang HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	408832	BPSDM												
11	406545	Lapas Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	408536	Lapas Kelas IIA Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	652962	Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	406551	Lapas Kelas IIA Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	406282	Lapas Kelas IIA Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	408530	Lapas Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	683313	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	497764	LPP Kelas IIA Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	497758	Lapas Kelas IIB Way Kanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	683704	LPIKA Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	663073	Rutan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	497742	Rutan Kelas IIB Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	406570	Rutan Kelas IIB Menggala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	683390	Rutan Kelas IIB Kota Agung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	406576	Rutan Kelas IIB Sukadana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	406591	Rutan Kelas IIB Krui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	109137	Bapas Kelas II Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	653129	Bapas Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	632015	Bapas Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	632017	Bapas Kelas II Pringsewu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	632623	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	653260	Rupbasan Kelas II Metro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	653264	Rupbasan Kelas II Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	408165	Kanin Kelas I TPI Bandar Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	638111	Kanin Kelas III Non TPI Kotabumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	109157	Kanin Kelas III Non TPI Kalianda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MONITORING IMPLEMENTASI SMART
BULAN DESEMBER 2022

NO	NAMA SATKER	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja	NILAI SMART	RANGKING
1	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	99,6	99,97	100	20	100	99,96	1
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	99,34	99,67	100	20	100	99,88	2
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	99,47	99,37	100	20	100	99,83	3
4	BALAI PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	96,95	99,57	100	20	100	99,63	4
5	KANWIL-BALITBANGHAM	96,85	99,23	100	20	100	99,55	5
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	98,5	97,38	100	20	100	99,38	6
7	KANWIL-DITJEN IMIGRASI	94,96	98,94	100	20	100	99,32	7
8	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	97,65	96,45	100	20	100	99,13	8
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	97,77	99,79	97,36	20	100	98,6	9
10	KANWIL-SEKJEN	99,14	98,26	100	16,94	100	97,41	10
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	96,97	98,48	100	14,61	86,53	95,58	11
12	KANWIL-DITJEN PP	92,16	94,3	100	15,85	89,61	95,23	12
13	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	92,84	98,35	100	13,72	84,3	94,51	13
14	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	108,23	95,15	100	11,77	79,42	94,03	14
15	BAPAS KELAS II KOTABUMI	90,21	83,98	100	15,95	89,86	93,23	15
16	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	99,93	99,6	100	8,21	70,52	91,49	16
17	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	98,42	99,42	100	8,41	71,03	91,46	17
18	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	98,35	95,31	100	8,94	72,36	91,08	18
19	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	98	98,73	100	7,08	67,7	90,34	19
20	KANWIL-DITJEN HAM	98,08	99,69	100	4,19	60,49	88,46	20
21	KANWIL-DITJEN AHU	96,52	98,74	100	3,48	58,71	87,62	21
22	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	98,9	99,72	95,95	2,4	56	87,26	22
23	KANWIL-DITJEN KI	98,27	99,79	100	1,73	54,32	86,73	23
24	KANWIL-DITJEN PAS	98,59	98,62	100	1,41	53,53	86,32	24
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	99,45	99,71	100	0,78	51,94	86,15	25
26	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	99,29	98,91	100	0,71	51,78	85,94	26
27	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	99,72	97,11	100	0,28	50,71	85,35	27
28	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	99,46	88,77	100	0,54	51,34	83,99	28
29	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	84,97	92,19	60,6	9,34	73,36	72,36	29
30	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	92,63	97,79	59,95	5,46	63,64	71,06	30
31	KANWIL-BPHN	97,1	82,49	64,47	-20	0	52,48	31
32	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSWU	91,92	95,07	15,23	-5,29	36,85	43,38	32
33	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	99,53	99,84	8,67	-20	0	31,6	33
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	100,1	98,58	8,48	-20	0	31,34	34
35	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	99,02	92,32	100	0,8	52,46	27,67	35
	RATA-RATA	97,40	96,89	88,88	7,64	69,33	83,92	

No	Divisi	Hasil Rata – Rata Penilaian Target Kinerja Tahun 2022											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1.	Kepala Divisi Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	100%	100%	100%	98,15%	99,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%	100%	100%	100%	100%	99,54%	99,54%	100%
4.	Kepala Divisi Imigrasi	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah menyusun *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Tahun 2022. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud Pertanggungjawaban Publik (*Public Accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Rencana Strategis dari 9 Program Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM RI, secara umum capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung di tahun 2022 telah tercapai dan bahkan beberapa indikator melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 mencapai 98,79% atau sebesar Rp. 242.409.773.794,- dari total anggaran sebesar Rp. 245.370.923.000,- . Hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Lampung. Beberapa kegiatan perjalanan dinas, rapat koordinasi dan sosialisasi sedapat mungkin ditunda atau dilaksanakan secara virtual, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% , namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan cukup efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, adalah sebagai berikut:

- Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan, terutama kegiatan rapat-rapat yang mengumpulkan banyak orang dan perjalanan dinas monitoring / evaluasi. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Lampung.
- Kurangnya intensitas koordinasi antar pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
- Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
- Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai serta dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung “Kinerja Kemenkumham Semakin pasti dan Berakhlak” pada tahun 2023. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, K/L terkait, dan Kab/Kota serta instansi terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta stakeholder Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung agar terpenuhinya capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan Surat Edaran Menkumham serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
- b. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihakpihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Membuat kegiatan capacity building dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh BPSDM ataupun kerjasama dengan pihak eksternal.
- d. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana prasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pembagian zona wilayah ke dalam 5 wilayah yang diampu oleh tim yang dipilih berdasarkan kompetensinya dan dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama dalam melakukan pengawasan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jl. Rw. Jl. Wolter Monginsidi No.184,
Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35224

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA		
				PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%
				(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (b) : (a)	(d)	(e)	(d) - (e)	(f) = (e) : (d)	(g)	(h)	(g) - (h)	(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1			DIVISI ADMINISTRASI															
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.504.377.000	23.302.556.164	99,14%
			SUB TOTAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.504.377.000	23.302.556.164	99,14%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM															
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM			0	0,00%	3.416.092.000	3.297.160.298	118.931.702	96,52%			0	0,00%	3.416.092.000	3.297.160.298	96,52%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL			0	0,00%	1.229.572.000	1.208.328.446	21.243.554	98,27%			0	0,00%	1.229.572.000	1.208.328.446	98,27%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			0	0,00%	208.000.000	191.685.022	16.314.978	92,16%			0	0,00%	208.000.000	191.685.022	92,16%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	222.573.000	218.302.890	4.270.110	98,08%			0	0,00%	222.573.000	218.302.890	98,08%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			0	0,00%	1.366.285.000	1.326.612.783	39.672.217	97,10%	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%	1.369.285.000	1.329.558.358	97,10%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	150.341.000	145.609.915	4.731.085	96,85%			0	0,00%	150.341.000	145.609.915	96,85%
			SUB TOTAL	0	0	0	0,00%	6.592.863.000	6.387.699.354	205.163.646	96,89%	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%	6.595.863.000	6.390.644.929	96,89%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN															
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN			0	0,00%	776.914.000	765.942.215	10.971.785	98,59%			0	0,00%	776.914.000	765.942.215	98,59%
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	10.357.291.000	10.354.670.579	2.620.421	99,97%	11.600.931.000	11.532.995.691	67.935.309	99,41%	68.375.000	68.375.000	0	100,00%	22.026.597.000	21.956.041.270	99,68%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8.373.081.000	8.369.375.062	3.705.938	99,96%	9.981.821.000	9.964.487.423	17.333.577	99,83%	0	-	0	0,00%	18.354.902.000	18.333.862.485	99,89%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.676.972.000	5.663.935.366	13.036.634	99,77%	3.690.028.000	3.662.687.547	27.340.453	99,26%			0	0,00%	9.367.000.000	9.326.622.913	99,57%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	5.792.362.000	5.780.325.308	12.036.692	99,79%	6.699.858.000	6.646.237.336	53.620.664	99,20%			0	0,00%	12.492.220.000	12.426.562.644	99,47%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	5.087.656.000	5.045.970.010	41.685.990	99,18%	7.122.444.000	7.083.011.500	39.432.500	99,45%	88.780.000	88.719.000	61.000	99,93%	12.298.880.000	12.217.700.510	99,34%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3.812.281.000	3.770.455.701	41.825.299	98,90%	4.251.295.000	4.084.613.462	166.681.538	96,08%			0	0,00%	8.063.576.000	7.855.069.163	97,41%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3.600.909.000	3.600.899.180	9.820	100,00%	4.494.875.000	4.489.527.819	5.347.181	99,88%			0	0,00%	8.095.784.000	8.090.426.999	99,93%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3.088.562.000	3.073.588.823	14.973.177	99,52%	5.263.386.000	5.232.774.358	30.611.642	99,42%	79.000.000	78.053.000	947.000	98,80%	8.430.948.000	8.384.416.181	99,45%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	3.931.825.000	3.917.836.810	13.988.190	99,64%	6.932.230.000	6.902.759.824	29.470.176	99,57%	0	-	0	0,00%	10.864.055.000	10.820.596.634	99,60%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.688.917.000	4.670.717.435	18.199.565	99,61%	3.522.199.000	3.517.112.809	5.086.191	99,86%			0	0,00%	8.211.116.000	8.187.830.244	99,72%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.535.054.000	7.533.417.275	1.636.725	99,98%	10.944.902.000	10.940.819.709	4.082.291	99,96%			0	0,00%	18.479.956.000	18.474.236.984	99,97%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3.336.523.000	3.331.212.677	5.310.323	99,84%	4.360.900.000	4.329.668.491	31.231.509	99,28%			0	0,00%	7.697.423.000	7.660.881.168	99,53%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.286.593.000	3.273.020.876	13.572.124	99,59%	4.012.250.000	3.986.634.880	25.615.120	99,36%			0	0,00%	7.298.843.000	7.259.655.756	99,46%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.087.271.000	3.084.958.622	2.312.378	99,93%	2.409.119.000	2.357.358.000	51.761.000	97,85%			0	0,00%	5.496.390.000	5.442.316.622	99,02%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.569.661.000	3.560.414.812	9.246.188	99,74%	3.572.843.000	3.469.420.259	103.422.741	97,11%			0	0,00%	7.142.504.000	7.029.835.071	98,42%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.603.972.000	2.590.451.063	13.520.937	99,48%	3.599.385.000	3.261.154.842	338.230.158	90,60%			0	0,00%	6.203.357.000	5.851.605.905	94,33%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4.899.020.000	4.866.527.536	32.492.464	99,34%	1.628.736.000	1.627.952.792	783.208	99,95%	4.700.000	4.700.000	0	100,00%	6.532.456.000	6.499.180.328	99,49%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3.357.421.000	3.353.202.852	4.218.148	99,87%	1.294.721.000	1.270.049.770	24.671.230	98,09%	88.000.000	88.000.000	0	100,00%	4.740.142.000	4.711.252.622	99,39%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	884.419.000	855.554.405	28.864.595	96,74%	1.441.729.000	1.236.973.352	204.755.648	85,80%	64.600.000	64.100.000	500.000	99,23%	2.390.748.000	2.156.627.757	90,21%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	915.524.000	910.355.816	5.168.184	99,44%	1.095.695.000	1.081.265.832	14.429.168	98,68%	150.000.000	149.850.000	150.000	99,90%	2.161.219.000	2.141.471.648	99,09%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2.330.203.000	2.179.504.662	150.698.338	93,53%	625.940.000	614.800.000	11.140.000	98,22%	100.000.000	99.605.000	395.000	99,61%	3.056.143.000	2.893.909.662	94,69%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1.420.322.000	1.392.795.780	27.526.220	98,06%	599.747.000	478.445.000	121.302.000	79,77%	0	-	0	0,00%	2.020.069.000	1.871.240.780	92,63%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	952.301.000	951.064.112	1.236.888	99,87%	643.925.000	633.720.630	10.204.370	98,42%	8.000.000	8.000.000	0	100,00%	1.604.226.000	1.592.784.742	99,29%
			SUB TOTAL	92.588.140.000	92.130.254.762	457.885.238	99,51%	100.565.873.000	99.170.413.541	1.395.459.459	98,61%	651.455.000	649.402.000	2.053.000	99,68%	193.805.468.000	191.950.070.303	99,04%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN															
	06	408825	DITJEN IMIGRASI			0	0,00%	940.011.000	892.644.322	47.366.678	94,96%			0	0,00%	940.011.000	892.644.322	94,96%
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.534.546.000	4.508.386.960	26.159.040	99,42%	5.981.650.000	5.882.938.489	98.711.511	98,35%	951.670.000	950.439.000	1.231.000	99,87%	11.467.866.000	11.341.764.449	98,90%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1.308.723.000	1.300.597.626	8.125.374	99,38%	2.973.980.000	2.550.483.053	423.496.947	85,76%	111.500.000	111.011.100	488.900	99,56%	4.394.203.000	3.962.091.779	90,17%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.363.436.000	1.356.096.496	7.339.504	99,46%	3.200.592.000	3.114.798.352	85.793.648	97,32%	99.107.000	99.107.000	0	100,00%	4.663.135.000	4.570.001.848	98,00%
			SUB TOTAL	7.206.705.000	7.165.081.082	41.623.918	99,42%	13.096.233.000	12.440.864.216	655.368.784	95,00%	1.162.277.000	1.160.557.100	1.719.900	99,85%	21.465.215.000	20.766.502.398	96,74%
			TOTAL KESELURUHAN	112.986.778.000	112.339.031.281	647.746.719	99,43%	125.964.407.000	123.662.318.504	2.302.088.496	98,17%	6.419.738.000	6.408.424.009	11.313.991	99,82%	245.370.923.000	242.409.773.794	98,79%

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022
DIPA KANTOR WILAYAH

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA		
				PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%
				(a)	(b)		(c) = (b) : (a)	(d)	(e)		(f) = (e) : (d)	(g)	(h)		(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1			DIVISI ADMINISTRASI															
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.504.377.000	23.302.556.164	99,14%
			SUB TOTAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%	23.504.377.000	23.302.556.164	99,14%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM															
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	-	0	0	0,00%	3.416.092.000	3.297.160.298	118.931.702	96,52%	0	0	0	0,00%	3.416.092.000	3.297.160.298	96,52%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	0	0	0,00%	1.229.572.000	1.208.328.446	21.243.554	98,27%	0	0	0	0,00%	1.229.572.000	1.208.328.446	98,27%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	0	0	0,00%	208.000.000	191.685.022	16.314.978	92,16%	0	0	0	0,00%	208.000.000	191.685.022	92,16%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	-	0	0	0,00%	222.573.000	218.302.890	4.270.110	98,08%	0	0	0	0,00%	222.573.000	218.302.890	98,08%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	-	0	0	0,00%	1.366.285.000	1.326.612.783	39.672.217	97,10%	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%	1.369.285.000	1.329.558.358	97,10%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	-	0	0	0,00%	150.341.000	145.609.915	4.731.085	96,85%	0	0	0	0,00%	150.341.000	145.609.915	96,85%
			SUB TOTAL	0	0	0	0,00%	6.592.863.000	6.387.699.354	205.163.646	96,89%	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%	6.595.863.000	6.390.644.929	96,89%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN															
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	-	0	0	0,00%	776.914.000	765.942.215	10.971.785	98,59%	0	0	0	0,00%	776.914.000	765.942.215	98,59%
			SUB TOTAL (05)	0	0	0	0,00%	776.914.000	765.942.215	10.971.785	98,59%	0	0	0	0,00%	776.914.000	765.942.215	98,59%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN															
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	-	0	0	0,00%	940.011.000	892.644.322	47.366.678	94,96%	0	0	0	0,00%	940.011.000	892.644.322	94,96%
			SUB TOTAL (06)	0	0	0	0,00%	940.011.000	892.644.322	47.366.678	94,96%	0	0	0	0,00%	940.011.000	892.644.322	94,96%
			TOTAL KESELURUHAN	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%	14.019.226.000	13.709.627.284	309.598.716	97,79%	4.606.006.000	4.598.464.909	7.541.091	99,84%	31.817.165.000	31.351.787.630	98,54%

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (b) : (a)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%
			SUB TOTAL	13.191.933.000	13.043.695.437	148.237.563	98,88%
2			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	10.357.291.000	10.354.670.579	2.620.421	99,97%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	8.373.081.000	8.369.375.062	3.705.938	99,96%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.676.972.000	5.663.935.366	13.036.634	99,77%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	5.792.362.000	5.780.325.308	12.036.692	99,79%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	5.087.656.000	5.045.970.010	41.685.990	99,18%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3.812.281.000	3.770.455.701	41.825.299	98,90%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3.600.909.000	3.600.899.180	9.820	100,00%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3.088.562.000	3.073.588.823	14.973.177	99,52%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	3.931.825.000	3.917.836.810	13.988.190	99,64%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.688.917.000	4.670.717.435	18.199.565	99,61%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.535.054.000	7.533.417.275	1.636.725	99,98%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	3.336.523.000	3.331.212.677	5.310.323	99,84%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.286.593.000	3.273.020.876	13.572.124	99,59%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.087.271.000	3.084.958.622	2.312.378	99,93%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.569.661.000	3.560.414.812	9.246.188	99,74%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.603.972.000	2.590.451.063	13.520.937	99,48%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4.899.020.000	4.866.527.536	32.492.464	99,34%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3.357.421.000	3.353.202.852	4.218.148	99,87%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	884.419.000	855.554.405	28.864.595	96,74%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	915.524.000	910.355.816	5.168.184	99,44%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	2.330.203.000	2.179.504.662	150.698.338	93,53%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1.420.322.000	1.392.795.780	27.526.220	98,06%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	952.301.000	951.064.112	1.236.888	99,87%
			SUB TOTAL	92.588.140.000	92.130.254.762	457.885.238	99,51%
3			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.534.546.000	4.508.386.960	26.159.040	99,42%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1.308.723.000	1.300.597.626	8.125.374	99,38%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.363.436.000	1.356.096.496	7.339.504	99,46%
			SUB TOTAL (06)	7.206.705.000	7.165.081.082	41.623.918	99,42%
			TOTAL KESELURUHAN	112.986.778.000	112.339.031.281	647.746.719	99,43%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

20 Januari 2023 pukul 16.53 WIB

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA BARANG			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(d)	(e)	(d) - (e)	(f) = (e) : (d)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%
			SUB TOTAL	5.709.438.000	5.663.341.393	46.096.607	99,19%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM				
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3.416.092.000	3.297.160.298	118.931.702	96,52%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.229.572.000	1.208.328.446	21.243.554	98,27%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	208.000.000	191.685.022	16.314.978	92,16%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	222.573.000	218.302.890	4.270.110	98,08%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1.366.285.000	1.326.612.783	39.672.217	97,10%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	150.341.000	145.609.915	4.731.085	96,85%
			SUB TOTAL	6.592.863.000	6.387.699.354	205.163.646	96,89%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	776.914.000	765.942.215	10.971.785	98,59%
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	11.600.931.000	11.532.995.691	67.935.309	99,41%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	9.981.821.000	9.964.487.423	17.333.577	99,83%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	3.690.028.000	3.662.687.547	27.340.453	99,26%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	6.699.858.000	6.646.237.336	53.620.664	99,20%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	7.122.444.000	7.083.011.500	39.432.500	99,45%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	4.251.295.000	4.084.613.462	166.681.538	96,08%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	4.494.875.000	4.489.527.819	5.347.181	99,88%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	5.263.386.000	5.232.774.358	30.611.642	99,42%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	6.932.230.000	6.902.759.824	29.470.176	99,57%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	3.522.199.000	3.517.112.809	5.086.191	99,86%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	10.944.902.000	10.940.819.709	4.082.291	99,96%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	4.360.900.000	4.329.668.491	31.231.509	99,28%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	4.012.250.000	3.986.634.880	25.615.120	99,36%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	2.409.119.000	2.357.358.000	51.761.000	97,85%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.572.843.000	3.469.420.259	103.422.741	97,11%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	3.599.385.000	3.261.154.842	338.230.158	90,60%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	1.628.736.000	1.627.952.792	783.208	99,95%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	1.294.721.000	1.270.049.770	24.671.230	98,09%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	1.441.729.000	1.236.973.352	204.755.648	85,80%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	1.095.695.000	1.081.265.832	14.429.168	98,68%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	625.940.000	614.800.000	11.140.000	98,22%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	599.747.000	478.445.000	121.302.000	79,77%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	643.925.000	633.720.630	10.204.370	98,42%
			SUB TOTAL	100.565.873.000	99.170.413.541	1.395.459.459	98,61%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	940.011.000	892.644.322	47.366.678	94,96%
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	5.981.650.000	5.882.938.489	98.711.511	98,35%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	2.973.980.000	2.550.483.053	423.496.947	85,76%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	3.200.592.000	3.114.798.352	85.793.648	97,32%
			SUB TOTAL (06)	13.096.233.000	12.440.864.216	655.368.784	95,00%
			TOTAL KESELURUHAN	125.964.407.000	123.662.318.504	2.302.088.496	98,17%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

20 Januari 2023 pukul 16.53 WIB

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA MODAL			
				PAGU	REALISASI	SISA	%
				(g)	(h)	(g) - (h)	(i) = (h) : (g)
1			DIVISI ADMINISTRASI				
	01	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%
			SUB TOTAL	4.603.006.000	4.595.519.334	7.486.666	99,84%
2			DIVISI PELAYANAN HUKUM				
	03	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	0	0	0	0,00%
	07	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0	0	0,00%
	08	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0,00%
	09	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0,00%
	10	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%
	11	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0,00%
			SUB TOTAL	3.000.000	2.945.575	54.425	98,19%
3			DIVISI PEMASYARAKATAN				
	05	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	0	0	0	0,00%
	05	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	68.375.000	68.375.000	0	100,00%
	05	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	0	0	0	0,00%
	05	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	0	0	0	0,00%
	05	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	0	0	0	0,00%
	05	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	88.780.000	88.719.000	61.000	99,93%
	05	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	0	0	0	0,00%
	05	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	0	0	0	0,00%
	05	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	79.000.000	78.053.000	947.000	98,80%
	05	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	0	0	0	0,00%
	05	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	0	0	0	0,00%
	05	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	0	0	0	0,00%
	05	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	0	0	0	0,00%
	05	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	0	0	0	0,00%
	05	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	0	0	0	0,00%
	05	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	0	0	0	0,00%
	05	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	0	0	0	0,00%
	05	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4.700.000	4.700.000	0	100,00%
	05	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	88.000.000	88.000.000	0	100,00%
	05	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	64.600.000	64.100.000	500.000	99,23%
	05	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	150.000.000	149.850.000	150.000	99,90%
	05	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	100.000.000	99.605.000	395.000	99,61%
	05	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	0	0	0	0,00%
	05	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	8.000.000	8.000.000	0	100,00%
			SUB TOTAL (05)	651.455.000	649.402.000	2.053.000	100,00%
4			DIVISI KEIMIGRASIAN				
	06	408825	DITJEN IMIGRASI	0	0	0	0,00%
	06	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	951.670.000	950.439.000	1.231.000	99,87%
	06	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	111.500.000	111.011.100	488.900	99,56%
	06	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	99.107.000	99.107.000	0	100,00%
			SUB TOTAL (06)	1.162.277.000	1.160.557.100	1.719.900	99,85%
			TOTAL KESELURUHAN	6.419.738.000	6.408.424.009	11.313.991	99,82%

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

20 Januari 2023 pukul 16.53 WIB

REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI	% TARGET	% DEVIASI
1	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	18.479.956.000	18.474.236.984	5.719.016	99,97	98,00	1,97
2	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	8.095.784.000	8.090.426.999	5.357.001	99,93	98,00	1,93
3	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	18.354.902.000	18.333.862.485	21.039.515	99,89	98,00	1,89
4	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	8.211.116.000	8.187.830.244	23.285.756	99,72	98,00	1,72
5	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	22.026.597.000	21.956.041.270	70.555.730	99,68	98,00	1,68
6	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	10.864.055.000	10.820.596.634	43.458.366	99,60	98,00	1,60
7	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	9.367.000.000	9.326.622.913	40.377.087	99,57	98,00	1,57
8	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	7.697.423.000	7.660.881.168	36.541.832	99,53	98,00	1,53
9	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	6.532.456.000	6.499.180.328	33.275.672	99,49	98,00	1,49
10	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	12.492.220.000	12.426.562.644	65.657.356	99,47	98,00	1,47
11	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	7.298.843.000	7.259.655.756	39.187.244	99,46	98,00	1,46
12	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	8.430.948.000	8.384.416.181	46.531.819	99,45	98,00	1,45
13	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	4.740.142.000	4.711.252.622	28.889.378	99,39	98,00	1,39
14	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	12.298.880.000	12.217.700.510	81.179.490	99,34	98,00	1,34
15	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	1.604.226.000	1.592.784.742	11.441.258	99,29	98,00	1,29
16	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	23.504.377.000	23.302.556.164	201.820.836	99,14	98,00	1,14
17	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	2.161.219.000	2.141.471.648	19.747.352	99,09	98,00	1,09
18	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	5.496.390.000	5.442.316.622	54.073.378	99,02	98,00	1,02
19	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	11.467.866.000	11.341.764.449	126.101.551	98,90	98,00	0,90
20	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN	776.914.000	765.942.215	10.971.785	98,59	98,00	0,59
21	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	7.142.504.000	7.029.835.071	112.668.929	98,42	98,00	0,42
22	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.229.572.000	1.208.328.446	21.243.554	98,27	98,00	0,27
23	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	222.573.000	218.302.890	4.270.110	98,08	98,00	0,08
24	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	4.663.135.000	4.570.001.848	93.133.152	98,00	98,00	0,00
25	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	8.063.576.000	7.855.069.163	208.506.837	97,41	98,00	-0,59
26	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1.369.285.000	1.329.558.358	39.726.642	97,10	98,00	-0,90
27	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	150.341.000	145.609.915	4.731.085	96,85	98,00	-1,15
28	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3.416.092.000	3.297.160.298	118.931.702	96,52	98,00	-1,48
29	408825	DITJEN IMIGRASI	940.011.000	892.644.322	47.366.678	94,96	98,00	-3,04
30	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	3.056.143.000	2.893.909.662	162.233.338	94,69	98,00	-3,31
31	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	6.203.357.000	5.851.605.905	351.751.095	94,33	98,00	-3,67
32	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	2.020.069.000	1.871.240.780	148.828.220	92,63	98,00	-5,37
33	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	208.000.000	191.685.022	16.314.978	92,16	98,00	-5,84
34	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	2.390.748.000	2.156.627.757	234.120.243	90,21	98,00	-7,79
35	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	4.394.203.000	3.962.091.779	432.111.221	90,17	98,00	-7,83
TOTAL KESELURUHAN REALISASI KANWIL			245.370.923.000	242.409.773.794	2.961.149.206	98,79	98,00	0,79

sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id>

20 Januari 2023 pukul 16.53 WIB

REALISASI
TARGET DISBURSEMENT PLAN
DEVIASI (+ / -)

98,79%
98,00%
0,79%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan
Jakarta Selatan 12940, Po Box. 3489, Telp/Fax. 021-5252975
Laman: www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.PW.03.01.VI-29

01 Juli 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat : Penting

Hal : Informasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
di-
Bandar Lampung

Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.KP.04.01.5-45 tanggal 9 Mei 2022, tim telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 yang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, mulai tanggal 11 Mei s.d. 23 Mei 2022 dengan uraian hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor: ITJ.7.PW.03.01-54/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan dan penertiban sebagai berikut:

- A. Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mendapat capaian nilai adalah sebesar **76,71 (Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Satu)** atau kategori **BB (Sangat Baik)**, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Adapun rincian hasil penilaian, adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I.	Perencanaan Kinerja	30	22,50
II	Pengukuran Kinerja	30	23,40
III	Pelaporan Kinerja	15	10,80
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		100	76,71

- B. Terhadap hasil evaluasi tersebut kami merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Agar dokumen perencanaan kinerja dapat menyajikan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based)*;

- b. Agar perencanaan kinerja yang ditetapkan merupakan hasil analisis dari perbaikan kinerja sebelumnya dan terdokumentasi dengan baik sehingga menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - a. Agar pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman teknis yang mengatur dengan jelas cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
 - b. Agar terhadap dokumen survei terkait capaian organisasi dapat dilakukan pengolahan atau analisis data yang menunjukkan bagaimana pemahaman dan kepedulian satuan kerja atau pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - a. Agar laporan kinerja dapat memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Agar laporan kinerja dapat memberikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - c. Agar laporan kinerja dapat memberikan informasi bagaimana dampaknya dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Atas rekomendasi evaluasi di atas untuk dilakukan perbaikan dan hasilnya disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadi periksa.



Plh. Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN SANTOSO

NIP. 19700430 199103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Wilayah V (selaku Koordinator).



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.175.145.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.175.145.000,-

Pihak Kedua,
 Sekretaris Jenderal



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
 Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Iwan Santoso, S.H., M.Si.
 NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Reynhard Silitonga, S.H., M.Si.
NRP. 67090332


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak di wilayah sesuai standar	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 949.080.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 949.080.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Reynhard Silitonga, S.H., M.Si.
NRP. 67090332


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

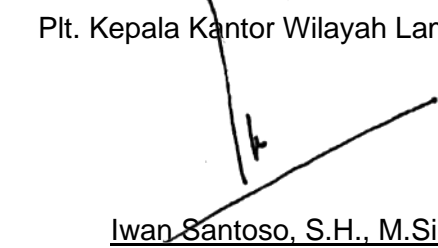
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	70,0% 40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	20% 50% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 222.573.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 222.573.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum
NIP. 197105011993031001


Iwan Santoso, S.H., M.Si
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

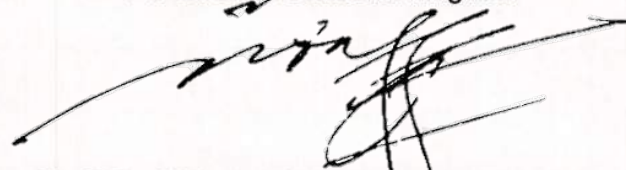
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.097.428.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.097.428.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.698.780.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 15.698.780.000,-


Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum
NIP. 197105011993031001



Iwan Santoso, S.H., M.Si
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

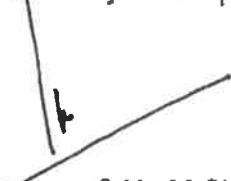
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.416.092.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.416.092.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum


 Cahyo Rahadian Muzhar
 NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Lampung


 Iwan Santoso, S.H., M.Si.
 NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

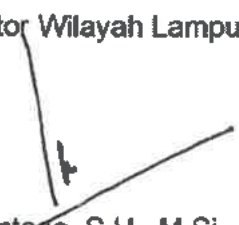
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

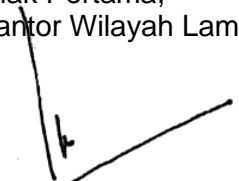
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

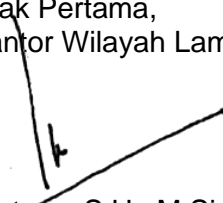
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 142.187.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142.187.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.806.690.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.806.690.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

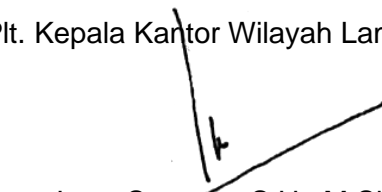
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 19700430 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	75 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.229.572.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.229.572.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso


Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 218.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 218.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung



Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Iwan Santoso, S.H., M.Si.
Jabatan : Pjt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamplan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pjt. Kepala Kantor Wilayah Lampung


Iwan Santoso, S.H., M.Si.
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.601.201.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.601.201.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sofia Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 232,000,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 232,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

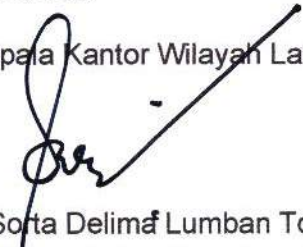
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1*001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 3.416.092.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 3.416.092.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadiar Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

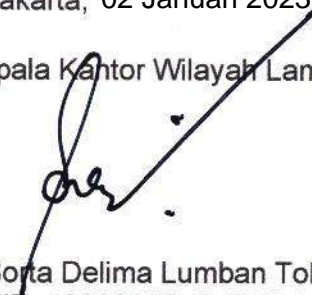
Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023,

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

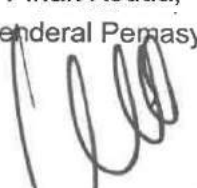
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

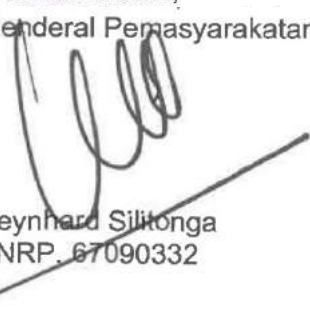
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		85%	
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		80%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		94%	
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		97%	
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		80%	
5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		85%	
6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		85%	
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		80%	
8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		27%	

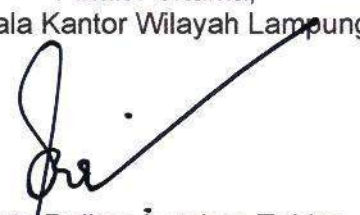
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 73.512.257.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp. 136.037.733.000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

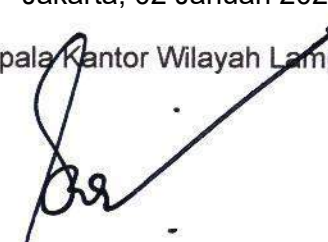
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

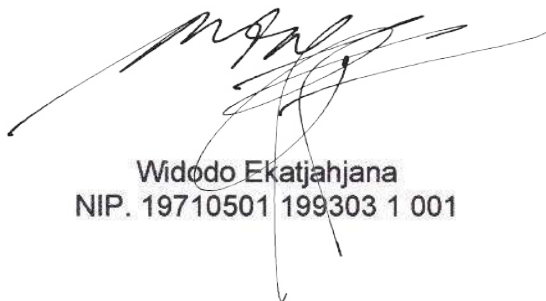
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.276.068.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.276.068.000,-

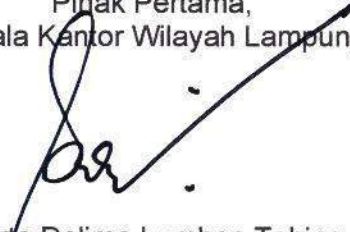
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sorita Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	81 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.535.857.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.535.857.000,-

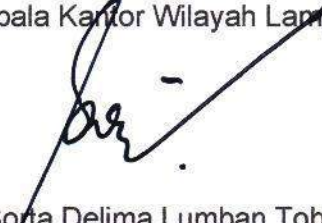
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pft. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sota Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

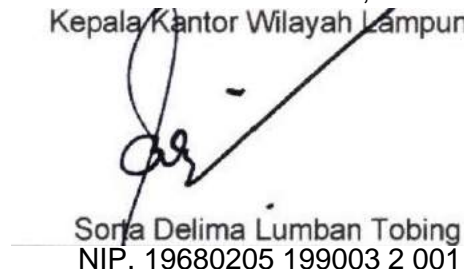
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 233,073,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 233,073,000,-

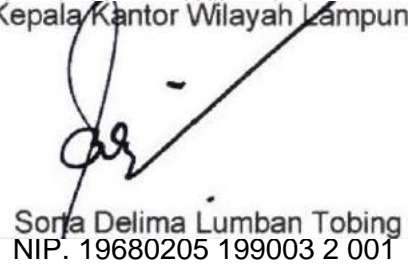
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sorja Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

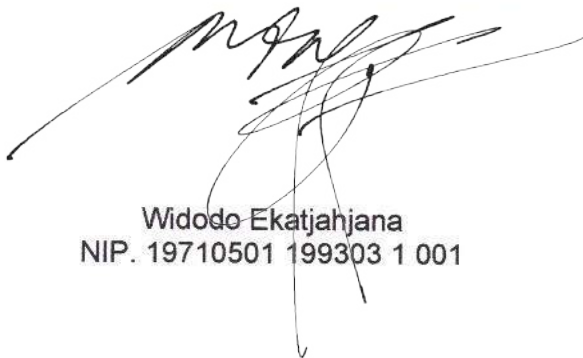
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

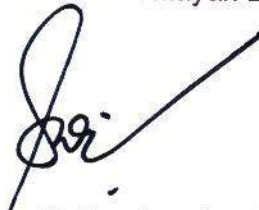
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 142,187,000
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 142,187,000
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,160,370,000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2,160,370,000

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

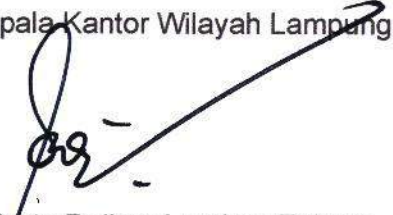
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

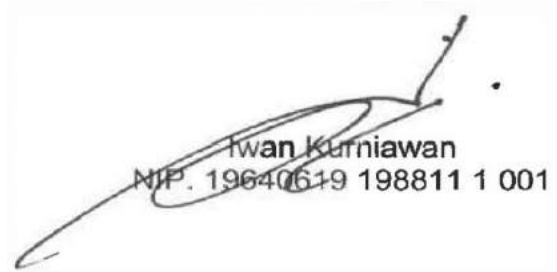
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM


Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung


Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

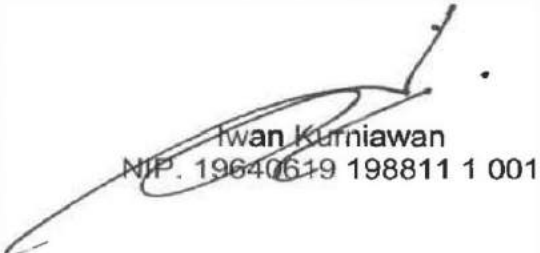
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Lampung



Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorta Delima Lumban Tobing

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

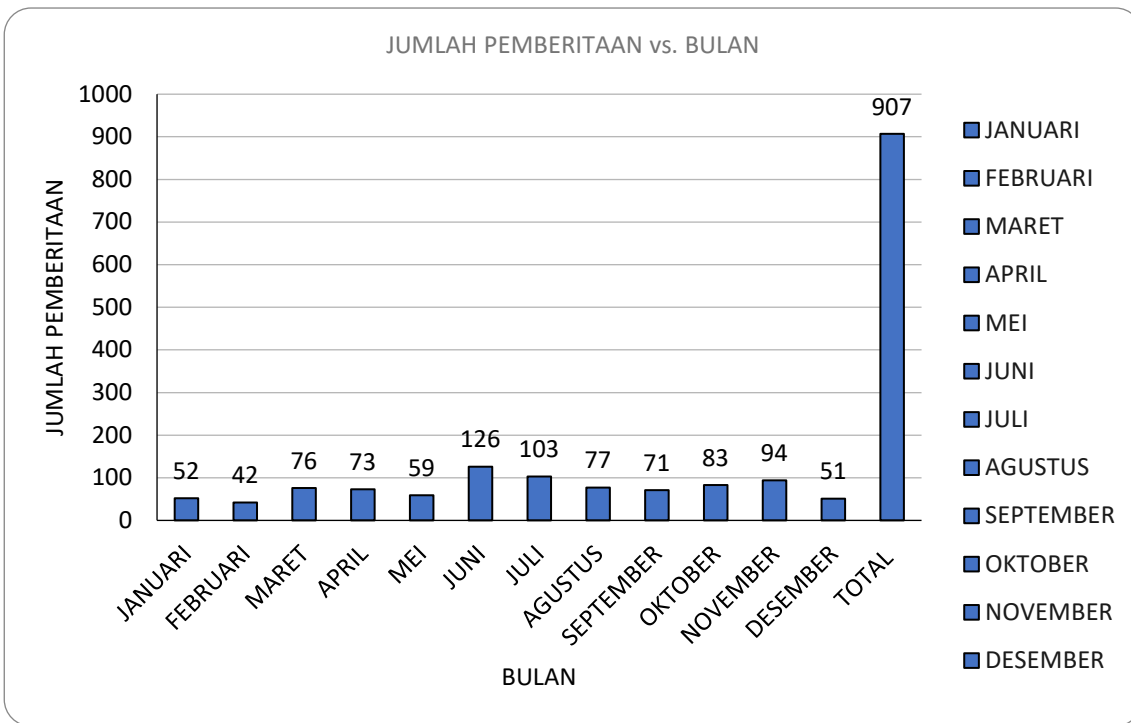
Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Lampung

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

PEMBERITAAN PADA LAMAN WEBSITE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

BULAN	JUMLAH PEMBERITAAN
JANUARI	52
FEBRUARI	42
MARET	76
APRIL	73
MEI	59
JUNI	126
JULI	103
AGUSTUS	77
SEPTEMBER	71
OKTOBER	83
NOVEMBER	94
DESEMBER	51
TOTAL	907



HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Sabtu, 01 Januari 2022	Sambut Tahun 2022, Plt. Kakanwil Lampung Lakukan Monitoring Pelayanan di Lapas Kelas IIA Kalianda	Lapas Kelas IIA Kalianda	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Senin, 03 Januari 2022	Awali Kinerja Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Apel Pagi Perdana	Kantor Wilayah Lampung	Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Senin, 03 Januari 2022	Divisi Yankum Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi Perdana Awal Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 06 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Persiapan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Imigrasi, Is Edy Ekoputranto
Kamis, 06 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Deklarasi Janji Kinerja Kemenkumham RI Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Imigrasi, Is Edy Ekoputranto
Kamis, 06 Januari 2022	Kadiv Keimigrasian Berikan Penguatan Tusi Pada Kanim Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Kamis, 06 Januari 2022	Yasonna Pimpin Janji Kinerja Kemenkumham untuk Tingkatkan Layanan Publik, Ketua KPK Beri Pujian	Gedung Kemenkumham Jakarta	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman RI, anggota Komisi III DPR RI
Jumat, 07 Januari 2022	Kunjungi Kanim Kotabumi, Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham Lampung Kuatkan TUSI Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi
Sabtu, 08 Januari 2022	Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Karawista Cup Shooting Championship 2022	Brimob Bandar Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dansat Brimob, Kombes Pol, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsugih
Senin, 10 Januari 2022	Pererat Silaturahmi Antar Lembaga, Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Pelantikan Pengurus Olahraga Esports Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung	Hotel Horison Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Senin, 10 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Penyampaian Juknis Target Kinerja KI Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Senin, 10 Januari 2022	Plt. Kakanwil dan Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Pengarahan Kinerja dan Penandatanganan PK DJKI Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Plt. Kakanwil, Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 10 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Wilayah Semester II TA 2021	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Plt. Kepala Divisi Administrasi
Selasa, 11 Januari 2022	Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Saksikan Deklarasi Pembangunan ZI di Lingkungan BNN Provinsi Lampung	BNN Provinsi Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung
Selasa, 11 Januari 2022	Audiensi Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Pembangunan Zona Integritas Jadi Topik Bahasan	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Selasa, 11 Januari 2022	Gubernur Lampung Terima Penghargaan Menkumham Atas Program Vaksinasi Covid-19 WBP/ASN Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung	Mahan Agung Lampung	Gubernur Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Rabu, 12 Januari 2022	Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Gelar Pertemuan Awal Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Pembina Dharma Wanita
Rabu, 12 Januari 2022	Komitmen Bersama Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, Gelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanaan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Wakil Gubernur Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Komandan Korem Gatam/043, Kepala BIN Daerah Lampung, Kepala BNNP Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Wilayah Lampung, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu

Kamis, 13 Januari 2022	Kunjungi Lapas Perempuan Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung Resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi	Lapas Perempuan Bandar Lampung	Walikota Bandar Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Lembaga Masyarakat (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung
Jumat, 14 Januari 2022	Kompak, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Bersama Bumi Ruwajurai Gowes Club Lakukan Gowes Perdana	Lapangan Saburai Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Sekda Provinsi Bandar Lampung, Kepala BNNP, Brigjen Pol, Kepala Kantor Wilayah DJKN, Kepala BPOM Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung, Kepala Perwakilan Bi, perwakilan dari BSI.
Senin, 17 Januari 2022	Audiensi dengan Pelaku Pariwisata Bali, Yasonna Tegaskan Pemerintah Cari Jalan Terbaik	Provinsi Bali	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali, Ketua DPP PDI Perjuangan
Senin, 17 Januari 2022	Terobosan Pencatatan HAK Cipta Kemenkumham Disambut Baik Masyarakat, Proses Beres Dalam Hitungan Menit	Provinsi Bali	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan
Senin, 17 Januari 2022	Menkumham: Pemda dan Industri Harus Bersinergi Manfaatkan Kekayaan Intelektual untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi	Ksiranawa Art Centre, Denpasar	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan
Selasa, 18 Januari 2022	Deklarasi Janji Kinerja, Plt. Kadivmin: Lapas Kalianda Berjanji Memberikan yang Terbaik	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda	Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda
Rabu, 19 Januari 2022	Apel Nasional, Menkumham Yasonna Tekankan Perkuat Layanan Publik dan Pengamanan Perbatasan	Dermaga 99 Harbour Bay, Batam	Menteri Hukum dan HAM
Kamis, 20 Januari 2022	Plt. Kakanwil Jadi Saksi Deklarasi Janji Kinerja pada 3 UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Keimigrasian,
Kamis, 20 Januari 2022	Deklarasi Janji Kinerja Kanim Kelas III Non TPI Kalianda, Kadiv Imigrasi: Lebih Bersemangat Untuk Memenangkan Kontestasi WBK 2022	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Kamis, 20 Januari 2022	HUT PIPAS ke-18, PIPAS Lampung Gelar Kunjungan Kasih Ke LPKA	LPKA Kelas II Bandar Lampung	Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung, Ketua PIPAS Lampung, jajaran pengurus, anggota PIPAS Lampung
Kamis, 20 Januari 2022	Plt. Kakanwil Resmi Membuka Training HAM Bagi Petugas Unit Layanan Disabilitas di Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung	Hotel Emersia Bandar Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Jumat, 21 Januari 2022	Deklarasi Janji Kinerja Rubpasan Bandar Lampung, Plt. Kakanwil Ingatkan untuk Berfikir, Berkata dan Berprilaku Positif	Rumah Penyimpanan Benda/ Barang Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Plt. Kepala Rubpasan, Pejabat Struktural Rubpasan
Jumat, 21 Januari 2022	Saksi Deklarasi Janji Kinerja 2022, Kadiv Keimigrasian Yakini Bapas Bandar Lampung Komitmen Capai Kinerja Terbaik	Balai Masyarakat Kelas I Bandar Lampung	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Lampung, Kepala Bapas Bandar Lampung
Senin, 24 Januari 2022	Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Saksikan Deklarasi Janji Kinerja di Rubpasan Kelas II Metro dan LPKA	LPKA Bandar Lampung, Rubpasan Kelas II Metro	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kadiv Keimigrasian, Plt. Kepala Rubpasan Kelas II Metro
Senin, 24 Januari 2022	Bapas Metro dan Lapas Gunung Sugih Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, Plt. Kadivmin Kumham Lampung Hadir Sebagai Saksi	Bapas Kelas II Metro, Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Bapas Kelas II Metro, Kepala Lapas Kelas IIB Gunung Sugih
Senin, 24 Januari 2022	Kadivpas Saksikan Deklarasi Janji Kinerja Pada Rutan Sukadana	Rutan Sukadana Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Plt. Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Masyarakat, Kepala Divisi Keimigrasian
Senin, 24 Januari 2022	Plt. Kakanwil hadir Deklarasi Janji Kinerja, Lapas Metro Siap Raih WBBM 2022	Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Metro	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIA Metro
Selasa, 25 Januari 2022	"Komitmen Bersama" Jadi Arahkan Kadivmin Dalam Deklarasi Janji Kinerja pada Rutan dan Rubpasan Kotabumi	Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kotabumi	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung

Selasa, 25 Januari 2022	Deklarasi Janji Kinerja Lapas Way Kanan Tahun 2022, Kadiv Pemasarakatan Ingatkan Seluruh Pegawai Berintegritas	Lapas Kelas IIB Way Kanan	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Lapas Kelas IIB Way Kanan
Selasa, 25 Januari 2022	Rutan Krui Laksanakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, Kadiv Pemasarakatan : Mari Terus Tingkatkan Kinerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui, Pejabat Struktural Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui
Selasa, 25 Januari 2022	Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Saksikan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Kotabumi	Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi
Selasa, 25 Januari 2022	Kadiv PAS Kumham Lampung Hadiri Deklarasi Janji Kinerja Bapas Kotabumi Tahun 2022	Balai Pemasarakatan Klas II Kotabumi	Kepala Divisi Pemasarakatan, epala Bapas Kotabumi
Selasa, 25 Januari 2022	Deklarasikan Janji Kinerja 2022, Kanim Kotabumi Siap Membangun SDM Unggul dan Terpercaya	Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kotabumi	Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi Kotabumi
Rabu, 26 Januari 2022	Kobarkan Kembali Semangat di Minggu Terakhir, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadir Sebagai Saksi Deklarasi Janji Kinerja Rutan Kelas IIB Kota Agung Tahun 2022	Rutan Kelas IIB Kota Agung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Rutan Kelas IIB Kota Agung
Rabu, 26 Januari 2022	Deklarasi Janji Kinerja Bapas Pringsewu, Kadivim: Kekurangan bukanlah Hambatan dalam Bekerja secara Optimal	Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu
Rabu, 26 Januari 2022	Lapas Kotaagung Gelar Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, Plt. Kadiv Administrasi : Capai Target Kinerja yang Terarah dan Tepat Sasaran	Lapas Kelas IIB Kotaagung	Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Lapas Kelas IIB Kotaagung
Kamis, 27 Januari 2022	Berlangsung Khidmad, Plt. Kakanwil Lampung Pimpin Pengambilan Sumpah 174 PNS Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Kamis, 27 Januari 2022	Tutup Rangkaian Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, Kadivpas Jadi Saksi Pada Rutan dan Lapas Perempuan Balam	Lapas Perempuan Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Rutan Bandar Lampung, Kepala Lapas Perempuan Bandar Lampung
Kamis, 27 Januari 2022	Peringati Hari Bhakti Imigrasi ke-72, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Upacara dan Pemotongan Tumpeng	Kantor Imigrasi TPI I Bandar Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung
Kamis, 27 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Seminar Ditjen PP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum
Kamis, 27 Januari 2022	Peringati HBI ke-72, Kemenkumham Komitmen Tingkatkan Layanan Publik dengan Luncurkan M-Paspor	Graha Pengayoman Kemenkumham	Menteri Hukum dan HAM RI
Jumat, 28 Januari 2022	Puncak Peringatan HUT PIPAS Ke-18, PIPAS Lampung Ikuti Perayaan Secara Virtual	Lembaga Pemasarakatan Kota Agung	Ketua PIPAS Lampung, Anggota PIPAS
Senin, 31 Januari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi Propemperda Tahun 2022 Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung	DPRD Provinsi Lampung	Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, anggota Bapemperda, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Kepala Bagian Hukum Provinsi Lampung, Kepala Bagian Hukum DPRD Provinsi Lampung, Kabid Hukum
Senin, 31 Januari 2022	Walikota Bandar Lampung Berikan Alat Pembidang Tapis Untuk Tingkatkan Keterampilan WBP Lapas Kelas I Bandar Lampung	Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung	Walikota Bandar Lampung, Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Rabu, 02 Februari 2022	Samakan Persepsi dan Pemahaman, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Gelar FGD Sosialisasi Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Harris Hotel & Convention Center, B	Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu.
Rabu, 02 Februari 2022	"Mindset, Sinergi, dan Kolaborasi", Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Pembentukan Tim Pokja WBK Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Rabu, 02 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Roadshow Konsultasi Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Oleh DPR RI dan Unila	Hotel Swiss Bell, Bandar Lampung	Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia Oktavianti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Hapsoro Adhinugroho
Rabu, 02 Februari 2022	Menkumham Yasonna Tegaskan Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi, Koruptor Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura	Bintan, Kepulauan Riau	Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly
Kamis, 03 Februari 2022	Pertajam Penyusunan LKIP 2021, Kanwil Kemenkumham Lampung Minta Pendampingan dari Tim Biro Perencanaan dan Itjen	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto, Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali serta Pelaksana
Kamis, 03 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Wilayah Semester II	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan; Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto
Kamis, 03 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pengolahan dan Analisis Data SIPKUMHAM	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kasubid Pengkajian, Penelitian, & Pengembang Hukum dan HAM, Susilowati
Jumat, 04 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Vaksinasi Booster Covid-19 Untuk Pegawai	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso; Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Jumat, 04 Februari 2022	Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum	Universitas Sumatera Utara	Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly
Senin, 07 Februari 2022	Plt. Kakanwil Lampung Ikuti Sosialisasi Juklak Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso
Senin, 07 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Launching Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso
Selasa, 08 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Entry Meeting BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2021	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas
Selasa, 08 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Audiensi Fattayat NU	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan.
Selasa, 08 Februari 2022	Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Resmi Membuka Rapat Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso
Selasa, 08 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Pembekalan Keimigrasian Bagi Personel Yonif 143/TWEJ Persiapan Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2022	Komando Resor Militer 043/ Gan	Kabid Perizinan & Informasi Keimigrasian, Imam Santoso
Selasa, 08 Februari 2022	"IKPA Awards" oleh DJPb Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung Raih Terbaik Kedua Capaian Nilai IKPA TA 2021	Kantor Pelayanan perpindahan	Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti
Selasa, 08 Februari 2022	Menkumham Berikan Pengarahan Analisis Hukum, Penyuluh Hukum, dan Pemberi Bantuan Hukum	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso; Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Rabu, 09 Februari 2022	Taat Pelaksanaan Administrasi Anggaran, Kantor Wilayah Lampung Gelar Rapat Pembahasan Implementasi Aplikasi SAKTI	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan
Rabu, 09 Februari 2022	Rapat Perdana di Tahun 2022, MPWN Provinsi Lampung Bahas 3 (tiga) Permasalahan dari MPDN Kota Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Kamis, 10 Februari 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyuluh Hukum Madya, Kadiviyankum: Tingkatkan Kinerja dan Terus Berinovasi	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Jumat, 11 Februari 2022	Telemedicine Kumham Menyapa, Sekjen Kemenkumham Serukan Slogan "Pulih Bersama dan Bangkit Bersama"	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso; Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Selasa, 15 Februari 2022	Tingkatkan Kualitas Pengadaan, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi SKP Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; Kasubag Keuangan, Arya Dwi Jayanti; Kasubag Kepegawaian, Yulinar Trisia;
Rabu, 16 Februari 2022	Menuju Perwujudan Akses Keadilan, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti OPini: "Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan"	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Nur Ichwan
Rabu, 16 Februari 2022	Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara dan Berbiaya Ringan	Kantor Wilayah Lampung	Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly

Kamis, 17 Februari 2022	Lakukan Langkah Antisipasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Rapid Antigen Covid-19 seluruh Pegawai	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan Santoso; Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Kamis, 17 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Pengamatan Wilayah Terhadap Potensi Pelanggaran KI Kab. Tulang Bawang	Kepolisian Resort Tulang Bawang	Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS; Penyuluh Hukum Madya, Muhammad Zuhri
Kamis, 17 Februari 2022	Serahkan Surat Hak Cipta Mars dan Himne KPK, Yasonna Tegaskan Prosesnya Cepat dan Tanpa Pungli		Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly
Jumat, 18 Februari 2022	Tingkatkan Layanan Disabilitas, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar FGD Pengembangan SOP Bagi Unit Layanan Disabilitas UPT Pemasyarakatan Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso.
Jumat, 18 Februari 2022	Sekjen Kembali Ingatkan Jajaran Dalam Telemedicine Kumham Menyapa: Terus Waspada, Taati prokes, dan Lakukan Vaksinasi!	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso.
Senin, 21 Februari 2022	22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Selasa, 22 Februari 2022	Karo Pengelolaan BMN: Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Setiap Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan
Rabu, 23 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti OPini Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Rabu, 23 Februari 2022	Tingkatkan PSHAM, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pokja PSHAM Bagi Penyandang Disabilitas Mental	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Rabu, 23 Februari 2022	Kunjungi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kab. Pesibar, Kanwil Kemenkumham Lampung Serahkan Bukti Pendaftaran IG Damar Mata Kucing	Dinas Ketahanan Pangan dan P	Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS
Rabu, 23 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Rencana Kerjasama Sentra KI dengan UIN Raden Intan Lampung	Universitas Islam Negeri Raden	Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS
Kamis, 24 Februari 2022	Tingkatkan Kualitas Perancang, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Kamis, 24 Februari 2022	Dukung Percepatan Pelayanan KI, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program unggulan Mobile Intellectual Property Clinic 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso
Kamis, 24 Februari 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Ke Polres Tubabar Terkait Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kepolisian Tulang Bawang Barat	Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS
Kamis, 24 Februari 2022	Pantau Mutu Layanan, Kanwil Lampung Adakan Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti-Korupsi	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Bidang HAM dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian Rugun Tresia
Jumat, 25 Februari 2022	Tingkatkan Efektifitas Kinerja Subbidang AHU, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Jumat, 25 Februari 2022	Tingkatkan Kinerja Divisi Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Pemenuhan Data Dukung Capaian Target Kinerja TA 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto
Jumat, 25 Februari 2022	Telemedicine Kumham Sehat Kumham Menyapa, Sekjen Himbau Kepada Seluruh Jajaran Untuk Percepat Vaksinasi Booster	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Iwan Santoso

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Selasa, 01 Maret 2022	Tindakanlanjuti Arahan Kakanwil, Tim Kantor Wilayah Lampung Laksanakan Monev Kualitas Layanan Publik dan Koordinasi Pemberitaan Media	Balai Pemasarakatan Metro, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Metro, Lembaga Pemasarakatan Metro dan Rumah Tahanan Negara Sukadana.	Kasubag Humas dan Tim IPK/IKM
Selasa, 01 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Sosialisasi Internal Terkait Pengelolaan Arsip Dinamis	Aula Kanwil Kemenkumham Lampung	Plt. Kepala Divisi Administrasi
Selasa, 01 Maret 2022	Dapat Penghargaan dari Presiden Rodrigo Duterte, Yasonna: Ini Surprise dan Menambah Energi Melayani Publik	Jakarta, Kemenkumham RI	Menkumham, Yasonna Laoly
Selasa, 01 Maret 2022	Kebijakan Keimigrasian di Masa Pandemi Dinilai Tepat, Menkumham Yasonna Laoly Raih Penghargaan dari Pemerintah Filipina	Jakarta, Kemenkumham RI	Menkumham, Yasonna Laoly
Rabu, 02 Maret 2022	Seminar Nasional Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Kadiviyankum: Jalankan Jabatan Profesi dengan Amanah, Profesional, dan Cermat	Ballroom Emersia Hotel dan Resort Bandar Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Jumat, 04 Maret 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Aula Kanwil Kemenkumham Lampung	Menkumham, Yasonna Laoly
Jumat, 04 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Itjen	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara
Senin, 07 Maret 2022	Kantor wilayah melakukan Koordinasi dengan Universitas Bandar Lampung kaitan rencana mobile intelektual property clinic (MIC) tahun 2022	Universitas Bandar Lampung (UBL)	Tim Sub bidang pelayanan Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Senin, 07 Maret 2022	Lakukan Antisipasi Covid-19, Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Paket Bantuan Barang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Seluruh Pegawai	Kanwil Kemenkumham Lampung	Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Rabu, 09 Maret 2022	Tingkatkan Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Secara Resmi Membuka Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Daerah	Ballroom Hotel Golden Tulip	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso.
Rabu, 09 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Webinar DJKI Bertema Sertifikasi Pusat Perbelanjaan dan E-Commerce Berbasis Kekayaan Intelektual	Kanwil Kemenkumham Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso.
Rabu, 09 Maret 2022	Optimis Raih Predikat WBK Tahun 2022, Kantor Wilayah Lampung Ikuti Workshop Pengisian dan Penilaian LKE ZI	Kanwil Kemenkumham Lampung	Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso.
Kamis, 10 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi dengan DJKI Bahas IG Damar Mata Kucing Pesisir Barat	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara serta pelaksana Sub Bidang Kekayaan Intelektual
Kamis, 10 Maret 2022	Tindakanlanjuti Permohonan Penyidik Polda Lampung, MKNW Klarifikasi 4 Notaris	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan
Jumat, 11 Maret 2022	Percepat Integrasi JDIH, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Provinsi Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia O.P.; Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, & JDIH, Doni Arianto
Jumat, 11 Maret 2022	Edi Kurniadi Resmi Jabat Kakanwil Kemenkumham Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.
Minggu, 13 Maret 2022	Bidik Seluruh Target, Menkumham Yasonna Juarai Danpaspampres Cup 2022	Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Senin, 14 Maret 2022	Bina Mental dan Rohani, Kadiv Administrasi Gelar Pengajian di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan
Senin, 14 Maret 2022	Kunjungan ke Kanim Balam, Kakanwil Kemenkumham Lampung: Pastikan Percepatan Pelayanan Publik	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.
Selasa, 15 Maret 2022	Tinjau Vaksinasi WBP di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Kakanwil Optimis Warga Binaan Pemasarakatan Lampung Tervaksinasi 100%	Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.
Selasa, 15 Maret 2022	Jaga Efektifitas Kinerja Pemasarakatan, Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Monev dan Penguatan Petugas Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Kota Agung	Rutan Kelas IIB Kota Agung.	Kepala Divisi Pemasarakatan (Kadiv Pas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Farid Junaedi
Selasa, 15 Maret 2022	Rapat Internal Bersama Fungsional Perancang Perundang-undangan, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Inginkan Persamaan Persepsi	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha
Selasa, 15 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Sosialisasi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha
Rabu, 16 Maret 2022	Menkumham Yasonna Laoly: Notaris Harus Jujur dan Turut Cegah Pencucian Uang	Jakarta, Kemenkumham RI	Menkumham, Yasonna Laoly
Rabu, 16 Maret 2022	Kakanwil Lampung Sambut Kedatangan Direktur Jenderal AHU	Bandara Radin Intan II Provinsi lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Rabu, 16 Maret 2022	Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia	Jakarta, Kemenkumham RI	Menkumham, Yasonna Laoly
Kamis, 17 Maret 2022	Tenis Meja Jadi Olahraga Sore, Dirjen AHU dan Kadiv Pemasarakatan Unjuk Keahlian	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, Kadivpas Lampung, Kalapas Kelas I Bandar Lampung;
Kamis, 17 Maret 2022	Kunjungi Lapas Kelas I Bandar Lampung, Dirjen Ahu Saksikan Pelatihan Barista dan Pembuatan Roti "Raja Bakery"	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, Kadivpas Lampung, Kalapas Kelas I Bandar Lampung;
Kamis, 17 Maret 2022	Gandeng KPP Bea dan Cukai serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto
Kamis, 17 Maret 2022	Dirjen AHU Berikan Penguatan Pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar; Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Sabtu, 19 Maret 2022	Kadiv Administrasi Kemenkumham Lampung Kunjungi Rutan Kruki	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kruki.	Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan
Senin, 21 Maret 2022	Menkumham: Tingginya Kesadaran Hukum Sangat Mendukung Iklim Investasi	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Menkumham, Yasonna Laoly

Senin, 21 Maret 2022	Hadiri Penandatanganan PKS di Lapas Gunung Sugih, Edi Kurniadi: Lanjutkan Sinergitas dengan Stakeholder	Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Gunung Sugih	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Senin, 21 Maret 2022	Rakor Pelaporan Aksi HAM, Kakanwil Optimis Seluruh Kabupaten/Kota di Lampung Sabet Predikat Peduli HAM Tahun 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Senin, 21 Maret 2022	Bupati Lampung Tengah Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Lampung Beserta Rombongan	Rumah Dinas (Nuwo Balak) Bupati Lampung Tengah	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Senin, 21 Maret 2022	Pimpin Apel Perdana, Kakanwil Kemenkumham Lampung Ingin Kinerja yang "Semakin PASTI"	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.
Senin, 21 Maret 2022	Jaga Efektifitas Pelaksanaan Program Kinerja Kanim Kelas III Non TPI Kotabumi, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Monitoring dan Evaluasi	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara
Senin, 21 Maret 2022	Ajukan kenaikan kelas kanim Kelas III Non TPI Kotabumi, Tim Kelembagaan Roren Lakukan Peninjauan Langsung dan Validasi Data	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara
Senin, 21 Maret 2022	Biro Perencanaan Gelar Monev Kelembagaan bersama Satker Jajaran Kanwil Lampung, Bahas Tata Organisasi UPT Pemasarakatan ke Arah yang Lebih Baik	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Mulyawandari; Analisis Kelembagaan Niken Desvita Sari dari Biro Perencanaan Sekjend Kemenkumham RI
Selasa, 22 Maret 2022	Tingkatkan Kualitas Penyuluh Hukum, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai
Rabu, 23 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Notaris Pengganti	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi.
Rabu, 23 Maret 2022	Pererat Sinergi, Kakanwil Kemenkumham Lampung Audiensi Dengan Kapolda	Kepolisian Daerah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Rabu, 23 Maret 2022	Sinergi dalam Penegakan Hukum, Kakanwil Kemenkumham Lampung Audiensi dengan Kajati Lampung	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Rabu, 23 Maret 2022	Gelar Rakor Timpora, Kanwil Kemenkumham Lampung Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pengawasan Orang Asing	Ruang Pertemuan Solideo, Hotel Grand Anugerah, Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Kamis, 24 Maret 2022	2022 Sebagai Tahun Hak Cipta, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi Hak Cipta	Swiss-Bell Hotel Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Kamis, 24 Maret 2022	Tingkatkan Kinerja, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pembinaan Satgas Keamanan dan Ketertiban UPT	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi. Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi
Kamis, 24 Maret 2022	Dukung Pelaksanaan P2HAM, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	Kanwil Kemenkumham Lampung	Plt. Kepala Bidang HAM, Rugun Tresia OP; Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan
Kamis, 24 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Audiensi dan Koordinasi KPK	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung; Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK, Andy Purwana
Kamis, 24 Maret 2022	Kemenkumham Terima Hibah 8 Mobil Rampasan KPK, Yasonna: Untuk Tingkatkan Layanan Publik	Gedung KPK, Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly; Ketua KPK Firlil Bahuri
Kamis, 24 Maret 2022	Yasonna Akan Temui WNI yang Stateless di Filipina dan Berikan Paspor RI	The Westin Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Jumat, 25 Maret 2022	Kadiv Pemasarakatan Pimpin Proses Pemindahan 9 Narapidana ke Lapas di Wilayah Nusakambangan	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi, Kepolisian Daerah Lampung
Jumat, 25 Maret 2022	Kunjungi Lapas Metro, Kepala Kantor Wilayah Lampung Tinjau Langsung Kegiatan Kerja dan Industri Unggulan	Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Metro	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Kalapas Metro, Mulyana
Jumat, 25 Maret 2022	Bertemu Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna Laoly Tegaskan Perlindungan Warga Terdaftar Indonesia dan Penguatan Kerja Sama Hukum	Jakarta, Kemenkumham RI	Menkumham, Yasonna Laoly; Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra
Minggu, 27 Maret 2022	Sah, Yasonna Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina	Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.	Menkumham, Yasonna Laoly;
Senin, 28 Maret 2022	Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Lampung Inventarisir Mal di Wilayah Lampung	Mall Ciplaz Lampung	Tim Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Senin, 28 Maret 2022	Pimpin Apel, Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Semangat Untuk Terus Bekerja Secara Efektif dan Efisien	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung Pejabat Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Madya dan seluruh pegawai

Senin, 28 Maret 2022	Jaga Sinergitas Kinerja, Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Rapat Koordinasi	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Pejabat Administrator dan Pengawas
Senin, 28 Maret 2022	Sukseskan Penilaian KKP HAM Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung; Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK, Andy Purwana
Senin, 28 Maret 2022	Perkuat Kapasitas Notaris Awasi Pencucian Uang, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Dr. Alpius Sarumaha
Selasa, 29 Maret 2022	Ikuti Sosialisasi Pengembangan Aplikasi ERB, Kanwil Kemenkumham Lampung Siap Evaluasi ZI Satker	Kanwil Kemenkumham Lampung	operator Aplikasi ERB
Selasa, 29 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Konsultasi Percepatan Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kasubag Keuangan, Arya Dwi Jayanti beserta JFU dan JFT Keuangan & BMN Kanwil Kemenkumham Lampung
Selasa, 29 Maret 2022	Tingkatkan Kualitas Perda, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti FGD Pembentukan Perda Oleh Ditjen PP	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP, Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Masriakromi
Selasa, 29 Maret 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Tinjau Langsung Vaksinasi Booster WBP Lapas Perempuan	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung, Kalapas Perempuan Lampung
Selasa, 29 Maret 2022	Lakukan Pendampingan Penerapan MR, Tim Inspektorat Jenderal Kunjungi Bapas Metro	Bapas Kelas II Metro	Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Arlisa Noviriantono, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali
Selasa, 29 Maret 2022	Wujudkan Sinergi yang Saling Memberikan Manfaat, Kepala Kantor Wilayah Lampung Terima Kunjungan dan Audiensi TASPEN KC Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung, Branch Manager TASPEN KC Bandar Lampung, Daniel P. Panggabean
Rabu, 30 Maret 2022	Kakanwil Kumham Lampung Saksikan Penyerahan Panggung Hiburan Rakyat Oleh Lapas Kotabumi Kepada Pemkab Lampung Utara	Lapas Kelas IIB Kotabumi	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung, Kalapas Kotabumi; Staf Ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik Pemkab Lampung Utara, Adrie
Rabu, 30 Maret 2022	"5 Potensi Risiko", Itjen Berikan Pendampingan Penyusunan Dokumen MR di Kanim Kalianda	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Kanim Kalianda, Sargiyono
Rabu, 30 Maret 2022	Sambut Ramadhan, PPNPN Kanwil Kemenkumham Lampung Kerja Bakti Bersihkan Mushola dan Lingkungan Kantor	Kanwil Kemenkumham Lampung	Tim PPNPN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Rabu, 30 Maret 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Sambut Hangat Audiensi dan Kerjasama Universitas Malahayati Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha; Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati
Rabu, 30 Maret 2022	Eratkan Tali Persaudaraan, Pesan Kepala Kantor Wilayah pada Puncak Pekan Olahraga dan Seni Pemasarakatan di Lapas Gunung Sugih	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Rabu, 30 Maret 2022	Kepala Kantor Wilayah Lampung Resmi Membuka Turnamen Futsal dan Lomba Karaoke di Lapas Gunung Sugih	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Lampung
Kamis, 31 Maret 2022	Mengakhiri Kunjungan Kerja ke Bapas Metro dan Kanim Kalianda, Tim Itjen Berikan Penguatan Penyelenggaraan SPIP di Kanwil Kemenkumham Lampung	Kanwil Kemenkumham Lampung	Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali
Kamis, 31 Maret 2022	Kunjungan Kerja ke Kotabumi, Kakanwil Lampung Sambangi Kanim, Rutan, dan Rubasan Kotabumi	Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Rutan Kelas IIB Kotabumi dan Rubasan Kelas II Kotabumi	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan
Kamis, 31 Maret 2022	Hadiri Sertijab dan Pisah Sambut Kalapas Kotabumi, Kepala Kantor Wilayah Lampung Berpesan untuk Membina Warga Binaan dengan Memanusiakan Manusia	Lapas Kelas IIA Kotabumi	Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi; Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi
Kamis, 31 Maret 2022	Revisi UU Narkotika, Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice	Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly;
Kamis, 31 Maret 2022	Rapat Persiapan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Jumat, 01 April 2022	Terima SK, CPNS 2021 Kumham Lampung : Kami Bersyukur dan Siap Untuk Mengabdikan	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Kabag Umum, CPNS
Jumat, 01 April 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Berikan Arahan Pada 74 CPNS TA. 2021	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Kabag Umum, CPNS
Jumat, 01 April 2022	Raut Bahagia Para CPNS Terpancar Saat Kakanwil Kumham Lampung Serahkan SK Secara Simbolis	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Kabag Umum, CPNS
Jumat, 01 April 2022	Kakanwil Pertegas Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Terkait Arahan Sekjen Pada Apel Kesiapan Tugas	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Seluruh Pegawai
Jumat, 01 April 2022	Dukung Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan, Kanwil Lampung Ikuti Sosialisasi Format dan Aplikasi Pelaporan dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI	Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Staf Program dan Pelaporan
Jumat, 01 April 2022	Kadiv Yankum Jelaskan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah pada Rakor Antar Instansi Perangkat Daerah	Hotel Radisson	Kadiv yankum dan Pemda
Jumat, 01 April 2022	Seminar Penyuluhan Hukum KemenkopUKM, Kadiv Yankum Ajak Masyarakat Mengenal Perseroan Perorangan	Hotel Horison	Kadiv yankum, Kemenkop UKM dan Masyarakat
Jumat, 01 April 2022	Sambut Bulan Suci Ramadhan, Sekjen Pimpin Apel Kesiapan Tugas Seluruh Jajaran Kemenkumham	Sekretaris Jendral, Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Sekjen, Kakanwil, Kepala Divisi dan Seluruh Pegawai
Sabtu, 02 April 2022	Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Ajak Warga Binaan Lapas Bandar Lampung Jadikan Ramadhan Tahun Ini Sebagai Momentum Perbaikan Diri	Lapas Bandar Lampung	Kakanwil, Pegawai Lapas Bandar Lampung, Warga Binaan
Senin, 04 April 2022	Kakanwil Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan Anggota MPDN Kab. Lampung, Way Kanan, Lambar, dan Pesibar	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadiv yankum, Kabag Umum, Anggota MPDN
Senin, 04 April 2022	Menjadi ASN Berakhlak, Irjen Tanamkan Budaya Kerja Berintegritas pada Orientasi CPNS Kemenkumham Tahun 2021	Aula Kantor Wilayah Lampung	Irjen dan CPNS
Senin, 04 April 2022	Perkuat Sinergi dengan Stakeholder, Kanwil Kemenkumham Lampung Sambut Baik Kunjungan Audiensi BRI	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivmin, Pihak BRI
Senin, 04 April 2022	Kakanwil Kumham Lampung Ikuti Arahan Sekretaris Jenderal Dalam Pembukaan Orientasi CPNS Tahun 2022	Aula Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Kakanwil, Kadivmin, Kadiv yankum, CPNS
Senin, 04 April 2022	Buka Orientasi CPNS Kemenkumham secara Serentak, Sekjen: Berikan Pengabdian Terbaik!	Aula Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Sekjen, Kakanwil, Kepala Divisi dan CPNS
Selasa, 05 April 2022	Tanamkan Integritas CPNS 2021, Kadivpas Ingin Tunas Pengayoman Bermanfaat Bagi Kemenkumham	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas, CPNS
Selasa, 05 April 2022	Beri Pembekalan Orientasi CPNS Tahun 2022, Kadivmin : Pedoman Tata Nilai "PASTI"	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, CPNS
Selasa, 05 April 2022	Melayani Bukan Dilayani, Kakanwil Tegaskan Tugas ASN pada Orientasi CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, CPNS
Selasa, 05 April 2022	Orientasi CPNS Hari Ke-2, Kadivmin Soroti Kelengkapan Pakaian Para CPNS	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, CPNS
Rabu, 06 April 2022	Movev Kegiatan Selama Ramadhan, Kakanwil Beserta Pimti Kunjungi Lapas Bandar Lampung	Lapas Bandar Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Pegawai Lapas
Rabu, 06 April 2022	Tebarkan Semangat dan Optimisme, Kadivmin Ajak Peserta Orientasi CPNS Mengenal Keimigrasian	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, CPNS
Rabu, 06 April 2022	Perkuat Komunikasi, Kakanwil Kumham Lampung Diskusi Dengan Para Pimti	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi
Rabu, 06 April 2022	Hadiri Sertijab Plt. Karubasan Metro, Kakanwil Kemenkumham Lampung Berpesan untuk Jalankan Amanah Jabatan dengan Sebaik-baiknya	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Plt Karubasan Metro
Rabu, 06 April 2022	Kadiv Yankum Beri Pembekalan Tusi Divisi Yankum dan HAM pada Orientasi CPNS Tahun 2022	Aula Kantor Wilayah Lampung	Kadiv yankum dan CPNS
Kamis, 07 April 2022	Silaturahmi, Tim Kanwil Kemenkumham Lampung Bertamu ke Dir. TI Ditjen AHU	Direktorat Jendral AHU, Jakarta	Dir. TI Ditjen AHU, Kasubbag Humas, RB, TI
Kamis, 07 April 2022	Kadiv yankum Lakukan Koordinasi dengan Direktur Tata Negara	Direktorat Jendral AHU, Jakarta	Dir. Tata Negara Dirjen AHU, Kadiv yankum, Plt. Kabid Pelayanan Hukum
Kamis, 07 April 2022	Bahas Kenotariatan, Kadiv yankum Koordinasi ke Dit. Perdata Ditjen AHU	Direktorat Jendral AHU, Jakarta	Dir. Perdata Dirjen AHU, Kadiv yankum, Plt. Kabid Pelayanan Hukum
Kamis, 07 April 2022	Kadiv Yankumham Pimpin Rapat Pleno Harmonisasi Raperda Kab. Lampung Tengah Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Late TV	Sekda Kabupaten Lampung Tengah	Sekda Lamteng, Kadiv yankum dan Staff
Kamis, 07 April 2022	Kepala Divisi Pemasarakatan Pimpin Apel Pagi Dan Salam Pemasarakatan Di Lapas Kotabumi	Lapas Kotabumi	Kadivpas dan Pegawai Lapas Kotabumi
Minggu, 10 April 2022	Kemenkumham Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan Pemasarakatan dan Imigrasi tahun 2022	Seluruh Indonesia	Kemenkumham
Senin, 11 April 2022	Kunjungi LPP Bandar Lampung, Kepala Kantor Wilayah Berpesan untuk Tetap Jaga Produktivitas Meski dalam Keadaan Menahan Lapar Dahaga	LPP Bandar Lampung	Kakanwil dan Warga Binaan
Senin, 11 April 2022	Beri Penguatan di LPP Bandar Lampung, Kakanwil Kumham Lampung Juga Wakafkan Alquran kepada Warga Binaan di Bulan Suci Ramadhan	LPP Bandar Lampung	Kakanwil dan Warga Binaan
Senin, 11 April 2022	Kakanwil dan Para Pimti Ikuti Musrenbang Penyusunan RPKD Provinsi Lampung Tahun 2023 Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Kakanwil, Kepala Divisi dan Forkopimda
Senin, 11 April 2022	Tegaskan Kedudukan Kanwil Kemenkumham Lampung, Kadiv Yankumham Berikan Arahan tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda	Kantor Wilayah Lampung	Kadiv yankum, JFT Suncang
Senin, 11 April 2022	Bekerja dengan Baik dan Berikan Pelayanan Terbaik, Arahan Kakanwil pada Jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Divisi Imigrasi
Selasa, 12 April 2022	Saat Yasonna Menyerap Suara Anak Muda, dan Dorong Kemajuan Kreativitas	Medan	Yasonna, UMKM
Selasa, 12 April 2022	Rencanakan Optimalisasi dan Perbaikan, Kepala Divisi Administrasi Periksa Keadaan Bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, JFU/JFT Barjas, BMN

Selasa, 12 April 2022	Petakan Strategi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2022, Kanwil Kumham Lampung Ikuti Pembahasan dan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	Kantor Wilayah Lampung	Bag Program dan Humas
Rabu, 13 April 2022	Libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham: Cegah Deteni dan Warga Binaan Pemasarakatan Kabur	Jakarta, Sekjen	Sekjen
Rabu, 13 April 2022	Menkumham Beri Apresiasi Kepada Seluruh Gubernur di Pulau Sumatera Atas Kontribusinya Memacu Kekayaan intelektual	Medan	Menkumham
Rabu, 13 April 2022	Melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual, Menkumham Ajak Gubernur di Seluruh Pulau Sumatera Untuk Dorong Potensi Inovasi dan Kreativitas Daerah	Medan	Menkumham
Rabu, 13 April 2022	Bincang Hangat, Kakanwil Lampung dan Gubernur Sumatera Utara Pada Acara Roving Seminar KI	Medan	Kakanwil, Kadivyanhum, Gubernur Sumut
Rabu, 13 April 2022	Wagub Lampung Terima Penghargaan atas Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dari Menkumham	Lampung	Kakanwil, Wagub Lampung
Kamis, 14 April 2022	Perdana, IPKEMINDO Lampung Gelar Lomba Public Speaking antar Pembimbing Kemasyarakatan	Grand Praba, Lampung	Kadivpas, JFT Pembimbing Kemasyarakatan
Minggu, 17 April 2022	Pastikan Aman dari Gangguan Kamtib, Kakanwil bersama Kodim Lamsel Lakukan Monev di Lapas Kalianda	Lapas Kalianda	Kakanwil, Kodim Lamsel
Senin, 18 April 2022	Tingkatkan Efektivitas Pembinaan Notaris, Kadiv Yankumham Laksanakan Koordinasi dengan Pengda INI Tulang Bawang, Tubaba dan Mesuij	Tulang Bawang	Kadivyanhum, Ikatan INI
Senin, 18 April 2022	Apa Kita Sudah Melaksanakan Tusi dengan Baik? Kakanwil Beri Penguatan Jaringan Pemasarakatan dan Keimigrasian se-Lampung Utara	Rutan Kotabumi	Jajaran Pemasarakatan Lampung Utara
Senin, 18 April 2022	Bahas Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Talkshow di Radio Rajawali	Radio Rajawali Lampung	Subag Kekayaan Intelektual
Selasa, 19 April 2022	Monev sebagai penguatan tugas/fungsi dan sarana silaturahmi antar satu sama lain di Lapas IIB Waykanan	Lapas Waykanan	Kakanwil, Seluruh Pimti, Seluruh Pegawai Lapas Waykanan
Selasa, 19 April 2022	Peran Penting Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum, Kakanwil beri penguatan di Bapas Kotabumi	Bapas Kotabumi	Kakanwil, Pegawai Bapas Kotabumi, JFT PK
Selasa, 19 April 2022	Kanwil Lampung Tempati Peringkat Pertama Perolehan IKPA Triwulan I Tahun 2022, Kadivmin : Jadikan Motivasi Untuk Pertahankan Hingga Akhir Tahun	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Umum
Rabu, 20 April 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti, Edi Kurniadi: Jaga Sikap, Tingkah Laku, dan Kehormatan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kadivyanhum, Notaris
Rabu, 20 April 2022	PIPAS Lampung Ikuti Upacara Tabur Bunga Peringati Hari Bhakti Pemasarakatan Ke-58	Makam Pahlawan	PIPAS
Rabu, 20 April 2022	Hari Bakti Pemasarakatan Ke 58, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Upacara dan Tabur Bunga	Makam Pahlawan	Kakanwil, PIMTI, ASN Kemenkumham Lampung
Rabu, 20 April 2022	"Perlindungan Hak Cipta dan Manfaat Aplikasi POP-HC", Kanwil Kemenkumham Lampung Kembali Gelar Dialog Eksklusif	Grahan Pena	Subag Kekayaan Intelektual, Radar TV
Rabu, 20 April 2022	Kadiv Yankum Terima Kunjungan Balitbangkumham Terkait Monev Hasil Survey IKM-IPK Triwulan I Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Balitbangkumham
Rabu, 20 April 2022	Kunjungi Kanwil Lampung, Balitbangkumham Lakukan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Monitoring Survei IKM-IPK dan Integritas	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Balitbangkumham
Kamis, 21 April 2022	Monev Lapas Kalianda, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Salurkan Bantuan kepada UMKM Sekaligus Resmikan Ruang Pelayanan Publik	Lapas Kalianda	Kakanwil dan Kepala Divisi
Jumat, 22 April 2022	Monev UPT Pemasarakatan se-Kota Metro, Kakanwil: Deteksi dini, Berantas Narkoba, Maksimalkan Pelayanan bagi Masyarakat dan WBP	UPT Metro	Kakanwil dan Kepala Divisi
Jumat, 22 April 2022	Kunjungi Lapas Metro, Kakanwil Lampung Resmikan Aula Usman Pokok Ratu dan Lapangan Teknis Metlas 24	Lapas Metro	Kakanwil dan Pegawai Lapas Metro
Jumat, 22 April 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimti di Lingkungan Kemenkumham, Kabag. Umum Promosi Kadivyanhum	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil dan Kepala Divisi
Senin, 25 April 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Pada Mall Boemi Kedaton	Mall Boemi Kedaton	Subag Kekayaan Intelektual
Senin, 25 April 2022	Monev ke LPKA, Kakanwil Lampung Pesankan "Puasa Bukan Penghalang Untuk Bekerja Produktif"	LPKA Bandar Lampung	Kakanwil dan Kepala Divisi
Senin, 25 April 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Buka Secara Resmi Sosialisasi Penyusunan SKP dan Penerapan Hukuman Disiplin	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil
Selasa, 26 April 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Apresiasi Dedikasi Pegawai Lapas Kelas IIB Kota Agung dalam berkinerja	Lapas Kota Agung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Pegawai Lapas Kotaagung
Selasa, 26 April 2022	Potong Tumpeng Peringati HBP Ke-58, Kakanwil : Junjung Tinggi Nilai Luhur Pemasarakatan	Lapas Kota Agung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Pegawai Lapas Kotaagung
Selasa, 26 April 2022	Petugas Pemasarakatan sebagai Pembina dan Pengayom bagi WBP, Arahan Kakanwil dalam Monev Lapas Kota Agung	Lapas Kota Agung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Pegawai Lapas Kotaagung
Rabu, 27 April 2022	Kakanwil dan Bupati Lamtim Saksikan Penyerahan Penghargaan P4GN Rutan Sukadana oleh BNN	Rutan Sukadana	Kakanwil, Bupati Lamtim, Karutan Sukadana
Rabu, 27 April 2022	Tingkatkan Kebersamaan, Kakanwil ikuti Kultum dan Buka Bersama di Rutan Sukadana	Rutan Sukadana	Kakanwil, Bupati Lamtim, Karutan Sukadana
Rabu, 27 April 2022	Didampingi Bupati Lampung Timur, Kakanwil Kemenkumham Lampung lakukan Monev Rutan Sukadana	Rutan Sukadana	Kakanwil, Bupati Lamtim, Karutan Sukadana
Kamis, 28 April 2022	Jaga IPK IKM, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Monev Pada 3 UPT Pemasarakatan	Rutan Menggala, Lapas Gunung Sugih	Kabid Hukum, Kasubid Pemajuan HAM, JFT Penyuluh
Kamis, 28 April 2022	Penghujung Bulan Ramadhan, Kakanwil Lakukan Monev Rutan Sukadana dan Manggala	Rutan Sukadana	Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Pemasarakatan
Jumat, 29 April 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung merespon Apel Siaga dan Mudik Bareng Kemenkumham "Mudik Sehat Dan Aman"	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil
Jumat, 29 April 2022	Kakanwil Lampung Sambut Peserta Mudik di Kantor Wilayah	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	Keterangan
Senin, 02 Mei 2022	Rayakan Hari Kemenangan, 4.976 Warga Binaan Lapas, Rutan, & LPKA Wilayah Lampung Dapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1443 H	Lapas Bandar Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, Kalapas
Senin, 02 Mei 2022	Pastikan Aman, Kakanwil Lampung Edi Kurniadi Tinjau Kesiapan Menyambut Lebaran Di Lapas Narkotik, Lapas Perempuan, dan Rutan Bandar Lampung	LPP, Lapas Narkotik, Rutan Bandar Lampung	Kakanwil, Kadivmin, KaUPT
Jumat, 06 Mei 2022	Lepas Kontingen Kempo ke Tunisia, Yasonna Yakin Indonesia Raih Banyak Medali	Jakarta	Yasonna
Senin, 09 Mei 2022	"Pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Menkumham Menyapa Jajaran Kantor Wilayah"	Jakarta	Yasonna
Senin, 09 Mei 2022	Respon Cepat Arahan Menkumham, Kakanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Koordinasi Anggaran Bersama Jajaran	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, Seluruh Pegawai UPT
Senin, 09 Mei 2022	Kembali Fitri Kembali Semangat Bekerja, Menkumham Bersama Jajaran Ikuti Apel Pagi dan Halal Bihalal Secara Virtual	Jakarta	Seluruh ASN Kemenkumham
Senin, 09 Mei 2022	Usai Libur Idul Fitri, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Kerja Melayani Publik	Jakarta	Seluruh ASN Kemenkumham
Senin, 09 Mei 2022	Jalin Silaturahmi dan Saling Memaafkan, Kanwil Lampung Apel Perdana & Halal Bihalal	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh ASN Kemenkumham Lampung
Senin, 09 Mei 2022	"Halal Bihalal 1 Syawal 1443 Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM", Menkumham: Setelah Kita Saling Bermaafan, Saatnya Kita Kembali Fokus Bekerja	Jakarta	Seluruh ASN Kemenkumham
Selasa, 10 Mei 2022	Jalin Sinergitas Bersama Media, Kakanwil Ingin Kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung Dapat Dipantau Masyarakat	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, Kabag Program dan Humas, Media Partner
Selasa, 10 Mei 2022	Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Kegiatan Sosialisasi Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Imigrasi dan Jajaran Imigrasi Kanwil Lampung
Rabu, 11 Mei 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung perkuat Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Terkait Tugas dan Fungsi	Mahan Agung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Gubernur Lampung
Rabu, 11 Mei 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung dan UPT Jajaran Perkuat Koordinasi Internal	Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, Kepala UPT
Rabu, 11 Mei 2022	Audiensi Gubernur Lampung, Kakanwil Bahas Lapas/Rutan/Kanim Hingga Kabupaten/Kota Peduli HAM	Mahan Agung	Kakanwil, Kepala Divisi dan Gubernur Lampung
Kamis, 12 Mei 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung ikuti Serah Terima Jabatan dan Wisuda Purna Bhakti Pengayoman Dirjen PP	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum
Kamis, 12 Mei 2022	Tim Yankomas Beraksi, Kadiv Yankum Kanwil Lampung Terima Penyampaian Pengaduan Kelompok Pedagang	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Kabid Hukum, Tim Yankomas
Kamis, 12 Mei 2022	Ikuti Rapat Koordinasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Lampung Siap Bertugas Sebagai Penghubung Teknis Pengukuran IRH pada Pemerintah Daerah	Kantor Wilayah Lampung, Virtual	Kabid Hukum
Jumat, 13 Mei 2022	Tim Subbid Pelayanan KI Kanwil Kemenkumham Lampung Kunjungi Direktorat Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa DJKI	DJKI, Jakarta	Tim Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual
Jumat, 13 Mei 2022	Lakukan Koordinasi ke DJKI, Kadivyanhum Ingin Pendaftaran Indikasi Geografis Wilayah Lampung terselesaikan	DJKI, Jakarta	Kadivyanhum, TIM Pelayanan KI
Jumat, 13 Mei 2022	Bahas "Damar Mata Kucing Pesisir Barat", Kadivyanhum Kemenkumham Lampung Koordinasi ke Direktur Merek dan Indikasi Geografis	Jakarta	Kadivyanhum, TIM Pelayanan KI
Selasa, 17 Mei 2022	Siapkan SDM Unggul, Kadiv Yankum Gelar Rapat Koordinasi Penilaian JFT Perancang Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, JFT Perancang
Selasa, 17 Mei 2022	22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi Laksanakan Penandatanganan Perubahan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum, OBH
Selasa, 17 Mei 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Rapat Bersama 22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi Provinsi Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum, OBH
Rabu, 18 Mei 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Kegiatan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Daerah	Novotel, Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum, JFT Suncang
Rabu, 18 Mei 2022	Dukung Peningkatan Kualitas JFT Perancang, Kakanwil Kemenkumham Lampung Buka Bimtek Perancangan Peraturan Daerah	Novotel, Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum, JFT Suncang
Rabu, 18 Mei 2022	Gelar Sosialisasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Usung Tema Perseroan Perorangan Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Lampung	Novotel, Lampung	Kadivyanhum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 18 Mei 2022	Kakanwil Edi Kurniadi Buka Secara Resmi Sosialisasi Layanan AHU Tentang Perseroan Perorangan	Novotel, Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 19 Mei 2022	Audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Kanwil Lampung, disambut baik oleh Kakanwil	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivmin, Kadivyanhum, Ikatan Notaris Lampung
Kamis, 19 Mei 2022	Perkuat Kordinasi, Kanwil Kemenkumham Lampung menerima kunjungan Kepala Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kamis, 19 Mei 2022	Bangun Masyarakat Cerdas Hukum, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 19 Mei 2022	Dukung Penegakan Supremasi Hukum, Kakanwil Kemenkumham Lampung Resmi Buka Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kadivyanhum
Jumat, 20 Mei 2022	Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkumham Lampung Sambangi Pusat Perbelanjaan di Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Tim Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual
Jumat, 20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 114 Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung serukan "AYO BANGKIT BERSAMA"	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung

Jumat, 20 Mei 2022	Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi, Plt. Kabag Umum Kanwil Lampung beri arahan kepada PPNPN	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kabag Umum dan PPNPN
Jumat, 20 Mei 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 Bersama di Lapangan Korpri Pemprov Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kabag Umum
Jumat, 20 Mei 2022	Gelorakan 114 Tahun Kebangkitan Indonesia, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Minggu, 22 Mei 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Undangan Pengwil Lampung INI dalam rangka Halal Bihalal "Bersihkan Hati.. Eratkan Silaturahmi"	Ballroom Emersia Hotel	Kakanwil dan Seluruh Kepala Divisi
Senin, 23 Mei 2022	Pembinaan Pengelolaan PNPB Serta Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan DIPA KI, Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Kunjungan Tim DJKI	Kantor Wilayah Lampung	Kadiviyankum, Kasubid KI, dan TIM DJKI
Senin, 23 Mei 2022	Jaga Indeks Tata Kelola Pengadaan, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Evaluasi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Subid Keuangan dan BMN
Senin, 23 Mei 2022	Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Gubernur Lampung Apresiasi Pelayanan Petugas Keimigrasian	Kanim Bandar Lampung	Kadivim dan Gubernur Lampung
Senin, 23 Mei 2022	Pimpin Rapat Koordinasi, Kakanwil Ingatkan Pejabat Administrator dan Pengawas Untuk Selalu Meningkatkan Kinerja	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Kepala Divisi, dan Pejabat Administrator
Senin, 23 Mei 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiviyankumham Tegaskan Pentingnya Kedisiplinan dan Laksanakan Tarja dengan Baik	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Selasa, 24 Mei 2022	TPI Evaluasi Pembangunan ZI Satker Kanwil Kemenkumham Lampung, Kadivmin: Dampingi dan Persiapkan Kegiatan Evaluasi TPI	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Pejabat Administrator dan TIM TPI WBK
Selasa, 24 Mei 2022	Terapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Oleh Notaris, Tim Joint Audit Kepatuhan Lakukan Rapat Koordinasi dan Pra Audit	Kantor Wilayah Lampung	Kadiviyankum, Notaris, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 25 Mei 2022	Jelang Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Oleh TPI, Kakanwil Edi Kurniadi: Mindset, Budaya Kerja, dan Pimpinan Sebagai Role Model Jadi Poin Utama	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Seluruh Kepala Divisi dan TPI WBK
Rabu, 25 Mei 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Serah Terima Jabatan Kakanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Kanim Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Kanim Bandar Lampung
Rabu, 25 Mei 2022	Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan, Kanwil Lampung gelar Rakor MPW dan MPD Notaris se-Lampung Tahun 2022	Novotel, Lampung	Kepala Kantor Wilayah, MPW dan MPDN
Jumat, 27 Mei 2022	Pimpin Entry Meeting Evaluasi TPI dalam Pembangunan ZI, Kadiv Administrasi Berharap Satker Siap WBK/WBBM	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Program dan Humas, KaUPT dan Jajaran
Jumat, 27 Mei 2022	Wujudkan Kepastian Hukum, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Perda	Kantor Wilayah Lampung	Kabid Hukum dan JFT Suncang
Jumat, 27 Mei 2022	Tindak Lanjuti Permohonan Pendaftaran IG Damar Mata Kucing Kab. Pesibar, Kadiviyankum Bahas Dokumen Deskripsi, MPIG, dan Peta Wilayah	Kabupaten Pesisir Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan TIM Subidang Kekayaan Intelektual
Sabtu, 28 Mei 2022	Desk Evaluasi Oleh TPI, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Terima Pujian " Siap WBK "	Lapas Perempuan Bandar Lampung	TIM TPI ZI dan Jajaran Lapas Perempuan Bandar Lampung
Sabtu, 28 Mei 2022	Mengawali Evaluasi di Lingkungan Kanwil Lampung, TPI Apresiasi Sejumlah Inovasi Layanan Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kanim Bandar Lampung	Tim TPI ZI dan Jajaran Lapas Kelas I Bandar Lampung
Senin, 30 Mei 2022	Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK Oleh TPI, TPI Harapkan Kesesuaian Data Dukung E-RB Secara Aktual	Rutan Kotabumi	Tim TPI ZI dan Jajaran Rutan Kotabumi
Senin, 30 Mei 2022	TPI Lakukan Desk Evaluasi Di Bapas Kotabumi, Fasilitas Pelayanan Yang Dimiliki Bapas Dinilai Baik	Bapas Kotabumi	Tim TPI ZI dan Jajaran Bapas Kotabumi
Senin, 30 Mei 2022	Menuju Desk Evaluasi TPI, Kadiv Keimigrasian Berikan Penguatan Kepada Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Kanim Bandar Lampung	Kepala Divisi Imigrasi dan Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
Senin, 30 Mei 2022	Laksanakan Desk Evaluasi Tim Penilai Internal, Rutan Kota Agung Optimalkan Keterbatasan Maksimalisasi Pembangunan Zona Integritas	Rutan Kotaagung	Tim TPI ZI dan Jajaran Rutan Kotaagung
Selasa, 31 Mei 2022	Exit Meeting Tandai Selesainya Pengawasan Tim Joint Audit Kepatuhan PMPJ Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Selasa, 31 Mei 2022	Jalani Desk Evaluasi Tim Penilai Internal, Rutan Bandar Lampung Hadirkan Segudang Inovasi	Rutan Bandar Lampung	Tim TPI ZI dan Jajaran Rutan Bandar Lampung
Selasa, 31 Mei 2022	Tekankan One Day Service: Kanwil KumHAM Lampung Tuntaskan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Raperda Lampung Barat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Subid FPPHD, JFT Suncang, dan Kepala BPKD Kabupaten Lampung

HARI/TANGGAL	Berita	TEMPAT	KETERANGAN
Rabu, 01 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Administrasi Topan Sapuan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian
Rabu, 01 Juni 2022	Kunjungi Rupbasan Metro, Kakanwil Kumham Lampung Tinjau Fasilitas	Kementerian Hukum dan HAM	Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI
Kamis, 02 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti FGD Penyusunan Rekomenda	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Metro	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Metro
Kamis, 02 Juni 2022	Laksanakan Desk Evaluasi Tim Penilai Internal, Aplikasi Barometer J	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM
Kamis, 02 Juni 2022	Tampil dalam Desk Evaluasi Tim Penilai Internal Lapas Gunung Sugih	Bapas Metro	Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas, Kepala Bapas Metro
Kamis, 02 Juni 2022	Tingkatkan Belanja Produk Dalam Negeri, Kanwil Kemenkumham La	Lapas Gunung Sugih	Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas, Kepala Lapas Gunung Sugih
Kamis, 02 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Pembinaan Desa Sadar	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum, Pejabat Pembuat Komitmen serta Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa.
Jumat, 03 Juni 2022	Keterbatasan Sumberdaya Tak Halangi Rupbasan Metro Jalani Desk	Balai Pekon Way Redak	Tim Pembinaan Desa Sadar Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Jumat, 03 Juni 2022	"Sehat dan Produktif" Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Olahraga	Rupbasan Metro	Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas, Kepala Rupbasan Metro
Jumat, 03 Juni 2022	Ikuti Desk Evaluasi Tim Penilai Internal, Lapas Metro Unggulkan Inov	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Divisi Administrasi,
Jumat, 03 Juni 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung (Edi Kurniadi) Terima BA Evaluasi	Lapas Metro	Tim 2 Penilai Internal (Tim 2) Pembangunan Zona Integritas, Kepala Lapas Metro
Jumat, 03 Juni 2022	Melepas 393 Jemaah Haji Kloter 1 Bandar Lampung, Wagub Berpes	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi
Minggu, 05 Juni 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Peletakan Batu Pertama P	Asrama Haji Lampung	Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Senin, 06 Juni 2022	Tetap Dukung dan Doakan Kanwil Raih WBK/WBBM, Arahan Apel P	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro
Senin, 06 Juni 2022	Penyusunan Laporan Tahunan SPIP Tahun 2021 dan MR Semester I	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Keimigrasian

Selasa, 07 Juni 2022	Tindak Lanjut Penyampaian Aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Wilayah Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung,ajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selasa, 07 Juni 2022	Buka Pendampingan dan Evaluasi SPIP dan Manajemen Risiko Tahu	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu
Selasa, 07 Juni 2022	Penguatan Tusi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kadivya	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian,Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Selasa, 07 Juni 2022	Jelang Seleksi Kompetensi Dasar Calon Taruna Poltekim/Poltekim, K	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Masriakromi.
Selasa, 07 Juni 2022	Buka Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi SPIP dan Manajemen Ri	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi,Plt. Kepala Bagian Umum, Basnamara; dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Selasa, 07 Juni 2022	Kabiro Hukerma Tinjau Eks Aset BLBI di Wilayah Provinsi Lampung.	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 08 Juni 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Melantik Pejabat Penyidik Pegawai	Provinsi Lampung	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Kepala Bagian Perencanaan BMN
Rabu, 08 Juni 2022	HUT Pomad ke-76, Kanwil Kemenkumham Lampung Berpartisipasi Ik	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung ,Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Rabu, 08 Juni 2022	Bakar Semangat Peserta Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Reformasi B	Aula Antasena Madenpom	Palang Merah Indonesia (PMI), Detasemen Polisi Militer

Kamis, 09 Juni 2022	Staf Ahli Menkumham Bidang RB Kunjungi Lapas Kelas I Bandar Lan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama
Kamis, 09 Juni 2022	Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Beri Pengua	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal, Kepala Lapas I Bandar Lampung
Kamis, 09 Juni 2022	Kemenkumham Lampung Kembali Laksanakan Pembinaan Desa Sa	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, seluruh Kepala Satuan Kerja Pemsayarakatan dan Imigrasi di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.
Kamis, 09 Juni 2022	Pembinaan 3 Desa Kadarkum di Kab Way Kanan dibuka oleh Sekda	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bupati Tulang Bawang Barat
Kamis, 09 Juni 2022	Tim Pembinaan Kadarkum Desa Sadar Hukum melakukan pembinaa	kab. Waykanan	Sekda Way Kanan
Kamis, 09 Juni 2022	Ingatkan Pentingnya Sadar Hukum, Tim Kadarkum Kanwil Kemenkum	Desa Mekar Jaya, Kab. Mesuji	Tim Pembentukan dan/atau Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kanwil Kemenkumham Lampung
Jumat, 10 Juni 2022	Semangat untuk sehat dan Capai Produktivitas Tinggi, Kumham Lam	Pekon Podosari, Kab. Pringsewu	Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kanwil Kemenkumham Lampung
Jumat, 10 Juni 2022	Setahun Meninggalnya Elisye, Yasonna: Kita Merasakan Arti Kematia	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung
Sabtu, 11 Juni 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Imigrasi Beri Apresiasi Kinerja Seluruh Pega	Kementerian Hukum dan HAM	Menteri Hukum dan HAM
Senin, 13 Juni 2022	Event World Surf League (WSL) Krui Pro QS. 5000 Tahun 2022, Kan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
Senin, 13 Juni 2022	Dorong Terbentuknya Kadarkum, Tim Kadarkum Kanwil Kemenkumh	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republika Indonesia, Wakil Ketua MPR RI dan Tokoh Lampung,
Senin, 13 Juni 2022	Beri Arahan di Hadapan Taruna Poltekip Peserta Magang, PKL & KK	Desa Sidomulyo, Kec. Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.	Tim Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kanwil Kemenkumham Lampung

Senin, 13 Juni 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Himbal	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha & Rumah Tangga
Senin, 13 Juni 2022	Kadivyanlum Berikan Materi Pada Rakor Bagian Hukum dan Badan/	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Selasa, 14 Juni 2022	Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber, Kemenkumham Tanggap Hac	Bandar Lampung	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selasa, 14 Juni 2022	FGD Pengelolaan JDih Sekretariat DPRD, Kadivyanlum Berikan Ma	Kementerian Hukum dan HAM	Sekretaris Jenderal
Selasa, 14 Juni 2022	Buka Kegiatan Bimtek Pengisian Non/E-Tendering, Non/E-Purchasin	Bandar Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Selasa, 14 Juni 2022	Dukung Ruang Siber Nasional yang Aman dan Mensejahterakan, Kar	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi
Selasa, 14 Juni 2022	Inspektorat Jenderal Tegaskan, Gratifikasi Wajib Dilaporkan, Pungcut	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan
Rabu, 15 Juni 2022	Memahami dan Mewaspadaai Tindak Pidana Korupsi Sebagai Aparatu	Bndar Lampung	Plt. Sub Koordinator Layanan Pengaduan Sekretariat Inspektorat Jenderal
Rabu, 15 Juni 2022	Bangun Budaya Anti-Korupsi Secara Introspektif, Mulai dari Diri Send	Kantor Wilayah Lampung	Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung
Rabu, 15 Juni 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Resmi Membuka Kegiatan Pengu	Kantor Wilayah Lampung	Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Lampung
Rabu, 15 Juni 2022	Perkuat Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pungli, Kakanwil Beserta J	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM
Rabu, 15 Juni 2022	Tindak Pidana Korupsi adalah Extra Ordinary Crime! Tegas Kakanwil	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM
Rabu, 15 Juni 2022	Kakanwil Terima Kunjungan Regional CEO BRI Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Kamis, 16 Juni 2022	Pimpin Rapat Panitia Seleksi Catur Poltekip/Poltekim, Kadivmin: Tan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Kamis, 16 Juni 2022	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI, Kadivvankum: Segera Dafta	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 16 Juni 2022	Narasumber DJKI, Disperindag Prov. Lampung, dan Sentra KI Unila E	Hotel Bukit Randu	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung
Kamis, 16 Juni 2022	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI, Kakanwil: Hidupkan Ekosist	Hotel Bukit Randu	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI,
Kamis, 16 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi Pencegahan Pela	Hotel Bukit Randu	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung
Kamis, 16 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Balitbang Hukum dan H	Hotel Bukit Randu	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung
Kamis, 16 Juni 2022	Bahas Prosedur Penilaian Angka Kredit JF Pembimbing Kemasyarak	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Kamis, 16 Juni 2022	Kakanwil Kumham Lampung Terima Kunjungan Asosiasi Olahraga P	Kantor Wilayah Lampung	Tim Penilai Angka Kredit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Kamis, 16 Juni 2022	Ikuti Rangkaian Pembukaan Latsar CPNS, Kadivmin : "Ikuti dengan S	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, beserta Kepala Bagian Program dan Humas
Kamis, 16 Juni 2022	Ikuti Pembinaan Perancang PerUU, Kanwil Lampung Akan Miliki And	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Kamis, 16 Juni 2022	Jaga Imunitas dan Kesehatan Fisik, Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si
Jumat, 17 Juni 2022	Mantapkan Persiapan SKD Catur Poltekip/Poltekim, Kanwil Kemenku	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung
Jumat, 17 Juni 2022	Kadiv Administrasi Cek Kesiapan Pelaksanaan Tes SKD Catur Poltek	Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI

Minggu, 19 Juni 2022	Lakukan Pengawasan Keimigrasian, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemu	Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Minggu, 19 Juni 2022	Cegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham La	Kabupaten Pesisir Barat	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian
Senin, 20 Juni 2022	Berikan Arahan Peserta SKD Catur Poltekip/Poltekim, Irwil III (Iwan S	Pusat Perbelanjaan di Kota Bandar Lampung	pelaksana pada Sub Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 20 Juni 2022	Kanwil Lampung Laksanakan Sosialisasi UU Nomor 13 Tahun 2022 t	Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung	Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian
Senin, 20 Juni 2022	Tingkatkan Kapasitas Petugas Keamanan, Dirkantib Ditjen PAS Inga	Kantor Wilayah Lampung	Perancang Ahli Madya
Senin, 20 Juni 2022	Sosialisasi Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan, Kadiv	Kantor Wilayah Lampung	Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan, JF Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung
Senin, 20 Juni 2022	Dukung Edukasi Hukum, PIPAS Lampung Gelar Penyuluhan Hukum	Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda	Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kepala UPT se-Lampung
Senin, 20 Juni 2022	Selenggarakan Pembinaan Pola Karir Perancang PerUU, Kadiv Yank	Grand Elty Krakatoa Kalianda.	Ibu-Ibu Pemasarakatan (PIPAS)
Senin, 20 Juni 2022	Inspektur Wilayah III (Iwan Santoso) Tinjau Pelaksanaan SKD Catur F	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 20 Juni 2022	Hari Pertama SKD Catur Poltekip/Poltekim TA. 2022, Kakanwil: Was	Kanreg V UPT BKN	Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian
Senin, 20 Juni 2022	Kakanwil dan Jajaran Pastikan Kelancaran SKD Catur Poltekip/Poltek	UPT BKN Regional V, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Plt. Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT
Senin, 20 Juni 2022	Tingkatkan Kemampuan Penilaian Angka Kredit Perancang PerUU, T	UPT BKN Regional V, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Plt. Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT
Senin, 20 Juni 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Yankumham Ingatkan untuk Tetap Patuh Pr	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 20 Juni 2022	Tingkatkan Fisik Mental Disiplin, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemu	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selasa, 21 Juni 2022	Back to Basic, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung	Grand Elty Krakatoa Kalianda	Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selasa, 21 Juni 2022	Kadiv Pelayanan Hukum & HAM Pimpin Rapat Koordinasi Penangan	Grand Elty Krakatoa Kalianda	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan
Selasa, 21 Juni 2022	Bahas Penggunaan Aplikasi PPNS, Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Plt.Kepala Bidang HAM, Kepala Subbidang Pemajuan HAM
Selasa, 21 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Penyusunan Laporan	Kantor Wilayah Lampung	Direktorat Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)
Selasa, 21 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Pemutakhiran Data	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum & HAM
Selasa, 21 Juni 2022	Kepala Biro Perencanaan (Ida Asep Somara) Tinjau Situasi SKD Cat	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Pelaksana di Jajaran Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT.
Selasa, 21 Juni 2022	Direktorat Operasi Sandi BSSN Pantau SKD Catar Poltekip/Poltekim	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Selasa, 21 Juni 2022	Seleksi Catar Kemenkumham Hari Kedua, Irwil III Berpesan untuk Ti	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Selasa, 21 Juni 2022	Rakernis Peningkatan Pelayanan Kesehatan WBP Melalui BPJS dan	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Selasa, 21 Juni 2022	Seleksi Catar Kemenkumham Hari Kedua, Ka. UPT BKN Bandar Lan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Plt. Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT
Selasa, 21 Juni 2022	Indeks Reformasi Hukum, Biroren Setjen Kemenkumham Laksanaka	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	epala Sub Bagian Kepegawaian, Tata
Rabu, 22 Juni 2022	Penguuhan Pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) Kem	Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah	Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Rabu, 22 Juni 2022	Tinjau Kembali Pelaksanaan SKD Catar Poltekip/Poltekim, Kepala Bi	Kantor Wilayah Lampung	Menteri Hukum dan HAM
Rabu, 22 Juni 2022	Pastikan Lancar, Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi Tin	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Rabu, 22 Juni 2022	Taat Aturan, CAT SKD Calon Taruna-Taruni Hari Ke-3 Berlangsung	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum,
Rabu, 22 Juni 2022	Semarak HDKD 2022, Kakanwil Ikuti Rapat Persiapan Turnamen Ten	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Plt. Kepala UPT BKN Bandar Lampung
Kamis, 23 Juni 2022	Kakanwil Lampung Jadi Saksi Penandatanganan PKS antara Lapas L	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Kamis, 23 Juni 2022	Kadivmin Tinjau SKD Catat Poltekip/Poltekim, Topan Sopuan: Fokus	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung
Kamis, 23 Juni 2022	Jelang HDKD ke-77, Sekjen Kemenkumham RI Gelar Rapat Persiapa	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Kamis, 23 Juni 2022	"Lancar, Tertib, dan Transparan". SKD Catat Poltekip/Poltekim Mema	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum,
Kamis, 23 Juni 2022	Inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal, Kanwil Kemenkumham La	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Kamis, 23 Juni 2022	Diskusi Panel, Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewargan	Kabupaten Lampung Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Jumat, 24 Juni 2022	Gelar Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	Hotel Bukit Randu	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelvana Hukum dan HAM
Jumat, 24 Juni 2022	Kakanwil Kumham Lampung Buka Kegiatan Diseminasi Layanan Kew	Hotel Bukit Randu	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung
Jumat, 24 Juni 2022	Seleksi Catat Kemenkumham Hari Kelima, Kanwil Kemenkumham La	Hotel Bukit Randu	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung
Jumat, 24 Juni 2022	Hari Terakhir Pelaksanaan SKD Catat Poltekip dan Poltekim, Kanwil I	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum,

Sabtu, 25 Juni 2022	Selamat Hari Anti Narkotika International (HANI) 2022 "Mengatasi Ta	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum,
Minggu, 26 Juni 2022	Audit Kepatuhan Langsung (on-site), Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM
Senin, 27 Juni 2022	Selesaikan Pengerjaan Tepat Waktu! Pesan Kakanwil dalam Penand	Kantor Wilayah Lampung	Tim Pengawasan Kepatuhan Notaris
Senin, 27 Juni 2022	Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Kons	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Bagian Umum,
Senin, 27 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Puncak Peringatan HANI 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Ketua Sekretariat Wilayah UKPBJ Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 27 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Kaji IKM IPK, Demi Terselenggaran	Sanur, Denpasar, Bali.	Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia ,Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Senin, 27 Juni 2022	Sosialisasi Buku "Sesepuh Berbagi", Kadiv PAS : Teladani Pengalam	Kantor Wilayah Lampung	ioo
Senin, 27 Juni 2022	Kakanwil Lampung Edi Kurniadi Lantik dan Ambil Sumpah PPNS, No	Lapas Kelas I Bandar Lampung.	Kepala Divisi Pemasarakatan Kemenkumham Lampung, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Lampung
Senin, 27 Juni 2022	Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Perlindungan. Pelayanan Kewa	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Senin, 27 Juni 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Pemasarakatan Ingatkan Setiap Masa Ada	Kementerian Hukum dan HAM	Menteri Hukum dan HAM
Senin, 27 Juni 2022	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Teleconference Konsi	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Selasa, 28 Juni 2022	Evaluasi IKPA Semester I TA 2022, Edi Kurniadi : Perhatikan Target f	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi , Kepala Bagian Program dan HUMAS Kanwil Kemenkumham Lampung
Selasa, 28 Juni 2022	Pastikan Layak, Kadivmin Kanwil Kememenkumham Lampung Lakuk	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM

Rabu, 29 Juni 2022	Siapkan Migrasi Data, Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Ce	Rutan Kelas IIB Menggala	Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Rabu, 29 Juni 2022	Presiden Duterte Puji Kebijakan Menkumham Yasonna Laoly dalam F	Rutan Kelas IIB Menggala	Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Rabu, 29 Juni 2022	Jelang HDKD 2022, Kakanwil Kemenkumham Lampung hadiri Rapat	Hotel Marriot Manila, Filipina	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Rabu, 29 Juni 2022	Tingkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja , Pimti Kanwil La	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian
Rabu, 29 Juni 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Pemantapan Konsepsi F	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM
Rabu, 29 Juni 2022	Di AS, Menkumham Yasonna Sampaikan Pentingnya Pancasila dalam	Lampung Utara	Tim Harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kamis, 30 Juni 2022	High Commitment dan High Performance. Pesan Kakanwil Kemenku	Kementerian Hukum dan HAM	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kamis, 30 Juni 2022	Jaga Kualitas Pelayanan, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelavana Hukum dan HAM
Kamis, 30 Juni 2022	Siap Sukseskan Peringatan HDKD Ke-77 Tahun 2022, Kanwil Kemer	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	epala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Kamis, 30 Juni 2022	Tampung Aspirasi PKL Terminal Rajabasa, Kanwil Kemenkumham L	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, kepala Divisi Keimigrasian
Kamis, 30 Juni 2022	Menkumham Yasonna: Pancasila Harus Jadi Pedoman, Fondasi, dan	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Bidang HAM

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Jumat, 01 Juli 2022	Jaga Stabilitas Kinerja, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Wilayah Lampung	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Kepala Divisi Imigrasi dan Jajaran Imigrasi Se Provinsi Lampung
Jumat, 01 Juli 2022	Bulan Baru Semangat Baru Jaga Kebugaran, Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Senam Bersama Para Pegawai	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
Sabtu, 02 Juli 2022	Kadiv Administrasi Lakukan Inspeksi Kelayakan Gudang Penyimpanan Barang	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi dan Subagian Keuangan , BMN
Senin, 04 Juli 2022	Monitoring Dan Evaluasi oleh Inspektur Wilayah IV, Kakanwil Siap Penuhi Data yang Dibutuhkan	Kantor Wilayah Lampung	Inspektur Wilayah IV dan Kepala Kantor Wilayah
Senin, 04 Juli 2022	Pimpin Apel Pagi, Jelang Idul Adha Kadivmin Hibau Para Pegawai Berqurban melalui Kantor Wilayah	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
Selasa, 05 Juli 2022	Semakin Mudah, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dilakukan Secara Elektronik	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Bidang Hukum dan JFT Suncang
Selasa, 05 Juli 2022	Tertib Administrasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Pengarahan Pengelolaan dan Current Issue Penerimaan Hibah Oleh Biro Keuangan Secara Virtual	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kepala Kabag Umum dan Subidang Keuangan, BMN
Selasa, 05 Juli 2022	Kadivpas Berikan Penguatan Terkait Kunjungan, Asimilasi dan Integrasi Kepada PK Bapas Bandar Lampung	Balai Pemasarakatan Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan dan Jajaran Bapas Bandar Lampung
Selasa, 05 Juli 2022	Kunjungi Rutan Kelas I Bandar Lampung, Kadivpas Apresiasi Kesiapan Pelayanan Penerimaan Kunjungan Tahanan	Rutan Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan dan Jajaran Rutan Bandar Lampung
Selasa, 05 Juli 2022	Arisan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	PIPAS / Dharma Wanita
Rabu, 06 Juli 2022	Sambut HDKD ke-77, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengharmonisasian Pambulatan dan Pemanapan Konsepsi Raperda Serentak Se-Indonesia	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum dan JFT Suncang
Rabu, 06 Juli 2022	Kanwil Lampung Lakukan Rapat Tahap Pra Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Kanwil dan Rumah Negara	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Subbagian Keuangan, BMN
Rabu, 06 Juli 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Analis Hukum di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi dan Plt. Kabag Umum
Rabu, 06 Juli 2022	Koordinasi Proses Pengharmonisasian Raperda, Kadiv Yankum Terima Audiensi Pemda Pesawaran	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum dan Pemda Pesawaran
Kamis, 07 Juli 2022	Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Wamenkumham Apresiasi Pelayanan Keimigrasian	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Wamenkumham, Kepala Kantor Wilayah, KaUPT, dan Seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Kamis, 07 Juli 2022	Tinjau Barang Sitaan, Wamenkumham Kunjungi Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Rupbasan Bandar Lampung	Wamenkumham, Kepala Kantor Wilayah, KaUPT, dan Seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Kamis, 07 Juli 2022	Pastikan Layak, Wamenkumham Tinjau Sarana dan Prasarana di Rutan Kelas I Bandar Lampung	Rutan Kelas I Bandar Lampung	Wamenkumham, Kepala Kantor Wilayah, KaUPT, dan Seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 11 Juli 2022	Kanwil Lampung Ikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Program Dukungan Manajemen serta Rapat Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN	Jakarta	Kepala Kantor Wilayah Seluruh Indonesia
Senin, 11 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Hewan Qurban dari Wali Kota Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Panitia Qurban Kanwil Lampung dan Perwakilan Pemkab Kota Bandar Lampung
Senin, 11 Juli 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Yankum Ingatkan Untuk selalu Tingkatkan Kedisiplinan Waktu maupun Berkakaian	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
Selasa, 12 Juli 2022	Capai Target Kinerja Sempurna, Subbid KI Kanwil Lampung Hadiri Verifikasi Tarja Bersama DJKI	Jakarta	Kasubid Kekayaan Intelektual dan TIM
Selasa, 12 Juli 2022	Kolaborasi Bersama KPK, Kanwil Kemenkumham Lampung dan Rupbasan Tinjau Kondisi Barang Sitaan Negara	Lampung Utara	Tim KPK, Kanwil Lampung dan Rupbasan

Selasa, 12 Juli 2022	KPK Titipkan Barang Sitaan Negara Penanganan Perkaratan Tipikor Kabupaten Lampung Utara pada Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Lampung Utara	Tim KPK, Kanwil Lampung dan Rupbasan
Selasa, 12 Juli 2022	Kunjungi Pemkab Mesuji, Kantor Wilayah Lampung Lakukan Inventarisasi Data PPNs	Pemkab Mesuji	Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 13 Juli 2022	Dukung Penuh Pilkati, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat	Pemkab Tulang Bawang Barat	Kasubid FPPHD dan Tim Bidang Hukum Pemkab Tulang Bawang Barat
Rabu, 13 Juli 2022	Beri Sambutan, Kadiv Imigrasi Buka Rapat Koordinasi Tim PORA Kota Bandar Lampung	Emersia Ballroom	Kadiv Imigrasi dan Tim PORA
Kamis, 14 Juli 2022	MPDN Kota Bandar Lampung Gelar Rapat Terkait Hambatan Serah Terima Protokol dan Rangkap Jabatan Notaris	Kantor Wilayah Lampung	MPDN Kota Bandar Lampung
Kamis, 14 Juli 2022	Meriahkan Rangkaian HDKD 2022, Kadivmin Wakili Tim Kanwil Lampung dalam Perlombaan Badminton	Lampung Walk	Kepala Divisi Administrasi, Jajaran Kantor Wilayah
Kamis, 14 Juli 2022	Kanwil Lampung Ikuti Diseminasi Aplikasi Kerja Sama, Mendukung Literasi Data Mendorong Pelayanan yang Informatif	Bogor	Humas Kanwil Lampung dan Biro Hukerma
Jumat, 15 Juli 2022	Semarak Peringatan Hari Dharma Karya Dhika ke-77 Resmi Dibuka	Rutan Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Seluruh Kepala Divisi dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Jumat, 15 Juli 2022	Gelorakan Semangat HDKD ke-77, Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Upacara Pembukaan Lomba	Rutan Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Seluruh Kepala Divisi dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Sabtu, 16 Juli 2022	Persatuan Futsal Pengayoman Lampung Raih Kemenangan Perdana di Turnamen TIKI Championship	Universitas Bandar Lampung	Tim Futsal Pengayoman Lampung
Sabtu, 16 Juli 2022	Meriahkan Perlombaan Rangkaian HDKD Ke-77, Jajaran Pimti dan Kepala UPT Kanwil Lampung Ikut dalam Perlombaan Tarik Tambang	Rutan Bandar Lampung	Jajaran Pimti Kanwil Kemenkumham Lampung
Sabtu, 16 Juli 2022	Meriahkan HDKD ke-77 Tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Lampung Sukses Gelar Turnamen Futsal dan Bulutangkis	Lampung Walk	Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 18 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Sambut Baik Audiensi dari Universitas Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 18 Juli 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Yankum Tekankan Perubahan Kedisiplinan dalam bekerja	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung
Senin, 18 Juli 2022	Persatuan Futsal Pengayoman Kanwil Lampung Mantapkan Langkah ke Babak Perempat Final di Turnamen TIKI Futsal Championship 2022	Universitas Bandar Lampung	Tim Futsal Pengayoman Lampung
Selasa, 19 Juli 2022	Kadivpas Kanwil Lampung Beri Penguatan Tugas dan Fungsi Pegawai LPKA Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Selasa, 19 Juli 2022	Raih Opini WTP Ke-13, Kanwil Lampung Ikuti Kegiatan Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Kantor Wilayah
Selasa, 19 Juli 2022	Kemenkumham Raih WTP 13 Kali Berturut-turut, Yasonna: Jangan Berpuas Diri, Tetap Tingkatkan Kinerja	Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Selasa, 19 Juli 2022	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ikuti Rapat Persiapan Tes Kesehatan Seleksi Calon Taruna/Taruni Poltekop dan Poltekim Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kabag Umum
Selasa, 19 Juli 2022	Serahkan Sertifikat Pencatatan KIK, Staf Ahli Menkumham Iwan Kurniawan: Gubernur Lampung Pimpin Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual!	Hotel Emersia Bandar Lampung	Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Kantor Wilayah
Selasa, 19 Juli 2022	Pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic, Gubernur Lampung Galakkan Pendaftaran dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Hotel Emersia Bandar Lampung	Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Kantor Wilayah
Selasa, 19 Juli 2022	Gelar Mobile Intellectual Property Clinic Tahun 2022, Kakanwil Kumham Lampung Ajak Masyarakat Segera Daftarkan Kekayaan Intelektual di Provinsi Lampung	Hotel Emersia Bandar Lampung	Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Kantor Wilayah

Rabu, 20 Juli 2022	Jelang Pelaksanaan Pengharmonisasian Konsepsi Ranperda Serentak Dalam Rangka HDKD 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Persiapan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 20 Juli 2022	Gelar Diseminasi Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham Lampung Ajak Seluruh Peserta Untuk Dukung UU No 12 Tahun 2006 Pasal 20	Hotel Emersia Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 20 Juli 2022	Tingkatkan Layanan Pewarganegaraan, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	Hotel Emersia Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 20 Juli 2022	Bersih dan Negatif Narkoba, Pegawai LPKA Jalani Tes Urine	Kantor Wilayah Lampung	Pegawai LPKA
Rabu, 20 Juli 2022	Dorong Peningkatan Realisasi Kinerja, Kanwil Lampung Lakukan Rakor Evaluasi Capaian Kinerja TA.2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Rabu, 20 Juli 2022	Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Kakanwil Kemenkumham Lampung Harapkan Sinergitas Stakeholder dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hotel Emersia Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 20 Juli 2022	Buka Rakor Evaluasi dan Capaian Kinerja TA 2022, Kadivmin : Laksanakan Program Kerja Sesuai Target Guna Mencapai Akuntabilitas Kinerja yang Maksimal	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 21 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Penghargaan di UBL Awards Dies Natalis Ke-50 Universitas Bandar Lampung	Universitas Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Kamis, 21 Juli 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Puncak Peringatan Dies Natalis Emas Ke-50 Universitas Bandar Lampung	Universitas Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Kamis, 21 Juli 2022	Kepala Kantor Wilayah Lantik Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya Pada Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama
Kamis, 21 Juli 2022	Bangun Kesadaran Terhadap Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Yasonna Mendengar : Solo	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 21 Juli 2022	Dukung Landasan Dasar Pembinaan Ramah Anak, Kanwil Kemenkumham Lampung Melalui Divisi Pas Bagikan Piagam Archamanik Pada Seluruh UPT Pemasarakatan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Kamis, 21 Juli 2022	Tingkatkan Sarana Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Kanwil Kemenkumham Lampung Melalui Divisi Pas Bagikan Alat Damkar pada Seluruh UPT Pemasarakatan Tanpa Terkecuali LPKA Klas II Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Kamis, 21 Juli 2022	Kanwil Lampung Ikuti Launching Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Perda dan Perkada	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Jumat, 22 Juli 2022	Kunjungi LPKA Kelas II Bandar Lampung, Kanwil Kumham Lampung Melalui Kadivpas bersama Tim Psikolog Gerakan Program Salam Pemasarakatan dan Selamat Pagi Konseling	LPKA Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Jumat, 22 Juli 2022	Kanwil Kumham Lampung Melalui Kadivpas Berikan Tutorial Salam Pemasarakatan Kepada Petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung	LPKA Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Jumat, 22 Juli 2022	Persiapan Pelaksanaan Harmonisasi 77 Ranperda HDKD Seluruh Indonesia Kanwil Kemenkumham Lampung Turut Hadir dalam Rapat Koordinasi Bersama DITJEN PP	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Jumat, 22 Juli 2022	Kumham Sehat Kumham Produktif, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Senam Bersama	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasarakatan dan seluruh pegawai
Jumat, 22 Juli 2022	Hari Ketiga Mobile Intellectual Property Clinic, Kanwil Lampung Dorong Kualitas dan Kuantitas KI	Universitas Bandar Lampung	Kasubbid KI
Sabtu, 23 Juli 2022	Kanwil Lampung Lakukan Koordinasi Terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab. Mesuji	Kabupaten Mesuji	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Sabtu, 23 Juli 2022	Peringati Hari Anak Nasional, LPKA Bandar Lampung Berikan Remisi Kepada 51 Anak Binaan	LPKA Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan, Plh. Kepala LPKA
Sabtu, 23 Juli 2022	Meriahkan HDKD Ke-77 tahun 2022, Kakanwil dan Kadivmin Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ikuti perlombaan Gable dan Catur	Bapas Kelas II Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi
Sabtu, 23 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Konferensi Pers Terkait Anak Berhadapan Hukum di Polda Lampung	Polda Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan

Minggu, 24 Juli 2022	Touring Kumham Peduli Daerah Terpencil, Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung laksanakan Kumham berbagi di Desa Sidodadi Asri, Jatiagung.	Jatiagung	Pimti Pratama, Kepala UPT
Senin, 25 Juli 2022	Kanwil Lampung Lakukan Rapat Penguatan Tusi Penyuluh Hukum dan Persiapan Penyuluhan Hukum Serentak	Kantor Wilayah Lampung	Tim Penyuluh Hukum
Senin, 25 Juli 2022	Usai Ikuti Pelatihan Manasik Haji, WBP Lapas Narkotika Bandar Lampung Terima Hadiah Umroh Gratis dari Kadiv Pas	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Senin, 25 Juli 2022	MKNW, MPWN dan MPDN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas dan Pelantikan PAW anggota MKN	Hotel Westin Nusa Dua Bali	MKNW, MPWN dan MPDN
Senin, 25 Juli 2022	Pimpin Apel pagi, Kadiv Pemasarakatan ingatkan untuk senantiasa menjaga Kesehatan agar dapat berkinerja produktif	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Senin, 25 Juli 2022	Bekali Legal Drafter, Kanwil Lampung Ikuti Penguatan dan Peningkatan Pengetahuan Harmonisasi Rancangan PP Oleh Ditjen PP	Kantor Wilayah Lampung	Kabid Hukum
Selasa, 26 Juli 2022	Kanwil Lampung Lakukan Rapat Pembahasan Data dan Informasi SIPKUMHAM	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Selasa, 26 Juli 2022	Kadivpas Kanwil Lampung Beri Penguatan Tugas dan Fungsi Terkait Pos Bapas di LPKA Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Selasa, 26 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Promosi dan Diseminasi KI Edukasi Hak Cipta Melalui Sistem POP-HC di Rajawali 95.2 FM	Bandar Lampung	Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual
Selasa, 26 Juli 2022	Dukung KI Makin Maju, Kanwil Kemenkumham Lampung Menjadi Narasumber Dialog Interaktif Mengenal HKI Serta Manfaat POP HC di Radar Lampung TV	Radar Lampung TV	Penyuluh Hukum
Selasa, 26 Juli 2022	Kanwil Kumham Lampung Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II (B06) Tahun 2022	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi
Selasa, 26 Juli 2022	Yasonna Dorong Polri Lakukan Pembenahan Internal dan Tingkatkan Kepercayaan Publik	Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Rabu, 27 Juli 2022	Pastikan Harmonisasi Perda Berjalan Lancar, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Persiapan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 27 Juli 2022	Kanwil Lampung Lakukan Rapat Final Ekspose Pengadaan Perencanaan Rehabilitasi Kantor Wilayah dan Rumah Negara	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 27 Juli 2022	Sinergi dan Koordinasi Harmonis dengan Kanwil Kemenkumham Lampung, Rutan Menggala Raih Penghargaan DJPb	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Rabu, 27 Juli 2022	Jaga Sportifitas dan Nama Baik Kemenkumham, Pesan Kakanwil pada Persatuan Bola Basket Pengayoman Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Rabu, 27 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung laksanakan Pembinaan Desa Sadar Hukum dalam rangka HDKD Ke-77 Tahun 2022 di Kelurahan Rajabasa Pemuka.	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 27 Juli 2022	Capaian Nilai IKPA 100, Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Piagam Penghargaan DJPb	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
Rabu, 27 Juli 2022	Semarak HDKD Ke-77, Kanwil Kumham Lampung Selenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum pada Warga Kelurahan Langkapura	Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Rabu, 27 Juli 2022	Peringati HDKD ke-77, Kanwil Kemenkumham Lampung Adakan Bhakti Sosial Donor Darah	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama
Rabu, 27 Juli 2022	Dukung Digitalisasi Peraturan dan Perundang-undangan, Kanwil Lampung Hadiri Penguatan dan Pengetahuan Harmonisasi Bimtek Digitalisasi Pembentukan Regulasi	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kamis, 28 Juli 2022	Kanwil Lampung Gelar Rapat Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Prov. Lampung Tentang Bantuan Hukum	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kamis, 28 Juli 2022	Diundang Sebagai Pembicara Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Bimbingan Teknis Terkait Kelembagaan RT di Kelurahan Gedong Air	Bandar Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 28 Juli 2022	Percepat Layanan Merek, Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasikan Langsung Pendaftaran Merek ke DJKI	Jakarta	Tim Kekayaan Intelektual
Kamis, 28 Juli 2022	Jaga Sinergitas, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Koordinasi Pelayanan HKI ke DJKI	Jakarta	Tim Kekayaan Intelektual
Kamis, 28 Juli 2022	Dalam Rangka HDKD Ke-77, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Harmonisasi 77 Ranperda Mendukung Pembangunan Sistem Hukum Nasional	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kamis, 28 Juli 2022	Berikan Pengarahan Alumni Poltekip 52, Kakanwil: Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 28 Juli 2022	Wujudkan Pengelolaan Kepegawaian Yang Terstruktur, Kanwil Lampung Fasilitas Pengisian Data Analisis Beban Kerja	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 28 Juli 2022	Sukseskan HDKD 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Serentak Se-Indonesia Atas Ranperda Kabupaten Lampung Barat Tentang Kerja Sama Antar Pekan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kamis, 28 Juli 2022	Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah, Kakanwil Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Harmonisasi Raperda Kabupaten Tanggamus	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Jumat, 29 Juli 2022	Kanwil Kumham Lampung Gelar Rapat Persiapan Pengukuhan RuKI DJKI Mengajar Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Guru KI
Jumat, 29 Juli 2022	Siap Berikan Pelayanan Cepat, Tepat dan Berkualitas, Kanwil Kemenkumham Lampung Canangkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama
Jumat, 29 Juli 2022	Kadiv Yankum dan JFT Suncang Bahas Bersama terkait Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Jumat, 29 Juli 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Sosialisasi Permenkumham NO.3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik Di Lingkungan Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama
Jumat, 29 Juli 2022	Jum'at Sehat dan Jaga Kebugaran Tubuh, Kakanwil dan Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Senam Bersama	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah dan seluruh pegawai
Jumat, 29 Juli 2022	Berikan Pendampingan Langsung Terkait Permohonan Kekayaan Intelektual, Tim Subbid KI sambangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat	Plh. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Tim Kantor Wilayah Lampung

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Senin, 01 Agustus 2022	Kanwil Lampung Ikuti Entry Meeting Dalam Rangka Reviu BPKP atas Realisasi P3DN Semester I dan Bulan Juli Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Senin, 01 Agustus 2022	Siapkan Pendampingan KES, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Pemantapan Publikasi KES Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kabag Umum, Kasubag Keuangan & BMN
Senin, 01 Agustus 2022	Kantor Wilayah Susun dan Publikasi Standar Operasional Prosedur Mengenai Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Senin, 01 Agustus 2022	Jaga Sinergitas Antar Divisi, Kakanwil Kemenkumham Lampung Gelar Coffee Morning Bersama Para Pimti	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama
Senin, 01 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Sertijab Kepala Balitbangkumham, Wisuda Purnabhakti Pengayoman dan Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Purna Bhakti Pengayoman	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama
Senin, 01 Agustus 2022	Aktifkan Program Konseling, UPTD PPA Kunjungi Kanwil Lampung Bahas Pembinaan Anak di LPKA Bandar Lampung	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan, PPA Universitas Muhammadiyah Lampung
Senin, 01 Agustus 2022	Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung ingatkan untuk selalu mengikuti dan memeriahkan Rangkaian Kegiatan HDKD ke 77 Saat pimpin Apel Pagi	Kantor Wilayah Lampung	Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh pegawai
Selasa, 02 Agustus 2022	Ambil Bagian dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Era Digital Economy, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Turut Kukuhan Guru Kekayaan Intelektual dalam Rakernis DJKI	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Guru KI
Selasa, 02 Agustus 2022	Nikmati Produksi Roti Raja Bakery hingga Saksikan Pembuatan Kerajinan Tapis, Plt Dirjen PP Kunjungi Lapas Kelas I Bandar Lampung	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Plt. Dirjen PP, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kalapas I Bandar Lampung
Selasa, 02 Agustus 2022	Penguatan Perancang Perundang-undangan & Sosialisasi UU Pemasarakatan, Plt. Dirjen PP Harapkan Dapat Meningkatkan Wibawa Pemasarakatan	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Dirjen PP, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Selasa, 02 Agustus 2022	Tingkatkan Kualitas SDM, 12 Pegawai Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Seleksi Diksukim	Kantor Wilayah Lampung	Pegawai Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Rabu, 03 Agustus 2022	Hari Pertama Pendampingan Pendaftaran E-katalog Sektoral, Kanwil Kemenkumham Lampung Siap Sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Setwil UKPBJ
Rabu, 03 Agustus 2022	Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Masyarakat Miskin Triwulan II T.A. 2022, Kakanwil : Negara Hadir Pada Masyarakat melalui OBH	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, OBH
Rabu, 03 Agustus 2022	Melawan Tim Basket Kanwil DJBC, Persatuan Bolabasket Pengayoman Raih Kemenangan dengan skor 38-26	Universitas Lampung	Persatuan Bolabasket Pengayoman Kanwil Lampung
Kamis, 04 Agustus 2022	Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Tinjau Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi terkait Peningkatan Klasifikasi Kelembagaan	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 04 Agustus 2022	Peninjauan Layanan Publik oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN RB, Karo Perencanaan Di Kanwil Kelas III Non TPI Kotabumi	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Divisi Administrasi
Kamis, 04 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Saksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Hotel Novotel, Bandar Lampung	Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Lampung
Kamis, 04 Agustus 2022	Kolaborasi Antar Kanwil, Kadiv Yankum Mewakili Kakanwil Kemenkumham Lampung Buka Secara Resmi Sosialisasi Tugas dan Fungsi BHP Jakarta	Hotel Novotel, Bandar Lampung	Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Lampung
Kamis, 04 Agustus 2022	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan-RB Berikan Penguatan pada Jajaran Kantor Wilayah Kumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Kantor Wilayah
Kamis, 04 Agustus 2022	Minimalisir Pelanggaran Serta Pendeteksian Dini Gangguan Kamtib, Kadivpas Pimpin Razia Gabungan di Lapas Kotabumi	Lapas Kelas IIA Kotabumi	Kepala Divisi Pemasarakatan
Jumat, 05 Agustus 2022	Dukung Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM, Kanwil Kemenkumham Lampung Sebagai Narasumber di Sosialisasi Fasilitasi Merek Dagang	Yunna Hotel Bandar Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Jumat, 05 Agustus 2022	Jalin Sinergitas antar Lembaga, Kanwil Kemenkumham Lampung lakukan Audiensi ke Walikota Bandar Lampung	Kantor Walikota Kota Bandar Lampung	Walikota Bandar Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama
Jumat, 05 Agustus 2022	Semangat menjaga kebugaran tubuh, Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Lakukan Olahraga Senam Bersama	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Seluruh Pegawai
Jumat, 05 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Audiensi Terkait Pengesahan dan Wisuda Calon Warga Baru PSHT	Polresta Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Sabtu, 06 Agustus 2022	Peringatan HUT RI dan HDKD ke-77, Kadivpas Kanwil Lampung Membuka Kegiatan Panggung Seni dan Lomba Menyanyi Bagi WBP	Rutan I Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan

Minggu, 07 Agustus 2022	Kemenkumham Catat 2 Rekor MURI pada Lomba Esports	Jakarta	Sekjen
Senin, 08 Agustus 2022	Pimpin Rapat, Kadiv Yankum Beri Penguatan Terkait Peningkatan Fungsi dan Pemanfaatan Perpustakaan Hukum Kanwil Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 08 Agustus 2022	Melalui Apel Pagi, Kakanwil Kemenkumham Lampung Ingatkan Untuk Selalu Semangat Serta Berkomitmen Tinggi Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab.	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh pegawai
Selasa, 09 Agustus 2022	Kunjungi Sekretariat Pusat UKPBJ Kemenkumham RI, Kanwil Lampung Konsultasikan Teknis dan Ekspose Pelaksanaan Tender Rehab Kantor dan Rumah Negara	Jakarta	Karo BMN, Kasubag Keuangan & BMN
Selasa, 09 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Rapat Monitoring Fasilitas Pelaksanaan Propemperda Kab. Tanggamus	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus	Kasubid Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 10 Agustus 2022	Menteri Yasonna: Pemimpin Tidak Sekedar Bertahan, Tetapi Berkembang dan mewariskan Legacy	Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Rabu, 10 Agustus 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Berikan Penguatan TUPOKSI Pada Jajaran Rutan Kelas IIB Menggala	Rutan Kelas IIB Menggala	Kepala Kantor Wilayah
Kamis, 11 Agustus 2022	Tingkatkan Kualitas Pemahaman Politik Terkait Proses Administrasi, Kanwil Lampung Gelar Diseminasi Layanan Partai Politik	Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Plh.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 11 Agustus 2022	Kadivpas Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Persiapan Remisi Umum Jelang Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Kamis, 11 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti secara Virtual Kegiatan Evaluasi Barang Milik Negara Oleh Biro Pengelolaan BMN	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Plt. Kabag Umum, Kasubag Keuangan & BMN
Kamis, 11 Agustus 2022	Fasilitasi Ruang Diskusi Administrasi Pendaftaran Parpol, Edi Kurniadi Buka Giat Diseminasi Layanan Partai Politik	Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Plh.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 11 Agustus 2022	Bersih-Bersih Taman Makam Pahlawan, Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung lengkapi Rangkaian Kegiatan Bakti Sosial HDKD Ke-77	Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Kamis, 11 Agustus 2022	Perkuat Tahapan Perencanaan, Kanwil Lampung Laksanakan Rapat Monitoring Fasilitas Propemperda Kab Pesawaran	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	Kepala Bidang Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kamis, 11 Agustus 2022	Lakukan Monitoring & Evaluasi, Kadivpas berikan Semangat dan Motivasi kepada Warga Binaan baru di Lapas Gunung Sugih	Lapas Kelas IIA Gunung Sugih	Kepala Divisi Pemasarakatan
Jumat, 12 Agustus 2022	Hari Terakhir Pendampingan Pendaftaran E-Katalog Sektoral, Sebanyak 27 UMKK daftarkan Produknya di Setwil UKPBJ Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Setwil UKPBJ
Jumat, 12 Agustus 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Kanwil Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama
Jumat, 12 Agustus 2022	Dalam Rangka Memperingati HDKD Ke-77, Kanwil Lampung Laksanakan Upacara Tabur Bunga di TMP Bandar Lampung	Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Jumat, 12 Agustus 2022	Perkuat Tahapan Perencanaan, Kanwil Lampung Laksanakan Rapat Monitoring Fasilitas Propemperda Kab Lampung Timur	Kantor Wilayah Lampung	Kasubid Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Sabtu, 13 Agustus 2022	Ratusan Peserta Antusias Meriahkan Kegiatan Sepeda Santai Dalam Rangka Hari Dharma Karya Dhika Ke-77 Tahun 2022.	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Sabtu, 13 Agustus 2022	Kemeriahan Semarak HDKD ke-77, Kanwil Lampung Serahkan Piala dan Hadiah Bagi Para Pemenang Lomba Olahraga	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Sabtu, 13 Agustus 2022	Euforia Kemeriahan HDKD Ke-77, Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Kegiatan Jalan Santai	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Sabtu, 13 Agustus 2022	Gelorakan Semangat Bulan Bakti Dharma Karya Dhika 2022, Kakanwil Kemenkumham Lampung Kick-Off Kegiatan Sepeda Santai dan Jalan Sehat HDKD Ke-77	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT

Senin, 15 Agustus 2022	Kanwil Lampung Dampingi Biro Umum Sekretariat Jenderal, Lakukan Monitoring dan Evaluasi di Lapas Kelas IIA Kotabumi	Lapas Kelas IIA Kotabumi	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Tim Biro Umum dan Biro Keuangan
Senin, 15 Agustus 2022	Laksanakan Monitoring Propemperda pada Pemkab. Tulang Bawang Barat, Kanwil Kemenkumham Lampung Rumpukan Harmonisasi 2 Ranperda	Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Senin, 15 Agustus 2022	Bahas Raperda Keperawatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kanwil Kemenkumham Lampung Senantiasa Terbuka Laksanakan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Senin, 15 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) Ditjen Pemasarakatan Raih Terbaik Kedua dalam Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2021	Kanwil DJPb Propinsi Lampung	UAPPAW Ditjen Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Senin, 15 Agustus 2022	Penguatan Tusi Kehumasan, Sekjen Kemenkumham: Era Disrupsi, Humas Harus Adaptif dan Inovatif	Kantor Wilayah Lampung	Kabag Program dan Humas, Tim Humas
Senin, 15 Agustus 2022	Inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal, Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Senin, 15 Agustus 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Yankumham Apresiasi Sinergi Semua Pihak dalam Pencapaian Target Kinerja	Kantor Wilayah	Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh pegawai
Selasa, 16 Agustus 2022	Kakanwil Kemenkumham Lampung Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan PPNS Dan PAW Anggota MPDN Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat.	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, PPNS
Selasa, 16 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dan Ikrar Setia Khilafatul Muslimin Kepada NKRI	Kantor Gubernur Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan
Rabu, 17 Agustus 2022	Pemberian Remisi Umum Dalam Rangka HUT RI ke-77, Kakanwil Lampung Beri Selamat Kepada Warga Binaan Yang Mendapatkan Remisi	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah
Rabu, 17 Agustus 2022	Dorong Percepatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kab. Tanggamus, Kanwil Lampung Pimpin Rapat Harmonisasi RANPERDA	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus	Kepala Bidang Hukum, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 17 Agustus 2022	Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Menkumham Yasonna Ajak Seluruh Jajaran Bersatu Padu untuk Indonesia Maju	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, seluruh pegawai
Jumat, 19 Agustus 2022	HUT Kemenkumham, Yasonna Minta Jajarannya Jaga Kepercayaan Publik	Jakarta	Menkumham, Yasonna Laoly
Jumat, 19 Agustus 2022	Syukuran HDKD Ke-77, Kakanwil Edi Apresiasi Keterampilan Andikpas dan WBP	LPKA Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, seluruh pegawai
Jumat, 19 Agustus 2022	Puncak Acara HDKD Ke-77, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Upacara Hari Dharma Karyadhika	LPKA Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, seluruh pegawai
Senin, 22 Agustus 2022	Yasonna: Kekayaan Intelektual Bisa Topang Kemajuan Ekonomi Papua	Papua	Menkumham, Yasonna Laoly
Senin, 22 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadirkan Narasumber dari Ditjen KI, Pemerintah, dan APH, Wujudkan Kolaborasi dalam Sosialisai Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama, Ditreskrimsus Polda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, JFT Penyidik KI
Senin, 22 Agustus 2022	Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Dorong Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat dan APH, Tegakkan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual	Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama, Ditreskrimsus Polda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, JFT Penyidik KI
Senin, 22 Agustus 2022	Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Resmi Membuka Sosialisasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Tahun 2022	Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama, Ditreskrimsus Polda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, JFT Penyidik KI
Senin, 22 Agustus 2022	Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Edi Kurniadi Ajak Seluruh Pegawai Untuk Tingkatkan Kebersamaan dan Kinerja Dalam Pelayanan Publik	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh pegawai
Selasa, 23 Agustus 2022	Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pameran Layanan Publik Terpadu	Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Administrasi
Selasa, 23 Agustus 2022	Kadiv Yankum Buka Kegiatan Pendalaman Materi Perancang PERDA dan Perancangan PERDA T.A. 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 24 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung melalui Kadivpas Lampung melaksanakan Kegiatan Penguatan Petugas Pemasarakatan di Rutan Kruai	Rutan Kruai	Kepala Divisi Pemasarakatan
Rabu, 24 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti High Level Meeting dan Forum Koordinasi Pelaksanaan RANHAM 2021 - 2025	Kantor Wilayah Lampung	Kasubid Pemajuan Hak Asasi Manusia
Rabu, 24 Agustus 2022	Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Kanim Kalianda	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian
Rabu, 24 Agustus 2022	Kunjungi Kanim Kalianda, Kakanwil Kumham Lampung Tinjau Sarpras Pelayanan Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian
Jumat, 26 Agustus 2022	Dengan Semangat Pasti Lebih Baik, Kanwil Lampung Ikuti Senam Jasmani Kumham Sehat & Produktif	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah dan seluruh pegawai
Jumat, 26 Agustus 2022	Selenggarakan Penguatan dan Evaluasi, Kemenkumham RI Targetkan Raih Predikat Memuaskan dalam Penyelenggaraan SPBE Tahun 2023	Kantor Wilayah Lampung	Kabag Program dan Humas, Tim Humas
Senin, 29 Agustus 2022	Kantor Wilayah Selesaikan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Tulang Bawang Barat Terkait Usaha Mikro, Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan	Kantor Wilayah Lampung	Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 31 Agustus 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Turut Dukung Penilaian SAKIP dan RB Tingkat Unit Eselon I	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Pimti Pratama

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Jumat, 02 September 2022	MKN Wilayah Provinsi Lampung Lakukan Klarifikasi Terhadap Notaris	Kantor Wilayah Lampung	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung
Jumat, 02 September 2022	Jaga Kesehatan Demi Peningkatan Produktifitas Kerja, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Senam Bersama	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Seluruh Pegawai
Jumat, 02 September 2022	Ikuti Intruksi Kakanwil, Lapas Gunung Sugih Adakan Bimtek Program TB dan Sisir Kasus TB, Bekerjasama dengan Dinkes Lampung Tengah, Global Fund dan Puskesmas Gunung Sugih	Lapas Gunung Sugih	Tenaga kesehatan dan pejabat Lapas Kelas IIB Gunung Sugih
Jumat, 02 September 2022	MPDN Kota Bandar Lampung Laksanakan Gelar Perkara Terkait Adanya Laporan Dugaan Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	Kantor Wilayah Lampung	Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
Senin, 05 September 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung , Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi
Senin, 05 September 2022	Persiapan Penyusunan Proyek Perubahan, Kadiv Yankum Gelar Rapat Bersama Tim Efektif	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Selasa, 06 September 2022	Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai, Edi Kurniadi : Tanamkan Jiwa Disiplin Dalam Setiap Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung , Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Biro Kepegawaian Setjen
Rabu, 07 September 2022	Disaksikan Kadivpas Lampung, Lapas dan Rutan Kota Agung Teken MoU Dengan BNNK Tanggamus	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Agung	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Rabu, 07 September 2022	Jelang Pesta Demokrasi 2024, Peserta Antusias Pada Kegiatan Diseminasi Layanan Parpol	Hotel Horison Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rabu, 07 September 2022	Siswa Sekolah Pahami Pengetahuan Kekayaan Intelektual dengan Mudah dan Menyenangkan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Guru KI
Rabu, 07 September 2022	Hari Ke-2 Supervisi dan Pembinaan Pembinaan Disiplin Pegawai, Tim Biro Kepegawaian Berikan Penguatan Pengelolaan Kinerja Pegawai	Kantor Wilayah Lampung	Tim Biro Kepegawaian Setjen, Kasubag Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga
Rabu, 07 September 2022	Fasilitasi Ruang Diskusi Terkait Administrasi Parpol, Kakanwil Lampung Buka Kegiatan Diseminasi Layanan Partai Politik	Hotel Horison Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 08 September 2022	Jelang Pelaksanaan DJKI Mengajar, Kadiv Yankum Adakan Simulasi Mengajar Bagi Para RuKI	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kamis, 08 September 2022	Dorong Percepatan Reforma Agraria, Kanwil Lampung Lakukan Harmonisasi Ranperda Tulang Bawang Barat Tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum Setda Kab Tulang Bawang Barat
Jumat, 09 September 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Menjadi 5 Kantor Wilayah Teratas Realisasi Belanja Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Versi Kementerian Keuangan RI	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi
Jumat, 09 September 2022	Bantuan Komputer untuk Lapas Kelas I Bandar Lampung Tunjang Produktivitas dan Pelayanan kepada Masyarakat	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi administrasi, Plt. Kabag Umum, Kabag TU Lapas I Bandar Lampung
Jumat, 09 September 2022	Ajarkan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kanwil Lampung Siap Jelang DJKI Mengajar	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Guru KI
Jumat, 09 September 2022	Tertib Administrasi, Kadiv Administrasi Serahkan SHM Tanah Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi administrasi, Plt. Kabag Umum, Kabag TU Lapas I Bandar Lampung
Senin, 12 September 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Kunjangan Kerja Bapemperda Kab. Pringsewu	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Pringsewu
Senin, 12 September 2022	Kadiv Keimigrasian bersama Jajaran Ikuti Sosialisasi Peraturan Izin Tinggal Keimigrasian	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Kepala Divisi Keimigrasian
Senin, 12 September 2022	Kekayaan Intelektual Komunal Tercatat, Kesejahteraan Masyarakat Meningkat	Hotel Emersia, Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 12 September 2022	Berikan Sambutan dalam Sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Kanwil Kemenkumham Lampung Tegaskan: Perlindungan KIK Harus Terus Ditegakkan	Hotel Emersia, Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 12 September 2022	Dorong Ekonomi Kreatif Daerah, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Membuka Secara Resmi Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal	Hotel Emersia, Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Senin, 12 September 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Yankum Ingatkan Untuk Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial	Kantor Wilayah Lampung secara virtual	Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh pegawai

Selasa, 13 September 2022	Kepala Divisi Administrasi menerima kunjungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka Movev Pengelola Keuangan, Hibah, dan Penyelesaian Kerugian Negara	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Administrasi, Tim Biro Keuangan Setjen
Selasa, 13 September 2022	Hari Pertama Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris, MPDN Kota Badar Lampung Sambangi 22 Kantor Notaris Se-Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
Selasa, 13 September 2022	Rekonsiliasi Pengelolaan BMN: Wujudkan Database BMN yang Komprehensif dan Akurat	Bandung	Sekjen, Kepala Kantor Wilayah
Selasa, 13 September 2022	Rekonsiliasi BMN Regional Sumatera I dan Jawa I, Kakanwil Kumham Lampung Siap Ikuti Arahan Sekjen Kemenkumham RI	Bandung	Sekjen, Kepala Kantor Wilayah
Selasa, 13 September 2022	Kadiv Yankum Lampung Beri Penguatan Suncang Terkait Pengharmonisasian Konsepsi Raperda Kab. Lampung Selatan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Selasa, 13 September 2022	Respon Cepat Rekomendasi MPDN, MPWN Gelar Rapat	Kantor Wilayah Lampung	Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung
Rabu, 14 September 2022	Rencanakan Acara Sertijab Dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah, Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Rapat Persiapan Kegiatan	Kantor Wilayah Lampung	Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT
Kamis, 15 September 2022	Kanwil Lampung Terima Supervisi Perancangan Peraturan Daerah Oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Wilayah Lampung	
Jumat, 16 September 2022	Bentuk Kader Kesehatan, Kadivpas Saksikan Teken PKS Lapsustik Kelas IIA Bandar Lampung dengan RS Advent Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Jumat, 16 September 2022	Jaga Kebugaran Jasmani dan Rohani, Kakanwil dan Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Senam Bersama	Kantor Wilayah Lampung	
Jumat, 16 September 2022	Kadiv Keimigrasian Dampingi Perwakilan Kemenpan-RB Tinjau Pelayanan Publik Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Senin, 19 September 2022	Movev Jabatan Fungsional Keimigrasian Kanim Kelas III Non TPI Kotabumi, Edi Kurniadi: Bekerja Dengan Hati Yang Ikhlas dan Senang	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 20 September 2022	Inventarisasi Formasi Jabatan Analis Kekayaan Intelektual, Tim Ditjen KI dan Birowai Kunjungi Kanwil Kumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 20 September 2022	Dukung Reformasi Hukum, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Technical Meeting Persiapan Dialog RKUHP	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 20 September 2022	Tingkatkan Kualitas IPK IKM, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Pemutakhiran Substansi Aplikasi 3AS	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 20 September 2022	Hadiri Pembukaan Penelitian RKBMN, Kanwil Kemenkumham Lampung Pastikan Beri Kinerja Optimal dalam Penyusunan RKBMN	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 20 September 2022	Pertemuan Rutin dan Arisan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Waktilkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hadiri Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Ceceran Minyak Bumi di Provinsi Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Konsultasi dan Koordinasi Pengharmonisasian Raperda, Kanwil Kumham Lampung Terima Audiensi DPRD Kabupaten Lampung Tengah	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Kadivpas Kanwil Lampung Saksikan Penggeledahan di Lapas Kelas IIA Kotabumi	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Kadiv Yankum Pimpin Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Pembahasan Raperda Kota Bandar Lampung Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Bersama Ditjen KI dan Birowai Setjen, Kantor Wilayah Lampung Lakukan Perhitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.16 Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 21 September 2022	Buka Supervisi Pagu Anggaran TA. 2023, Edi Kurniadi: Wujudkan Pengelolaan Anggaran Semakin PASTI	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 22 September 2022	Tingkatkan Kemampuan Operator SDP, Direktorat TI dan Kerjasama DITJENPAS Gelar Penguatan Operator SDP bidang Pengamanan dan Pemeliharaan TI di Kanwil Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Jumat, 23 September 2022	Lantik JFT Pembimbing Kemasyarakatan, Edi Kurniadi: Jangan Pernah Surut Untuk Memberikan Yang Terbaik	Kantor Wilayah Lampung	
Sabtu, 24 September 2022	Peduli HAM, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Identifikasi Ranperda Berperspektif HAM	Kantor Wilayah Lampung	
Minggu, 25 September 2022	Kadivpas Kanwil Lampung Saksikan Teken PKS Antara Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dan BPJS	Kantor Wilayah Lampung	
Senin, 26 September 2022	Ikuti Seminar Latpimnas Tingkat II, Kadivmin Kanwil Lampung Paparkan Rancangan Aksi Perubahan Dihadapan Kakanwil	Kantor Wilayah Lampung	
Senin, 26 September 2022	Saksikan Serah Terima Jabatan Plt.Kalapas Kelas IIA Kotabumi dan Plt.Karupbasan Kelas I Bandar Lampung, Edi Kurniadi : Laksanakan Amanah dengan Penuh Tanggung Jawab	Kantor Wilayah Lampung	
Senin, 26 September 2022	Pimpin Apel Paqi Terakhir Selaku Kakanwil, Edi Kurniadi: Bekerjalah Dengan Hati Yang Ikhlas	Kantor Wilayah Lampung	
Selasa, 27 September 2022	Semakin Terbuka dan Obyektif, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Dialog RKUHP Bersama Akademisi	Kantor Wilayah Lampung	

Rabu, 28 September 2022	Dorong Percepatan Penyusunan Naskah Akademik Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Kanwil Lampung Gelar Rapat FGD Bersama Bapenda Kab. Mesui	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Berikan Pengetahuan Kekayaan Intelektual Sejak Dini. Kanwil Kemenkumham Lampung Sosialisasikan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Sukseskan Program DJKI Mengajar. Kanwil Kemenkumham Lampung Kenalkan Kekayaan Intelektual Sejak Dini Di SMP Negeri 3 Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Melalui Program RuKI. Kanwil Kumham Lampung Kenalkan KI Sejak Dini Pada SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Bimbingan Teknis Aplikasi AHU Online Dalam Layanan Legalisasi Apostille	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Kenalkan KI Sejak Dini. Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi KI di SMP Perintis 1 Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Resmikan Mushola Baiturrohim Lapas Kelas IIA Metro, Edi Kurniadi: Wujud Dari Pelayanan Prima	Kantor Wilayah Lampung	
Rabu, 28 September 2022	Mengajar di SMP Perintis 2 Bandar Lampung, Guru KI Kanwil Kemenkumham Lampung Kenalkan Siswa pada Kekayaan Intelektual	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Pererat Sinergitas, Kakanwil Lampung Terima Audiensi Dit Intelkam Polda Lampung	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Kadivpas Kanwil Lampung Berikan Penguatan Tusi Regu Pengamanan Rutan Kelas IIB Menggala	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila Pada WBP. Jajaran Kumham Lampung Berkomitmen Pada Penyelenggaraan Klinik Pancasila	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Berlangsung Tertib, 85 Calon Taruna Poltekop dan Poltekim Ikuti Seleksi Psikotes	Kantor Wilayah Lampung	
Kamis, 29 September 2022	Temui Edi Kurniadi di Ruang Kerjanya. Wakil Gubernur Lampung Doakan Sang Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung yang Akan Menjelang Masa Purnabakti	Kantor Wilayah Lampung	
Jumat, 30 September 2022	Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	Kantor Wilayah Lampung	

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
Sabtu, 01 Oktober 2022	Dalam Rangka Bhakti Sosial, Plt. Kakanwil Lampung Tinjau Kegiatan Khitan Massal Gratis di Lapas Kelas I Bandar Lampung	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung
Sabtu, 01 Oktober 2022	Komitmen Amalkan Nilai Pancasila, Kantor Wilayah Lampung Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila	Kantor Wilayah Lampung	Pimti Kanwil Lampung dan Seluruh Pegawai/ASN
Senin, 03 Oktober 2022	Kadivyanhum Gelar Rapat Koordinasi internal Tim Efektif Pegawai Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Proyek Perubahan	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Team Efektif
Senin, 03 Oktober 2022	Mengawali sebagai Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Topan Sopuan Pimpin Apel Pagi dan Ingatkan Untuk Tetap Jaga Kedisiplinan Waktu	Kantor Wilayah Lampung	Pimti Kanwil Lampung dan Seluruh Pegawai/ASN
Selasa, 04 Oktober 2022	Memperkuat Kemudahan Investasi dan Mendukung Kepariwisata, Kepala Divisi Keimigrasian Ikuti Forum Group Discussion	The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta	Menkumham, Plt. Dirjen Imigrasi, Kepala Divisi Imigrasi
Rabu, 05 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rakor Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Dispora Prov Lampung, Analisis Hukum
Rabu, 05 Oktober 2022	Ikuti Rakor Satgas, Kanwil Kemenkumham Lampung Siap Dukung Peningkatan Investasi Asing dan Devisa Negara	The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta	Menkumham, Plt. Dirjen Imigrasi, Kepala Divisi Imigrasi
Kamis, 06 Oktober 2022	Bekerja Sama Dengan Kanwil Lampung, BPHN Gelar FGD Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Kepala Divisi Administrasi
Jumat, 07 Oktober 2022	Turut Menyambut Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Berpesan untuk Jaga Kekompakan dan Solidaritas	Emersia Hotel	Plt. Kakanwil, Sataff Ahli Bidang Ekonomi
Jumat, 07 Oktober 2022	Resmikan 170 Desa Sadar Hukum di Bali, Yasonna Berharap Daerah Lain Menyusul	Bali	Menkumham
Sabtu, 08 Oktober 2022	Lakukan Kunjungan ke Lapas Kelas I Bandar Lampung, Plt. Kakanwil Lampung Dampingi Staff Ahli Menteri Hukum dan HAM	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Staff Ahli Menteri, Plt. Kantor Wilayah, Kadivmin, Kadivpas dan Kadivim
Senin, 10 Oktober 2022	Pimpin Apel Pagi, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ingatkan Tetap Jaga Kekompakan dan Integritas sebagai ASN	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Senin, 10 Oktober 2022	Pimpin Rapat, Kadivyanhum Beri Penguatan Tugas dan Fungsi Pada Penyuluh Hukum	Kadivyanhum	Kadivyanhum, JFT Penyuluh Hukum
Senin, 10 Oktober 2022	Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Masing-masing Divisi	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Kepala Divisi
Selasa, 11 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Bersama Biro BMN, Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Kadivmin dan Subbag Keu BMN
Selasa, 11 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Serahkan 3 (Tiga) Sertifikat Hak Cipta Pada Sosialisasi HAKI Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Se-Kota Metro	Grand Skuntum Kota Metro	Kadivyanhum, Wakil Walikota Metro, Pemkot Metro
Rabu, 12 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Persiapan Seleksi Pra Dipa & Tender Dini Tahun 2023	Kantor Wilayah Lampung	Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi
Rabu, 12 Oktober 2022	Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV T.A 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Kadivmin, Kadivpas, Kadivyanhum, Kadivim dan Seluruh KaUPT Lampung
Kamis, 13 Oktober 2022	Tingkatkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi B09	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbag Humas, RB dan TI
Kamis, 13 Oktober 2022	Kanwil Kumham Lampung Selenggarakan Rapat Pengharmonisasian Ran perda Kabupaten Pesisir Barat Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kantor Wilayah Lampung	JFT Suncang dan Pemkot Pesibar
Kamis, 13 Oktober 2022	Ajukan Harmonisasi 6 Raperda Inisiatif DPRD, Kanwil Lampung Terima Audiensi DPRD Lampung Tengah	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, DPRD Lamteng, Kassubid FPPHD
Jumat, 14 Oktober 2022	Penguatan Tusi Pelayanan KI, Kadivyanhum : Prospek Kekayaan Intelektual Akan Semakin Pesat	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Subbidang KI
Jumat, 14 Oktober 2022	Kanwil Lampung Ikuti Penguatan UPT Pemasarakatan Oleh Sesditjen PAS Terkait Proses Pengadaan Barjas	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kadivpas, Subbag Keu dan BMN
Jumat, 14 Oktober 2022	Penyebarluasan Informasi Layanan Apostile, Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Lampung	Pemkab dan Pemkot Lampung Barat	Kasubbid Pelayanan AHU
Jumat, 14 Oktober 2022	Recover Together, Recover Stronger Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama, Kanwil Kemenkumham Lampung Adakan Rapat Persiapan Semarak Presidensi G20 Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kadivyanhum dan Seluruh Kepala UPT
Jumat, 14 Oktober 2022	Kanwil Kumham Lampung Terima Kunjungan Anggota DPRD Kab. Lampung Timur Terkait Konsultasi Usulan Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2023	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, DPRD Kab. Lampung Timur
Minggu, 16 Oktober 2022	Persatuan Golf Pengayoman (PGP) Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Latihan Bersama Semarakkan G20 Tahun 2022	Lapangan Golf	Seluruh KaUPT se-Provinsi Lampung

Senin, 17 Oktober 2022	Jadi Satker yang Pertama, Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung Terima Visitasi Penyelenggaraan SPBE Oleh Tim Asesor	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Tim Verifikator SPBE
Senin, 17 Oktober 2022	Plt. Kakanwil Lampung Buka Kegiatan Visitasi Penyelenggaraan SPBE Oleh Tim Asesor	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Tim Verifikator SPBE
Senin, 17 Oktober 2022	Inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal, Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji	Dispendikbud Kab. Mesuji	Subbidang Kekayaan Intelektual
Senin, 17 Oktober 2022	Pimpin Apel Pagi, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Tekankan Target Kinerja Tahun ini	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Selasa, 18 Oktober 2022	Hari Ke-2 Visitasi Oleh Tim Asesor, Lapas Kelas I Bandar Lampung Siap Wujudkan Birokrasi Digital dan Dukung Penyelenggaraan SPBE	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Asesor SPBE
Selasa, 18 Oktober 2022	Visitasi Penyelenggaraan SPBE, Tim Asesor Kunjungi Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Rupbasan Bandar Lampung	Tim Asesor SPBE
Selasa, 18 Oktober 2022	Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Pembukaan Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin
Selasa, 18 Oktober 2022	Buka Pertemuan Nasional JDIH, Yasonna Tekankan Pentingnya Pendokumentasian dan Sosialisasi Kebijakan Hukum	Hotel Grand Sahid Jakarta	Menkumham
Rabu, 19 Oktober 2022	Percepatan Tusi Pelayanan Hukum dan HAM di Kab. Mesuji, Kadiv Yankum Audiensi Dengan Pi Bupati Mesuji	Pemkab Mesuji	Kadivyanhum, Pj. Kabupaten Mesuji
Rabu, 19 Oktober 2022	Rapat Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kabupaten Lampung Tengah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Pemkab Lampung Tengah	Kabid Hukum, JFT Suncang
Rabu, 19 Oktober 2022	Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung, Hermansyah Siregar Resmi buka Sosialisasi Wasdak Keimigrasian dan Diseminasi Permenkumham No. 39 Tahun 2021	Ballroom Hotel Novotel	Plt. Kakanwil, Kadivmin
Rabu, 19 Oktober 2022	Beri Apresiasi WBP LPP Bandar Lampung, Kadivmin Hadiri Wisuda Program Tuntas Huruf Hijaiyah	LPP Bandar Lampung	Kadivmin, Pejabat Administrator Kanwil Lampung
Rabu, 19 Oktober 2022	Jelang Presidensi G20 Indonesia 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Do'a Bersama Secara Serentak	LPP Bandar Lampung	Kadivmin, Pejabat Administrator Kanwil Lampung
Rabu, 19 Oktober 2022	Membahas Pemenuhan Hak Pilih WBP Sebagai Wujud Penghormatan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Temui Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil dan Komnas HAM
Rabu, 19 Oktober 2022	Diseminasi Layanan Apostille: Pangkas Birokrasi, Legalisasi Dokumen Semakin Mudah	Ballroom Swiss Bell Hotel	Plt. Kakanwil dan Analis Hukum Muda Ditjen AHU
Rabu, 19 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung hadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Universitas Bandar Lampung Raih Penghargaan	Hotel Grand Sahid Jakarta	Kadivyanhum, Kasubbid Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH
Kamis, 20 Oktober 2022	Kunjungi Lapas Kalianda, Plt. Kakanwil Kumham Lampung Tinjau Pelayanan Publik dan Beri Penguatan Tusi Petugas Lapas	Lapas Kalianda	Plt. Kakanwil dan Seluruh Pegawai Lapas
Kamis, 20 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Persiapan Kegiatan Jalan Sehat Kumham Semarak G20	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Plt. Kabag Umum
Kamis, 20 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Peranan HAKI Dalam Peningkatan Daya Saing UMKM	Graha Wangsa	Kadivyanhum
Kamis, 20 Oktober 2022	Dukung Gerakan Literasi di Provinsi Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung Sebagai Narasumber Diseminasi Legalitas Komunitas Literasi	Ruang Pertemuan Jaya Bakery Cafe	Kadivyanhum
Kamis, 20 Oktober 2022	Berlangsung Tertib, Kanwil Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Harmonisasi Ranperda perubahan Atas Perda No 8 Tahun 2017	Universitas Lampung	JFT Suncang
Kamis, 20 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Laporan Hasil Visitasi Penyelenggaraan SPBE oleh Tim Asesor	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kabag Program dan Humas, Kasubbag HRBTI
Kamis, 20 Oktober 2022	Kanwil Lampung Gelar Kegiatan Penyusunan Pagu Kebutuhan TA 2024 Bersama Biro Perencanaan Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Biro Perencanaan, Kadivmin, Kabag Program dan Humas
Kamis, 20 Oktober 2022	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JFT, Kadivmin: Jaga Integritas dan Teruslah Berinovasi	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Pejabat Administrator Kanwil Lampung, JFT
Jumat, 21 Oktober 2022	Kanwil Lampung rampungkan Harmonisasi Ranperda Tanggamus tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan	Kantor Wilayah Lampung	JFT Suncang
Jumat, 21 Oktober 2022	Kanwil Lampung Lakukan Rapat Pengolahan dan Analisa Data SIPKUMHAM	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, JFT Penyuluh Hukum
Jumat, 21 Oktober 2022	Klarifikasi Terhadap Notaris, MKN Wilayah Provinsi Lampung Laksanakan Rapat	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, MKN
Jumat, 21 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Berpartisipasi Kegiatan Jalan Sehat Kumham Semarak G20, Recover Together, Recover Stronger, Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama.	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Jumat, 21 Oktober 2022	Recover Together - Recover Stronger, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Apel Pelepasan Jalan Sehat Kumham Semarak G20	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung

Senin, 24 Oktober 2022	Kunjungi Direktorat Perdata Ditjen AHU, Kadiv Yankum Bahas Pelantikan MKN Hingga Pelaksanaan PMPJ	Ditjen AHU	Kadiv yankum, Direktur Perdata Ditjen AHU
Senin, 24 Oktober 2022	Kadivmin Kanwil Lampung Terima Kunjungan Tim Biro BMN Terkait Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan BMN	Kantor Wilayah Lampung	Biro BMN, Kepala Divisi Administrasi, Plt. Kabag Umum
Senin, 24 Oktober 2022	Pimpin Apel Pagi, Kadivpas Kanwil Kemenkumham Lampung Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan dalam Beraktivitas	Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
Selasa, 25 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Koordinasi dan Klarifikasi di Wilayah Labuhan Maringgai	Kecamatan Labuhan Maringgai	Kadiv yankum, Plt. Kabid HAM, Kasubbid Pemajuan HAM
Selasa, 25 Oktober 2022	Pimpin Rapat, Kadivpas berikan Penguatan dan Evaluasi Kinerja UPT Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung	Kepala Kantor Wilayah	Kadivpas dan seluruh KaUPT
Rabu, 26 Oktober 2022	Hermansyah Siregar Lantik dan Ambil Sumpah 17 Pegawai Pejabat Administrasi Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung	Ballroom Emersia Hotel	Plt. Kakanwil dan Pejabat Admnsitrasi
Rabu, 26 Oktober 2022	Bahas Overcrowded Lapas/Rutan Wilayah Lampung, Plt. Kakanwil Lampung Buka Rakor Dilkumjakpol-Plus Tahun 2022	Ballroom Emersia Hotel	Plt. Kakanwil, Kadivpas, Kadivmin dan APH
Rabu, 26 Oktober 2022	Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Rapat Pra OPSGAB (Operasi Gabungan) Pengawasan Orang Asing Provinsi Lampung Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kadivim dan Pejabat Administrasi
Rabu, 26 Oktober 2022	Buka Penyusunan Disbursement Plan TA 2023, Plt. Kakanwil Lampung : Susun Rencana Lebih Realistis dan Berkualitas	Emersia Hotel	Plt. Kakanwil dan Kabag Program dan Humas, Kasubbag PP
Rabu, 26 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Kembali Gelar Rapat Pleno Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah	Ruang Rapat Bapedda Kota Metro	Kasubbid FPPHD dan JFT Suncang
Rabu, 26 Oktober 2022	Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Wawancara Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022	Emersia Hotel	Kadivmin dan Itjen
Rabu, 26 Oktober 2022	Menkumham Lantik 6 Orang Anggota MKNW Lampung Masa Bhakti 2022-2025	Jakarta	Menkumham dan MKNW
Kamis, 27 Oktober 2022	Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di PT Indonesia Evergreen Agriculture (EVERGREEN FEED)	Evergreen Feed	Kadivim dan Pejabat Administrasi
Kamis, 27 Oktober 2022	Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Kunjungan Kerja ke Lapas Narkotika, Rutan B.Lampung, Lapas Perempuan dan Rumpasan Bandar Lampung	UPT Bandar Lampung	Plt. Kakanwil, Kadivmin, Kadivpas, Kadivim
Kamis, 27 Oktober 2022	Beri Solusi Permasalahan Overcrowded Lapas/Rutan, Kumham Lampung Bersama APH Rakor Dilkumjakpol-Plus Tahun 2022	Emersia Hotel	Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung dan APH
Jumat, 28 Oktober 2022	Evaluasi Kinerja Pengelolaan JDIHN Tahun 2022, Kepala Pusat JDIHN kunjungi Provinsi Lampung	Pemprov Lampung	Kapus JDIHN, Kabid Hukum dan Kasubbid
Jumat, 28 Oktober 2022	Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Kunjungan Tim Direktorat Pidana Ditjen AHU Terkait Permasalahan Daktiloskopi dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Di Provinsi Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Tim Ditjen AHU
Jumat, 28 Oktober 2022	Kanwil Lampung Kembali Gelar Harmonisasi Perda Kabupaten Lampung Barat Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Ruang Rapat Skincau Pemkab Lampung Barat	Kabid Hukum, Kasubbid FPPHD
Jumat, 28 Oktober 2022	Kanwil Kemenkumham Lampung Fasilitas Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ruang Rapat Skincau Pemkab Lampung Barat	Kabid Hukum, Kasubbid FPPHD
Jumat, 28 Oktober 2022	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Launching Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kadivim dan Kabag Program dan Humas
Jumat, 28 Oktober 2022	Bersatu Bangun Bangsa, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Lampung
Minggu, 30 Oktober 2022	Kunjungan Khusus Direktur Jenderal AHU dan Audiensi Pengwil INI di Provinsi Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Dirjen AHU dan Jajaran, Pengurus Pengwil INI Lampung
Minggu, 30 Oktober 2022	Berikan Penguatan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Tim Direktorat Tata Negara Ditjen AHU Kunjungi Sub Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Subbid Pelayanan AHU dan Tim Direktorat Tata Negara Ditjen AHU
Minggu, 30 Oktober 2022	Direktur OPHI (Tudiono) Berikan Penguatan Layanan Apostille Pada Jajaran Sub Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Direktur OPHI dan Subbidang Pelayanan AHU
Senin, 31 Oktober 2022	Hadiri Rakor Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang KI, Kanwil Lampung Raih 2 Kategori Penghargaan	Jakarta	Kadiv yankum, Kasubbid KI
Senin, 31 Oktober 2022	Kadivim Ikuti Sosialisasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua	Kantor Wilayah Lampung	Kadivim dan Pejabat Administrasi
Senin, 31 Oktober 2022	Apel Pagi Kanwil Kemenkumham Lampung, Kadivmin Ingatkan Untuk Tetap Selalu Disiplin Waktu dan Disiplin Berpakaian Dinas	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
01/11/22	Kanwil Lampung Ikuti Rapat Supervisi Data Terkait Evaluasi Program Anggaran dan Kinerja TA 2022 Oleh Sekretariat BPHN	Kantor Wilayah Lampung	Tim BPHN, Kasubbid Penyuluhan , Bantuan Hukum dan JDIH
01/11/22	SELAMAT UNTUK RUKI, Kanwil Kemenkumham Lampung Raih Peringkat Ke-2 Terbaik Pelaksanaan Program Unggulan DJKI Mengajar Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil
01/11/22	Kadivmin Kanwil Lampung Terima Kunjungan Sekretariat BPHN Dalam Rangka Evaluasi	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Sekretariat BPHN
01/11/22	Kadivpas, Dr. Farid Junaedi Berikan Jukrah Kepada KPLP & KPR Terkait Deteksi Dini	Kantor Wilayah Lampung	KPLP dan KPR
02/11/22	Supervisi Teknis Keimigrasian, Kadivim Kanwil Lampung Kunjungi Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	Kadivim, Kakanim Imigrasi
02/11/22	Tingkatkan Sinergitas, Kadivpas Lakukan Koordinasi Dengan BNNP Lampung Terkait Perjanjian Kerjasama UPT PAS di Wilayah Lampung	BNNP Lampung	Kadivpas, KaUPT dan KaBNNP
02/11/22	Kadivpas Kanwil Lampung Menghadiri Pelantikan Majelis Pembina Gudep 12.167 Serta PKS Untuk Peningkatan Layanan Kesehatan	Lapas Narkotika Bandar Lampung	Kadivpas, Kepala Narkotika Bandar Lampung dan Jajaran
02/11/22	Rakor Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang KI Berakhir, Kanwil Lampung Raih Penghargaan Lagi Dengan Menggagas Aplikasi SAKILA	Jakarta	Kadivyanikum, Kasubbid KI
02/11/22	Kadivmin Kanwil Lampung Hadiri Kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Sementara Evaluasi	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kasubbag Humas RB TI
03/11/22	Tingkatkan Keahlian Pengelolaan Laman Website Satker, Kanwil Lampung Ikuti Kegiatan	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbag Humas RB TI
03/11/22	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Ikuti Penguatan Pengawasan Internal Dalam Rangka Hari Jadi Inspektorat Jenderal Ke-56	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Pejabat Administrator
04/11/22	Permudah Mekanisme Pengajuan Sewa BMN, Kadivmin dan Tim Kanwil Lampung Beri Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sitopan BMN di UPT Kotabumi	Lapas, Rutan, Kanim dan Rupbasan Kotabumi	Kadivmin, Subbag Keuangan dan BMN
04/11/22	Lakukan Monitoring dan Evaluasi BMN, Kadiv Administrasi Lampung Kunjungi UPT di Kotabumi	Lapas, Rutan, Kanim dan Rupbasan Kotabumi	Kadivmin, Subbag Keuangan dan BMN
04/11/22	Kadivpas, Dr. Farid Junaedi Berikan Penguatan TUSI Terkait Kesehatan dan Perawatan WBP Pada Petugas Lapas Maupun Rutan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas dan Pejabat Struktural Lapas dan Rutan
04/11/22	Menuju Hidup Sehat dan Produktif Dalam Bekerja, Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
05/11/22	"Gas Poll", Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Menggelar Touring Bersama PTAP Semarak G20 dan Baksos	Kantor Wilayah Lampung	Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
05/11/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Serahkan Pencatatan Hak Cipta Lagu Indonesia Cahya Dunia Pada Acara Semarak UMKM dan Produk Pertanian Tanggamus 2022	Mall Boemi Kedaton	Kadivyanikum, Kasubbid KI
06/11/22	Tim Suncang Kanwil Rapat Pleno Raperda Kab. Tanggamus Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Tanggamus	Kasubbid FPPHD dan JFT Suncang
07/11/22	Pimpin Apel Pagi, Kadivmin Ingatkan Untuk Selalu Patuhi Aturan dalam Berpakaian Dinas dan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan seluruh pegawai kantor wilayah
08/11/22	Tingkatkan Layanan Pengawasan dan Pengaduan, Inspektorat Jenderal Beri Pendampingan Operator Aplikasi SIMWAS dan SIPIDU Jajaran Kanwil Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Itjen dan Pejabat Administrasi
08/11/22	Plt Kakanwil Lampung, Hermansyah Siregar Buka Kegiatan Workshop Administrator Aplikasi SIMWAS dan SIPIDU yang Diselenggarakan Inspektorat Jenderal	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Itjen dan Pegawai Kantor Wilayah
08/11/22	Berikan Kemudahan Legalisasi Dokumen, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Diseminasi	Ballroom Bukit Randu Hotel	Kadivyanikum, Kasubbid Pelayanan AHU
08/11/22	Apresiasi Aplikasi SITOPAN BMN, Kakanwil DJKN Lampung Bengkulu: Optimalkan Aset Negara!	Kantor DJKN Lampung Bengkulu	Kakanwil DJKN, Kadivmin dan Subbag Keuangan dan BMN
09/11/22	Dukung Film Karya Anak Bangsa, Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Nonton Bareng "Nariti"	Gedung Bioskop	Seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
09/11/22	Kunjungi Lapas Kalianda, Tim Inspektorat Jenderal Movey Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Lapas Kelas IIB Kalianda	Tim Itjen, Kalapas Kalianda dan Pegawai Penanggung Jawab Pengaduan Masyarakat
09/11/22	NKRI "Harga Mati" , Napiter Lapas Kelas I Bandar Lampung Bacakan Ikrar Setia Kepada NKRI di Hadapan Plt. Kakanwil Lampung	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Plt. Kakanwil, Kadivmin, Kadivpas, Kadivyanikum, Kadivim dan Kalapas Bandar Lampung
09/11/22	Kadivpas Pimpin Kegiatan Pengeledahan Blok Hunian dan Tes Urine Petugas di Lapas Kelas I Bandar Lampung	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Kadivpas dan Pegawai Lapas Kelas I Bandar Lampung
09/11/22	"Adaptif, Analisa SWOT dan Sosio Kultural", Hermansyah Siregar Lantik 11 Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Plt. Kakanwil, Kadivmin, Kadivpas, Kadivim dan Pejabat Administrator
10/11/22	Tim Inspektorat Jenderal Movey Pengelolaan Aplikasi SIPIDU pada Rutan Kelas I Bandar Lampung	Rutan Kelas I Bandar Lampung	Tim Inspektorat Jenderal dan Pegawai Rutan Kelas I Bandar Lampung
10/11/22	Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Tim Inspektorat Jendral Lakukan Movey di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Tim Inspektorat Jenderal dan Pegawai Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung
10/11/22	Dalam Rangka Peningkatan Layanan Keimigrasian yang Efektif dan Efisien, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Lauching Aplikasi E-VoA	Kantor Wilayah Lampung	Pejabat Administrasi Divisi Keimigrasian
10/11/22	Songsong Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Fasilitas Penuusunan Propemperda Kabupaten Pesawaran	Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Pesawaran	Kasubbid FPPHD dan JFT Suncang
10/11/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Giat Virtual Arahan Sekjen Kemenkumham Terkait ANEV Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pra DIPA dan Dini	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kadivim dan Kasubbag Keuangan dan BMN
10/11/22	Dukung Hasil Karya Anak Bangsa, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Pameran Produk Unggulan WBP Tahun 2022	Lampung Walk	Plt. Kakanwil, Kadivpas, Kadivyanikum, KaUPT dan Jajaran Kemenkumham Lampung
10/11/22	Buka Kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasarakatan, Hermansyah Siregar: Terus Berupaya Untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi WBP	Lampung Walk	Plt. Kakanwil, Kadivpas, Kadivyanikum, KaUPT dan Jajaran Kemenkumham Lampung
10/11/22	Dengan Tekad dan Semangat "Pahlawanku Teladanku", Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Peringati Hari Pahlawan Ke-77	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
11/11/22	Penutupan Pameran Hasil Produk Unggulan Warga Binaan	Lampung Walk	Kadivpas dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung
11/11/22	Kadivmin Kanwil Kemenkumham Lampung Pimpin Rapat Persiapan Rehabilitasi Rumah	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, PPK dan PT
11/11/22	Kadivmin, Topan Sopuan Tinjau Lahan Aset BMN Kemenkumham Lampung di Natar Lampung	Aset BMN Natar	Kadivmin dan Kasubbag Keuangan dan BMN
12/11/22	Rapat Pleno Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Perubahan Kedua Atas Ranperda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan	Aula Pemkab Lampung Selatan	JFT Suncang Kanwil Lampung
12/11/22	Rapat Pleno Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Kabupaten Lampung SelatanTentang Pemerintah Desa	Aula Pemkab Lampung Selatan	JFT Suncang Kanwil Lampung
12/11/22	Hari Terakhir Pameran Hasil Karya Warga Binaan, Kadiv Pemasarakatan Hibau Seluruh UPT Terus Berinovasi dan Berkreasi	Lampung Walk	Kadivpas dan KaUPT
13/11/22	Sambangi Rutan Kelas IIB Menggala, Kadivpas Lampung Beri Penguatan Tusi Pada Petugas	Rutan Kelas IIB Menggala	Kadivpas dan Karutan

14/11/22	Kunjungi Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Tinjau Pelayanan dan Fasilitas Publik	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Staff Ahli Menteri, Kadivmin, Plt. Kakanim dan Pegawai Kanim Bandar Lampung
14/11/22	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Lampung Periode 2022-2025 Gelar Rapat Koordinasi	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanikum dan Pengurus MKNW Lampung
14/11/22	Lagi! Persatuan Futsal Pengayoman (PFP) Kantor Wilayah Lampung Raih Juara 2 Mini Soccer Tournament, Hari Listrik Nasional yang Diselenggarakan PLN UID LAMPUNG	Lapangan Polda Lampung	PFP Kanwil Lampung
14/11/22	Pimpin Apel Pagi, Kadivyanikum Berikan apresiasi Atas 4 Penghargaan Yang Diraih Kanwil Lampung di Bidang Kekayaan Intelektual	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
14/11/22	"Susun Strategi dan Jaga Integritas", Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Berikan Penguatan Tusi dalam Pencapaian Tarja Jajaran Kemenkumham Lampung	Ballroom Emersia Hotel	Staff Ahli Menteri, Kadivmin, Kadivpas, Kadivim, KaUPT dan Kabag Program dan Humas
15/11/22	Tinjau Rutan Kelas IIB Kotaagung, Plt. Kakanwil dan Kadivmin Lampung Coba Fasilitas Kesehatan Poliklinik	Rutan Kelas IIB Kotaagung	Plt. Kakanwil, Kadivmin, KaRutan Kelas IIB Kotaagung
15/11/22	Hermansyah Siregar: Jaga Kekompakan dan Kerjasama, Plt. Kakanwil Lampung Beri Penguatan Tusi Pegawai Lapas Kelas IIB Kotaagung	Lapas Kelas IIB Kotaagung	Plt. Kakanwil, Kadivpas, Kadivmin, KaLapas dan seluruh Pegawai Lapas Kotaagung
15/11/22	Saksikan Sertijab Kepala Rutan Kelas IIB Kotaagung, Kadivpas: Terimakasih Atas Dedikasi	Rutan Kelas IIB Kotaagung	Kadivpas, Kadivmin, Seluruh KaUPT
15/11/22	Targetkan Peningkatan Pendaftaran Merek di Provinsi Lampung, Kanwil Kumham Lampung Gelar Sosialisasi Merek Tahun 2022	Ballroom Emersia Hotel	Plt. Kakanwil, Kadivyanikum, Kadivim, Kabid Hukum
15/11/22	Sosialisasi Merek di Provinsi Lampung Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM RI Serahkan Sertifikat Merek dan Sertifikat Mall Berbasis Kekayaan Intelektual	Ballroom Emersia Hotel	Plt. Kakanwil, Kadivyanikum, Kadivim, Kabid Hukum
16/11/22	"Jaga Sinergitas dan Kekompakan", Hermansyah Siregar Kunjungi UPT Pemasyarakatan se-	UPT se-Kotabumi	Plt. Kakanwil, Kadivim dan KaUPT
16/11/22	Hermansyah Siregar : Ekspos Pencapaian Kinerja Ke Publik, Plt. Kakanwil Beri Penguatan Tusi Pegawai Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi	Plt. Kakanwil, Kadivim, Kadov
16/11/22	Pastikan Layanan Berbasis HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Tinjau Rutan	Rutan Kelas I Bandar Lampung	Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM
16/11/22	Kadivmin Kanwil Lampung Sambut Kunjungan Kerja Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM
16/11/22	Rapat Pleno Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Kantor Wilayah Lampung	JFT Suncang Kanwil Lampung
17/11/22	Beri Penguatan Tusi Petugas Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Hermansyah Siregar Sempatkan	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Plt. Kakanwil, Kadivmin, KaLapas Gunung Sugih
17/11/22	Saksikan Ikrar Setia Kepada NKRI, Hermansyah Siregar Beri Selamat 3 Napiter Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Plt. Kakanwil, Kadivmin, KaLapas Gunung Sugih, Seluruh KaUPT
17/11/22	Kanwil Kumham Lampung Gelar Rapat Persiapan Jelang Rakor Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Target Kinerja TA 2023	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil dan Pimti Pratama, Seluruh KaUPT
18/11/22	MPWN Provinsi Lampung Lakukan Rapat Tindak Lanjut Surat Rekomendasi MPDN Terkait	Kantor Wilayah Lampung	MPWN dan Notaris
18/11/22	Tingkatkan Fungsi Kehumasan, Ditjenpas Laksanakan Kegiatan Asistensi Kehumasan Bagi	UPT Pas Lampung	Kadivpas, Humas Ditjenpas dan UPT
18/11/22	Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Farid Junaedi Sebagai Saksi Serah Terima Jabatan Kepala Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Kadivpas, Plt dan KaRupbasan Kelas I Bandar Lampung
18/11/22	Kunjungi LPKA Kelas II Bandar Lampung, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Pastikan Kebutuhan Andikpas Terpenuhi	LPKA Kelas II Bandar Lampung	Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Kasubbid HAM
18/11/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Rumpungan Dua Raperda Inisiatif DPRD Kab. Lampung Tengah	Ruang Rapat DPRD Lampung Tengah	Kabid Hukum dan JFT Suncang
18/11/22	Selesaikan Proses Harmonisasi Ranperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah, Kanwil Lampung Tekankan Peran DPM-PTSP Pesawaran Dalam Penyelenggaraan Izin Usaha di	Kantor Wilayah Lampung	DPRD Kab. Pesawaran, Kasubbid FPPHD dan JFT Suncang
20/11/22	Buka Rakor MPW dan MPD, Kadivyanikum Kanwil Lampung Apresiasi Kinerja Notaris	Ballroom Horison Hotel	Kadivyanikum, MPWN, MPDN
21/11/22	Hasilkan Rekomendasi Penyelesaian Masalah Kenotariatan, Plt. Kepala Bidang Yankum Tutup Rakor MPWN dan MPDN se-Provinsi Lampung Tahun 2022	Ballroom Horison Hotel	Kadivyanikum, MPWN, MPDN
21/11/22	Kanwil Lampung Gelar Rapat Monev Capaian Aksi HAM B08 Provinsi Lampung Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kepala Bidang HAM, Kepala Subbidang Pemajuan HAM,
21/11/22	Kanwil Kumham Lampung Raih Penghargaan Terbaik ke-5 Pengguna Cash Management System (CMS) terbanyak pada Rekening Virtual di Lingkungan Satuan Kerja Ditjen PAS Tahun	Hotel Melia Purosani, Yogyakarta	Kepala Subbidang Pengelolaan Keu dan BMN
21/11/22	Perkuat Partisipasi Publik, Pemda Kab.Mesuji Bersama Kanwil Lampung Laksanakan Diskusi Terfokus Terhadap Penyusunan Naskah Akademik Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Pemkab Mesuji	Kadivyanikum dan Pj. Bupati Mesuji
21/11/22	Pimpin Apel Pagi, Kadivmin Ucapkan Terima Kasih atas Konsistensi Seluruh Pegawai Dalam	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
21/11/22	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris Tahun 2022, Rakor MPW dan MPD Notaris se-Provinsi Lampung Gelar Diskusi Panel	Ballroom Horison Hotel	MPW dan MPD Notaris
21/11/22	Tepis Berita Hoax, Kadivpas Hadiri Konferensi Pers Lapas Kelas IIA Kotabumi Bersama	Lapas Kelas IIA Kotabumi	Kadivpas, Kalapas Kotabumi dan Media
22/11/22	Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Workshop SAKIP yang Diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Subbagian Program dan Pelaporan
23/11/22	Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Yang Maksimal, Kanwil Lampung Ikuti Pembukaan Kegiatan Rakor Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023	Grand Mercure Jakarta	Pimti Pratama
23/11/22	Akselerasi Percepatan Penyusunan Naskah Akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kantor Wilayah Laksanakan FGD bersama BPPRD Kab.Lampung Selatan	Pemkab Lampung Selatan	Kadivyanikum, JFT Suncang dan Pemkab Lampung Selatan
24/11/22	Hari Kedua Rapat Koordinasi, Pimti Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Evaluasi Kinerja	Grand Mercure Jakarta	Pimti Pratama
24/11/22	Plt Kakanwil dan Pimti Kanwil Lampung Ikuti Pembekalan Materi di Hari Ke-2 Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 Dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023	Grand Mercure Jakarta	Pimti Pratama
24/11/22	Inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal, Kanwil Kemenkumham Lampung Koordinasi Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang	Subbidang Kekayaan Intelektual

25/11/22	Rakor Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Resmi Ditutup, Sekjen Amanatkan untuk Menindaklanjuti dan Diimplementasikan Secara Optimal	Grand Mercure Jakarta	Sekjen, Menkumham dan Pimti Pratama
25/11/22	Tunjukkan Kinerja Semakin Pasti dan BerAkhlak dan Siap Capai Target, Kanwil Lampung ikuti Penyampaian Hasil Rumusan Target Kinerja Tahun 2023	Grand Mercure Jakarta	Sekjen, Menkumham dan Pimti Pratama
25/11/22	Dampak UU Cipta Kerja Izin Penyelenggaraan Reklame Harus Disesuaikan, Tim Suncang Kanwil Lampung Harmonisasi Raperda Kab. Tubaba	Pembkab Tulang Bawang Barat	Kadib Hukum dan JFT Suncang
25/11/22	Tim Suncang Kanwil Lampung Selenggarakan Rapat Pengharmonisasian Pematangan dan Pemantapan Konsep Raperda Kab. Pesisir Barat tentang P4GNPN	Pembkab Pesisir Barat	JFT Suncang Kanwil Lampung
25/11/22	Meriahkan Teacher Day, Kanwil Kemenkumham Lampung Jadi Guest Teacher	SDIT Baitul Jannah	JFT Penyuluh Hukum
25/11/22	Dukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Produktif, Kanwil Lampung Rampungkan Harmonisasi Raperda Kab. Tulang Bawang Barat tentang Pengelolaan Keuangan	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbid FPPHD dan JFT Suncang dan Pembkab Tubaba
28/11/22	Peningkatan Kualitas SDM Terhadap KIK, Kanwil Lampung Kunjungi dan Koordinasi Dengan Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI	Ditjen KI	Subbidang Kekayaan Intelektual
28/11/22	Kanwil Lampung ikuti Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Intensifikasi & Ekstensifikasi PNBPTA 2020 s/d Semester I Tahun 2022 dan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas LK	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kabag Umum dan Subbidang Pengelolaan Keuangan dan BMN
29/11/22	"Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri". Kanwil Kemenkumham Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
30/11/22	Rapat Pleno Harmonisasi, Pematangan, dan Pemantapan Konsep Raperda Kabupaten Lampung Timur Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbid FPPHD, JFT Suncang dan Pembkab Lampung Timur
30/11/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Rampungkan Raperda Kota Metro Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbid FPPHD, JFT Suncang dan Pemkot Metro
30/11/22	Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Pleno Harmonisasi, Pematangan, dan Pemantapan Konsep Raperda Kab. Pringsewu Tentang Badan HPPUN Pemukiman	Kantor Wilayah Lampung	Kadib Hukum, JFT Suncang dan Pembkab Pringsewu
30/11/22	Kadiv Keimigrasian Kanwil Lampung Hadiri Pengarahan Pimpinan Pejabat Fungsional Analisis Keimigrasian dan Munas II PERANIM Tahun 2022	Jakarta	Kadiv Imigrasi

HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
01/12/22	Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Hermansyah Siregar sambut Hangat Audiensi dari Universitas Saburai	Kantor Wilayah Lampung	Plt. Kakanwil, Plt. Kabag Umum, Kalapas Kalianda
01/12/22	2 UPT Pemasarakatan Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Raih Penghargaan KPPN Metro Award 2022	Metro	KaUPT (Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)
03/12/22	Wamenkumham Kupas Tuntas RKUHP Sebagai Pembaruan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan di Universitas Saburai Lampung	Universitas Saburai Lampung	Wamenkumham, Pimti Pratama
03/12/22	Kunjungan Kerja Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Wamenkumham Apresiasi Klinik Pratama Sebagai Percepatan Pelayanan Kesehatan	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Wamenkumham, Pimti Pratama dan KaLapas Gunung Sugih
03/12/22	Sapa Warga Binaan, Wamenkumham Kunjungi Lapas Kelas IIA Metro	Lapas Kelas IIA Metro	Wamenkumham, Pimti Pratama, KaLapas Metro
05/12/22	Kadivmin Kanwil Lampung Tinjau Progres Rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah dan Rumah Dinas	Kantor Wilayah Lampung dan Rumah Dinas Jakarta	Kadivmin dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN
05/12/22	2022		Kadivpas
05/12/22	Pimpin Apel Pagi, Kadivmin Kanwil Lampung Ingatkan Untuk Disiplin dan Bertanggung Jawab Dalam Penggunaan BMN	Kantor Wilayah Lampung Jakarta	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Menkumham
06/12/22	RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang	Jakarta	Menkumham
06/12/22	Menkumham Yasonna Yakini Pengesahan RKUHP Perkuat Hukum Pidana Nasional	Jakarta	Menkumham
06/12/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Hadiri Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD APBN T.A. 2023 Oleh Gubernur Lampung	Ballroom Novotel Hotel	Kasubbag Program dan Pelaporan
06/12/22	Dukung Konsultasi Publik Penyusunan Propemperda, Kanwil Kemenkumham Lampung Hadir Sebagai Narasumber	Ballroom Golden Tulip Hotel	Kadivyanhum
07/12/22	Peringati Hari Ibu ke-94, Ibu Gubernur Lampung Kunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Ibu Gubernur Lampung, Kadivpas, Kadivmin dan KaLPP Bandar Lampung
08/12/22	Jelang Pemeriksaan Interim BPK RI Atas Laporan Keuangan 2022, Kadiv Administrasi Buka Rapat Pendahuluan dan Penelitian Data Dukung Perlindungan dan Layanan di Arab Saudi	Kantor Wilayah Lampung Arab Saudi	Kadivmin dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Menkumham
08/12/22	Dirjen AHU Resmi Lantik 350 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanhum, Kasubbid KI, PPNS Kanwil Lampung
09/12/22	Kemenkumham Lampung dan Pemda Tanggamus Laksanakan Rapat Pleno Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Tanggamus	Kantor Wilayah Lampung	Kasubbid FPPHD, JFT Suncang dan Pemkab Tanggamus
12/12/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Beserta Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Raih 15 Penghargaan Pada Peringatan Hari HAM Sedunia	Jakarta	Plt. Kakanwil, Kadivyanhum, Gubernur Lampung dan Pemda Provinsi Lampung

12/12/22	Dukung Restorative Justice, Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhiprava Bapas Bandar Lampung	Kantor Wilayah Lampung Jakarta	Kadivpas, KaUPT Bapas seProvinsi Lampung Menkumham
12/12/22	Yasonna Tegaskan Perlindungan dan Penegakan HAM		
12/12/22	Memulai Rangkaian Pemeriksaan Interim atas LK Tahun 2022, Kanwil Lampung Terima Kedatangan Tim BPK dan Ikuti Entry Meeting	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin, Kadivpas, Kadivim, Kalapas Bandar Lampung dan Subbidang Pengelolaan Keuangan dan BMN
12/12/22	Pimpin Apel Pagi, Kadiv Keimigrasian Araahkan Untuk Pahami Substansi UU KUHP Yang Baru	Kantor Wilayah Lampung Jakarta	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Menkumham
14/12/22	Kemenkumham Masuk 3 Terbaik Badan Publik Informatif Kategori Kementerian Jaga Kinerja UPT Pemasarakatan Menjelang Nataru, Kadiv Pas Kunjungi Lapas	Lapas Kelas II Way Kanan dan Rutan Kelas II Sukadana	Kadivpas dan KaUPT
15/12/22	Kelas IIB Way Kanan dan Rutan Kelas IIB Sukadana Capai Tahap Akhir Penyusunan Naskah Akademik, Tim Suncang Kanwil Lampung		
15/12/22	Review Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Mesuji	Kantor Wilayah Lampung Jakarta	JFT Suncang Menkumham
15/12/22	Penegakan Hukum		
16/12/22	Kemenkumham Salurkan Bantuan Sosial, Hermansyah Siregar Turut Dalam Gerakan Kumham Peduli Cianjur	Cianjur	Sekjen dan Plt. Kakanwil
16/12/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Exit Meeting dengan BPK, Pemeriksaan Interim Jajaran Kanwil Lampung Tahun 2022 Berakhir	Kantor Wilayah Lampung	Kadivmin dan Plt. Kabag Umum
19/12/22	Kemenkumham Lampung Serahkan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada PJ Bupati Mesuji	Swiss Bell Hotel	Kadivyanakum dan PJ Bupati Mesuji
19/12/22	Bangkit Bela Negeraku, Jaya Indonesiaku, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Upacara Hari Bela Negara ke-74 Tahun 2022 dan Kesiapan Jelang Perayaan Nataru	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
20/12/22	Tingkatkan Sinergitas, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Audiensi Dengan Kapolda Lampung Jelang Nataru	Polda Lampung	Plt. Kakanwil, Pimti Pratama dan Kapolda Lampung
21/12/22	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti di Wilayah Provinsi Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kadivyanakum dan Notaris
21/12/22	Perkuat Sinergitas Dalam P4GN, Kadiv Pemasarakatan Koordinasi Dengan Kepala BNN Provinsi Lampung	Kantor BNNP	Kadivpas, KaUPT dan KaBNNP
21/12/22	Tindaklanjuti Permohonan Penyidik, MKNW Klarifikasi 5 Notaris	Kantor Wilayah Lampung Jakarta	MKNW dan Notaris
22/12/22	Sorta Siap Nahkodai Kanwil Kemenkumham Lampung		Sorta
22/12/22	Jelang Akhir Tahun, Divisi Pas Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi Seluruh UPT Pemasarakatan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas dan Seluruh KaUPT
22/12/22	Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, Kanwil Lampung Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
26/12/22	Menyambut Hari Bhakti Imigrasi Ke-73, Wamenkumham Berikan Arahan Persiapan Gelaran Tennis Lapangan Imigrasi Open 2023	Kantor Wilayah Lampung	Divisi Keimigrasian
26/12/22	Pimpin Apel Pagi, Kadivpas Ucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2022 dan Tetap Jaga Kesehatan	Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas dan Seluruh Pegawai Kantor Wilayah
27/12/22	Tingkatkan Sinergitas, Kakanwil Kemenkumham Lampung Kunjungi Kejaksaaan Tinggi Lampung	Kejaksaaan Tinggi Lampung	Kakanwil, Pimti Pratama dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Lampung

27/12/22	Awali Tugasnya sebagai Kakanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Kunjungi dan Tinjau Empat UPT Pemasarakatan Sekaligus	UPT Pemasarakatan	Kakanwil, Pimti Pratama dan KaUPT
27/12/22	Awali Tugas, Kakanwil Kemenkumham Lampung Kuatkan Tugas dan Fungsi Jajaran	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Pimti Pratama dan Pejabat Administrator
27/12/22	Audiensi Perdana Ke Polda Lampung, Sorta : Jajaran Kumham Lampung Siap Bersinergi	Polda Lampung	Kakanwil, Pimti Pratama dan Kapolda
28/12/22	Inisiasi Griya Abhipraya Hingga Pastikan Petugas Berikan Pelayanan Prima, Sorta Kunjungi Bapas, Kanim dan Lapas I Bandar Lampung	UPT Bandar Lampung	Kakanwil, Pimti Pratama dan KaUPT
28/12/22	BAMA pada Lapas,Rutan Dan LPKA Se-Lampung Tahun Anggaran 2023		
28/12/22	Rapatkan Barisan Jajaran Kumham Lampung, Sorta Pimpin RAKOR Kepala UPT Se-Lampung	Kantor Wilayah Lampung	Kakanwil, Pimti Pratama dan KaUPT
29/12/22	Sampaikan 5 Arahan Kunci, Kakanwil Sorta Berikan Penguatan Tusi kepada Seluruh Pengampu Kehumasan	Lapas Kelas IIB Kalianda	Humas Seluruh UPT
29/12/22	Tinjau Lapas Kalianda, Sorta Apresiasi Beragamnya Pelatihan yang Disediakan untuk WBP	Lapas Kelas IIB Kalianda	Kakanwil, Pimti Pratama dan KaUPT
29/12/22	Kunjungan Kerja ke Kanim Kalianda, Sorta Tinjau Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Keimigrasian	Kanim Kalianda	Kakanwil, Pimti Pratama dan KaUPT
29/12/22	Audiensi dengan Pemkab Lampung Selatan, Kakanwil Kumham Lampung Teken MoU Kerjasama di Bidang Keimigrasian dan Pelayanan Hukum	Pemkab Lampung Selatan	Kakanwil, Pimti Pratama, KaUPT dan Pemkab Lampung Selatan
30/12/22	Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Exit Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI atas LK Kemenkumham Tahun 2022	Kantor Wilayah Lampung	Kadivpas dan Plt. Kabag Umum